

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, di mana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun guna memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan antara lain mengenai pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mendanai kegiatan yang telah dianggarkan;
- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023; dan
- f. Informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 13);
- s. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.



1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bendahara Umum Daerah (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 yang berbasis akrual terdiri dari:

1) Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan terdiri dari Aset Lancar dan Aset Nonlancar, Kewajiban disajikan terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas. Untuk data mengenai Kas Daerah, Investasi, Dana Cadangan, Tuntutan Perbendaharaan, Piutang Dana Transfer, Utang Bunga, Utang Luar Negeri (jangka pendek dan jangka panjang) didasarkan pada Neraca PPKD BUD, sedangkan data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Tuntutan Ganti Rugi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Utang Pemotongan Pajak (PFK) didasarkan pada Neraca konsolidasi dari SKPD.

2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Daerah menyajikan data tentang Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Konsolidasi LRA SKPD menyajikan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data/informasi keuangan dari PPKD BUD terdiri dari Pendapatan Transfer, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3) Laporan Arus Kas (LAK)

Data keuangan mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku BUD disusun dalam salah satu Laporan Keuangan yaitu Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh Entitas Pelaporan yakni PPKD yang berada di bawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu.

4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Silpa/Sikpa, Koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menjelaskan tentang akun yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, dan LP-SAL. Penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, Ekonomi Makro, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Informasi tambahan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual yakni pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Semua informasi dan penjelasan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan guna pengungkapan yang andal dan memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD.

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 berjumlah 47 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan, dengan rincian pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023

1	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
2	Sekretariat DPRD	Jl. Antara Bengkulu
3	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian Bengkulu
4	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian Bengkulu
5	RSUD Kabupaten Bengkulu	Jl. Kelapapati Tengah Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6	RSUD Kecamatan Mandau	Duri Kec. Mandau
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian Bengkulu
8	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pramuka Bengkulu
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
10	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Sudirman Bengkulu
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. H.R Subrantas Bengkulu
12	Dinas Sosial	Jl. Antara Bengkulu
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Duri Kec. Mandau
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Pertanian Bengkulu
15	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Antara Bengkulu
16	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pertanian Bengkulu
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pertanian Bengkulu
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian Bengkulu
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah Bengkulu
20	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka Bengkulu
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Kartini Bengkulu
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian Bengkulu
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Antara Bengkulu
24	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Arif Rahman Bengkulu
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian Bengkulu
26	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian Bengkulu
27	Dinas Perkebunan	Jl. Pertanian Bengkulu
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Jl. Pertanian Bengkulu
29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian Bengkulu
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara Bengkulu
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian Bengkulu
32	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Sudirman Bengkulu
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara Bengkulu
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian Bengkulu
35	Inspektorat	Jl. Antara Bengkulu
36	Kantor Camat Bengkulu	Jl. Panglima Minal Bengkulu
37	Kantor Camat Bantan	Kec. Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu	Kec. Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil	Kec. Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana	Kec. Bandar Laksamana



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

41	Kantor Camat Rupert	Kec. Rupert
42	Kantor Camat Rupert Utara	Kec. Rupert Utara
43	Kantor Camat Mandau	Kec. Mandau
44	Kantor Camat Pinggir	Kec. Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan	Kec. Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau	Kec. Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara Bengkalis

c. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis disusun oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yang berbasis akrual merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan SKPKD.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

a. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, di mana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera (Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil) terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera, yang selanjutnya semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan-endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya, diantaranya Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

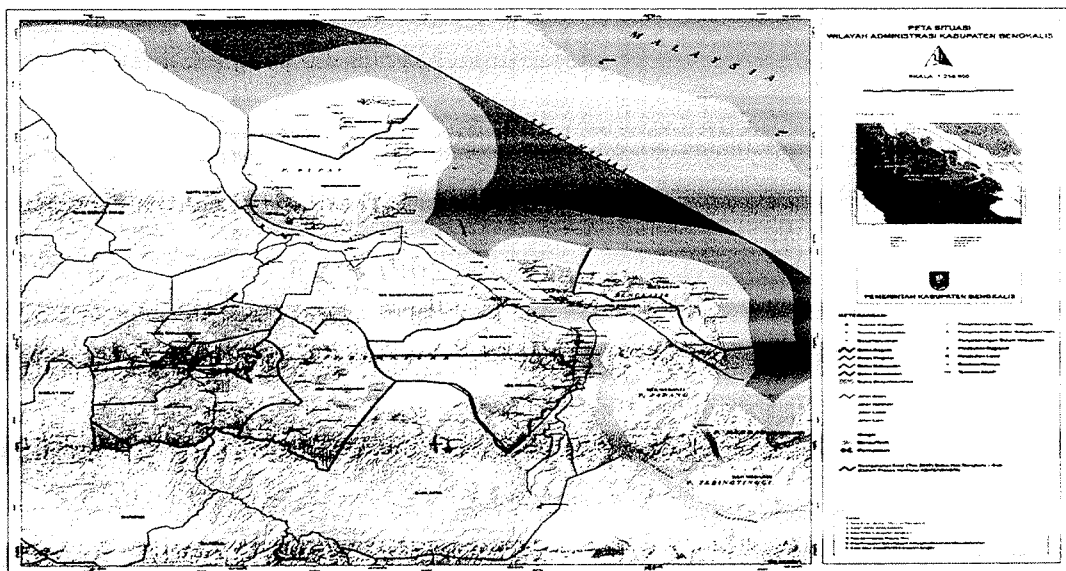
Pada saat itu Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Menurut perhitungan Badan pusat statistik (BPS), Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.426,48 km² atau 842.648 Ha, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera di mana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis

Gambar. I-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 Km². Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan, di mana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 53% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wilayah 1.244,47 Km² (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km² (14,60%), Kecamatan Rupert dengan luas wilayah 1.136,31 Km² (13,48%) dan Kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 855,62 Km² (10,15%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas yang lebih kecil, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupert Utara (4,49%). Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel I-1 berikut.

Tabel I-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49
2	Bantan	Selatbaru	-	23	442,93	5,26
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6,25
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.237,70	14,69
5	Sia Kecil	Bonk Muda	-	17	957,95	11,37
6	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42
7	Batin Solapan	Sebangar	-	13	855,62	10,15
8	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.244,71	14,77
10	Rupert	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,48
Total Keseluruhan			19	136	8.426,48	100,00

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupert yang terdiri dari Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.524,85 km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 km².

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, selain karena sebagian wilayahnya ada yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan ada juga sebagian wilayahnya yang berada pada jalur ekonomi penting Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Posisi tersebut tentunya dapat saja 9 berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis masih memiliki potensi daya tarik bagi investor lokal maupun luar kabupaten, hal ini dikarenakan lahannya yang masih potensi untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya serta anggaran daerah yang masih cukup besar untuk dijadikan market modal bagi kedatangan investor ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 x dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha. Adapun fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Cekungan Rawa Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. b) Dataran Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Di samping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu. Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

d. Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, di mana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera di mana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang di antaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa. Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupa, Rupa Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan.

e. Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupa, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembang Luar. Di antara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang ± 90 Km. Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa di antaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi. Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupert. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupert dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar.

f. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert dan Rupert Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3. yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupert dan Rupert Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

g. Demografi

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis mencapai 68 jiwa per Km². Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian, kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel I-2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Peringkat
1	Mandau	372,25	153.251	26,72%	412
2	Pinggir	811,46	62,659	10,93%	77
3	Bathin Solapan	855,62	93.542	16,31%	109
4	Talang Muandau	1.244,71	24.353	4,25%	20
5	Bukit Batu	526,62	22.203	3,87%	42
6	Siak Kecil	957,95	24.831	4,33%	26
7	Bandar Laksamana	1.237,70	16.286	2,84%	13
8	Rupert	1.136,31	35.203	6,14%	31
9	Rupert Utara	378,68	14.249	2,48%	38
10	Bengkalis	462,24	84.342	14,71%	182



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

11 Bantan	442,93	42.585	7,43%	96
Total Keseluruhan	8.643,09	658.846	100,00%	94

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Berdasarkan Tabel I-2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 412 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 153.251 jiwa atau sebesar 26,72% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupa Utara yaitu sebanyak 14.249 Jiwa atau 2,48% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan industri sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah. termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan lingkungan hidup.

Penduduk berdasarkan *sex ratio* di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada di kecamatan Talang Muandau dengan sebanyak 109 laki-laki per 100 orang wanita.

Pertambahan penduduk tahun di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,1%. Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil.

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga memungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.5 SUMBER DANA

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4.837.972.971.732,00 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar	: Rp	487.664.529.682.00
b. Pendapatan Transfer sebesar	: Rp	4.057.039.766.084,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar	: Rp	0,00
d. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	293.268.675.966.00

1.6 KEBIJAKAN KONVERSI

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, untuk mensinergikan antara Peraturan sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kode rekening dikonversi ke kode akun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang secara teknis telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis
- 1.5. Sumber Dana
- 1.6. Kebijakan Konversi
- 1.7. Perubahan kebijakan Akuntansi
- 1.8. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
 - 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan
- 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
- 5.1.2. Belanja
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.5. Pendapatan-LO
- 5.1.6. Beban
- 5.1.7. Aset
- 5.1.8. Kewajiban
- 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

- 6.1. Informasi Rekening Giro yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.2. Informasi Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.3. Informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
- 6.4. Informasi Lainnya

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah adalah pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Pembangunan daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah harus diarahkan pada upaya untuk mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan, sebagai bentuk nyata dukungan daerah terhadap pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu maka pelaksanaan pembangunan daerah haruslah diselaraskan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan menjadi hal utama yang harus dicermati. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi. Untuk mewujudkan interrelasi pembangunan antar tingkat pemerintahan untuk mencapai efektivitas pembangunan secara menyeluruh dalam rangka untuk mencapai target-target pembangunan maka pembangunan Kabupaten Bengkalis diselaraskan dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan dari yang tertinggi sampai Pemerintahan yang terendah. Sinkronisasi ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menjamin terjadinya sinergitas dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan rencana pembangunan nasional. Pada tahun 2023, perencanaan pembangunan di tingkat nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan tema pembangunan nasional yaitu peningkatan “Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Penetapan prioritas nasional tersebut salah satunya bertujuan untuk mencapai sasaran pengembangan wilayah yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pertumbuhan Jawa dan Bali. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan nasional untuk wilayah Sumatera, di mana Kabupaten Bengkulu merupakan bagiannya, antara lain adalah sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi 4,5%-4,8%,

2) tingkat kemiskinan 8.3%-8.8%.

3) pengangguran terbuka 3,7%-4,0%.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara nasional, yang berbasiskan pada kondisi aktual Kabupaten Bengkulu. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan arah kebijakan perekonomian daerah. Terkait dengan itu, maka arah kebijakan perekonomian Kabupaten Bengkulu harus searah dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan tetap mengacu pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu tahun 2023. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 secara eksplisit dapat dilihat pada data perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkulu tahun 2020-2023 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021-2023

No	Indikator	Unit	2021	2022	2023	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Dengan Migas		0,51	2,22	2,5	2,82-3,49
	- Tanpa Migas		4,79	4,55	1,75	3,5-3,8
2	Laju Inflasi Kumulatif	%	2,0	5	2,5	2,8-3
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp.Juta /Kapita	129,43	130,16	201,17	225,20-230,05
4	Kemiskinan	%	6,63	6,32	5,94	6,31-6,65
5	Indeks Gini	Point	0,273	0,296	0,268	0,319-0,328
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,63	7,18	6,05	3,92 - 4,13
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,58	74,38	74,8	74,5-74,8

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2023

Berdasarkan tabel II-1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu dengan migas menunjukkan kontraksi yang positif pada tahun 2021 dengan nilai 0,51%, Hal ini terus berlangsung hingga tahun 2022 yang semakin membaik, ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 2,22%. Kondisi ini tentu diharapkan akan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan target pertumbuhan sekitar 2,82% sampai 3,49%.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu non migas menunjukkan pertumbuhan yang terus membaik sebesar 4,79%, dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- demikian untuk asumsi pertumbuhan ekonomi non migas di perubahan tahun 2023 mengalami koreksi yang sebelumnya pada angka 1,75% menjadi 3,5%–3,8%.
- (2) Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada laju inflasi Provinsi Riau dalam kurun 2021-2023 masih relatif besar sebagai akibat masih besarnya tingkat ketergantungan daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis terhadap sejumlah bahan pokok dari luar Kabupaten Bengkalis, laju inflasi yang masih berkisar di angka 2% ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok ke Kabupaten Bengkalis. Namun, dari sisi inflasi non bahan pokok untuk Kabupaten Bengkalis tidak terlalu signifikan mempengaruhi kondisi inflasi di tingkat kabupaten karena disebabkan oleh dukungan anggaran pada sektor-sektor pelayanan dasar bagi masyarakat relatif besar setiap tahunnya. Namun, yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk akhir tahun sesuai dengan data dari Bank Indonesia terkait peningkatan inflasi nasional sebesar 4,7%–5,5% yang membutuhkan kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengantisipasinya melalui terobosan kebijakan akhir tahun yang dapat mengurangi beban inflasi bagi masyarakat.
 - (3) PDRB per Kapita atas harga berlaku (AHB) Kabupaten Bengkalis terjadi peningkatan dari Rp129,43 Juta/Kapita menjadi Rp130,16 Juta/Kapita di tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan sebesar Rp201,17 Juta/Kapita di tahun 2023 dengan mempertimbangkan akan adanya pergerakan sektor-sektor pendukung ke pertumbuhan yang positif khususnya dari kelompok-kelompok sektor di Kabupaten Bengkalis sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan 2023.
 - (4) Jika disandingkan dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 sebesar 6,63% yang turun dari tahun 2020. Dengan asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif dari sektor-sektor pemberi lapangan kerja dan tidak terlalu besarnya kemungkinan TPT di tahun 2022 serta meningkatnya penyerapan anggaran dari sejumlah program unggulan daerah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah, maka untuk tahun 2023 kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan menurun yang relatif besar dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 3,92 %–4,13%.
 - (5) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita dan penurunan angka kemiskinan diharapkan juga akan berdampak pada menurunnya kesenjangan kesejahteraan (Gini rasio/indeks Gini) yang pada tahun 2023 diprediksi menurun menjadi 0,275 poin sekalipun masih lebih besar dari angka di tahun 2022 sebesar 0,273 poin.
 - (6) Pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut juga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,63%, sehingga untuk tahun 2023 kondisi TPT Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan sebesar 6,05% dikoreksi penurunannya menjadi 3,92%–4,13%. Adanya peningkatan yang tidak terlalu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

signifikan terhadap TPT diperkirakan dari kontribusi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di tahun 2023 yang belum sepenuhnya akan terserap di akhir tahun 2023.

- (7) Indeks Pembangunan Manusia akan bertumbuh dalam kisaran sempit antara 74,8 poin hingga 74,88 poin.

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kapasitas anggaran pendapatan yang tersedia untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan dengan hal itu, anggaran belanja daerah ditentukan dari hasil analisis perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan keuangan daerah adalah sebagai bentuk upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut di Kabupaten Bengkalis mengedepankan prinsip *money follow program* dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2023 Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan masyarakat maka kebutuhan akan pendanaan pembangunan daerah juga semakin meningkat. Kondisi saat ini Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada ketersediaan anggaran pendapatan dari sumber sumber pendapatan yang sudah ada yang sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin berkurang seiring dengan telah dilakukannya vaksinasi secara bertahap. Kondisi yang demikian menjadi harapan bagi meningkatkan potensi pendapatan daerah. Disamping itu, meningkatkannya harga minyak dipasaran internasional diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis maka langkah-langka kebijakan sebagai berikut :

- a) Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah .
- b) Memperbaiki tata kelola pendapatan asli daerah dengan melakukan perombakan administrasi perpajakan dan retribusi daerah.
- c) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
- e) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan;

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut di atas diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut perkiraan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari anggaran pendapatan tahun berjalan sebesar 23,05% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan ada pengalihan objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari pajak provinsi bagi hasil menjadi opsi pajak kabupaten.
- b. Transfer diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 0,005% dari anggaran tahun berjalan pada tahun 2023, rendahnya perkiraan ini karena adanya pengalihan bagi hasil pajak provinsi khusus kendaraan bermotor dan bea baik nama kendaraan bermotor serta sudah dibayarkan sebagian besar hutang pusat terhadap bagi hasil.

Pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023, sektor pendapatan yang dominan masih bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, yakni dengan total kontribusi pada kisaran 87,66% dari total pendapatan secara keseluruhan. Kondisi yang demikian ini disebabkan karena Kabupaten Bengkalis adalah merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau yang mendapatkan porsi dana bagi hasil khususnya bagi hasil sumber daya alam yang cukup besar. Namun demikian, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot penerimaannya dengan berbagai kebijakan baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui inovasi-inovasi daerah dalam merangsang peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam mengalokasikan belanja daerah kebijakan yang harus dilakukan adalah memprioritaskan penganggaran pada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan berlandaskan pada kondisi yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja operasi khususnya belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- Memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, serta belanja serta belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur.
- Memprioritaskan belanja modal yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- Kebutuhan belanja daerah diarahkan dengan memperbesar barang dan jasa serta belanja modal untuk mendukung terlaksananya program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat mengatasi permasalahan pokok daerah seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pada pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi.
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja sosial

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

a). Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Belanja bidang Pendidikan dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp4.517.938.208.653,00 terealisasi sebesar Rp1.004.732.633.232,00

Tabel II.2 Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2023

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	909.675.611.223	1.004.732.633.232
Total Belanja Daerah	4.517.938.208.653	4.216.524.993.951
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	20,13%	23,83%

b). Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel II.3 Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2023

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	756.686.163.022	533.334.630.241
Total Belanja Daerah	4.517.938.208.653	4.216.524.993.951
Gaji ASN	117.862.943.664	111.496.144.876
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	4.720.110.028.068	4.116.174.978.802
Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	16,61%	12,96%

c). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel II.4 Mandatory Spending Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah	2.021.180.216.160	1.643.434.761.475
Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum (%)	68,20%	65,09%

d). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa indikator penting dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya adalah rasio rumah layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh serta cakupan lingkungan sehat dan aman didukung dengan PSU.

Tabel II.5 Mandatory Spending Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	909.675.611.223	1.004.732.633.232
Total Belanja Daerah	4.517.938.208.653	4.216.524.993.951
Rasio Alokasi Anggaran urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Belanja Daerah	20,13%	23,83%

e). Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Belanja Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar 31.087.885.420,00 terealisasi sebesar Rp30.512.029.372,00 yang terdiri dari:

Tabel II.6 Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis	14.142.098.220,00	14.079.185.838,00
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis	8.475.714.100,00	8.414.836.420,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis	8.470.073.100 .00	7.977.656.314,00
Total Belanja	31.087.885.420,00	30.512.029.372,00
Total Belanja Daerah	4.517.938.208.653	4.216.524.993.951
Rasio Alokasi Anggaran urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Belanja Daerah	0,69%	0,72%

f). Urusan Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase PMKS yang tertangani dan



persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Belanja bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp2.500.594.900,00 terealisasi sebesar Rp2.275.642.690,00 pada Dinas Sosial.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bengkalis pada umumnya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga lainnya serta untuk menutup defisit Anggaran.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 diarahkan pada SilPA yang diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 diarahkan untuk penyertaan modal daerah.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel II.2

Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	
	Rp	Rp	Rp	%
I. Pendapatan	3.557.491,00	4.544.704,00	987.213,00	22
I.1. Pendapatan Asli Daerah	322.846,00	487.664,00	164.817,00	34
I.2. Pendapatan Transfer	3.234.644,00	4.057.039,00	822.395,00	20
I.3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Belanja	4.199.741,00	4.837.972,00	638.231,00	13
II.1. Belanja Operasi	2.512.856,00	2.980.439,00	467.583,00	16
II.2. Belanja Modal	1.133.163,00	1.171.879,00	38.716,00	3
II.3. Belanja Tidak Terduga	13.124,00	3.087,00	10.037,00	325
II.4. Belanja Transfer	540.597,00	682.567,00	141.969,00	21
Surplus/Defisit	(642.249,00)	(293.268,00)	(384.981,00)	119
III. Pembiayaan	642.249,00	293.268,00	384.981,00	119
III.1. Penerimaan	642.249,00	293.268,00	384.981,00	119
III.2. Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Tahun 2023

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator pembangunan yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang termasuk dalam indikator utama. Indikator makro pembangunan terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Indeks Gini.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Bengkulu pada Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu menetapkan IKU. Penetapan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu periode 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu. IKU Kabupaten Bengkulu yang disajikan pada Tabel berikut;

Tabel II-3 Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	% *ADHK	1,05%
2	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	% *ADHK	1,75%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	74,8
4	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	%	12,77%
5	Indek Reformasi Birokrasi		82,5
6	Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rp/Kapita/Tahun *ADHB	201,29
7	Angka pengangguran	%	6,05
8	Angka Kemiskinan	%	5,94
9	Gini Ratio	Point	0,268
10	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	57,47
11	Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan;	%	
a	Orang		1.100.000
b	Barang		36.000
12	IKLH	%	71
13	Indek Resiko Bencana		90,71

Sumber: RKPД Kabupaten Bengkulu Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

b. Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) digunakan untuk menggambarkan indikator kinerja program dan target per tahun selama 5 (lima) tahun.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2023, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan tema yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan prioritas nasional yaitu:

- 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap **perubahan iklim**
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,36 poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,9%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3%-6%
- 4) Tingkat Kemiskinan 7,5%-8,5%
- 5) *Gini Ratio* 0,375-0,378 poin.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan fokus utama permasalahan Provinsi Riau tahun 2023, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tema pembangunannya yaitu “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif”. Terdapat 3 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023, yaitu:

- 1) Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat
- 2) Peningkatan Pelayanan Publik
- 3) Peningkatan Daya Saing Daerah yang Kompetitif.

Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 73,43-73,69 poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,82%-3,49%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,92%-4,13%
- 4) Tingkat Kemiskinan 6,31%-6,65%
- 5) Gini Ratio 0,319-0,328 poin.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 untuk rencana pembangunan tahun 2023 serta penyelarasan terhadap RKP 2023 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2023. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah seperti termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021 - 2026, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut.

Berdasarkan konsistensi tema, dapat dianalisis bahwa tema pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bertujuan kepada perubahan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih Inklusif (untuk semua lapisan) dan berkelanjutan (menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan) dengan menitikberatkan kepada produktivitas kerja dari ekonomi itu sendiri. Tema ini berangkat dari percepatan pemulihan ekonomi nasional paska pandemi covid-19 tahun 2020 beserta beberapa gelombang variannya yang mempengaruhi sektor-sektor riil pembangkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat disemua lapisan di Indonesia.

Sedangkan tema dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 bertujuan kepada pemantapan yang kompetitif (dapat disaingkan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

dengan daerah lain) pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Tema ini merupakan penggalan dua tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, di mana tahun 2024 nanti sudah memasuki masa transisi pembangunan antar pemerintahan Kepala Daerah. Sehingga, tahun 2023 difokuskan kepada pemantapan ketiga aspek yang merupakan indikator utama pada pencapaian Visi dan Misi Pembanguna Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Merujuk pada kedua tema pembangunan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mendekati pencapaian bersama perekonomian dan kesejahteraan pada aspek-aspek Pertanian, Perkebunan, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang merupakan sektor riil pembangkit pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah paska gelombang pandemi covid-19 yang dimulai di tahun 2020 dengan tidak melupakan dukungan pelayanan dasar dari aspek kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur yang dapat mendukung produktivitas dan daya saing dari kelima sektor tersebut. Artinya, konsistensi tema antara pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis saling beririsan dan dapat bersinergi untuk mencapai target yang diinginkan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dibuat untuk menjawab permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka itu, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 adalah:

1. Pemulihan Usaha dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
2. Revitalisasi Industri dan Perdagangan dan Pengintegrasian dengan Pertanian dan Perkebunan
3. Modernisasi Pertanian dan Perkebunan yang ramah lingkungan
4. Pembangunan Pariwisata
5. Penyediaan pelayanan dasar untuk kesejahteraan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Sementara itu, perencanaan pada tingkat Provinsi Riau, tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 RPJMD 2020-2025, demikian pula dengan RPJM Nasional. Konsistensi rencana pembangunan tahun 2023 antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bengkalis adalah pada:

- 1) Pemulihan usaha dan perekonomian masyarakat,
- 2) Revitalisasi industri,
- 3) Penyediaan pelayanan dasar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan adanya anggaran pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang dikelola dengan baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat akan tercapai sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu setelah perubahan sebesar Rp4.837.972.971.732,00, terdiri dari pendapatan daerah Rp4.544.704.295.766,00 ditambah penerimaan pembiayaan Rp293.268.675.966,00.

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp487.664.529.682,00, Dana Transfer ditargetkan sebesar Rp4.057.039.766.084,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp0,00. Sementara itu, belanja dianggarkan sebesar Rp4.837.972.971.732,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.980.439.438.024,00, Belanja Modal sebesar Rp1.171.879.218.740,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.087.247.787,00 serta Transfer Rp682.567.067.181,00. Untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp293.268.675.966,00 sementara Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00.

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selama Tahun Anggaran 2023 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1.

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023

(dalam jutaan)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	4.544.704	4.021.936	522.768	11,50
I.1 Pendapatan Asli Daerah	487.664	614.588	126.924	26,03
I.2 Pendapatan Transfer	4.057.039	3.407.347	649.692	0,16
I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0
II. Belanja	4.517.938	4.120.136	397.802	8,80
II.1 Belanja Operasi	2.980.439	2.729.054	251.385	8,4
II.2 Belanja Modal	1.171.879	891.490	280.389	23,92



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
III.3 Belanja Tak Terduga	3.087	13	3.074	99,58
IV. Transfer	682.567	607.113	75.454	11,05
Surplus/Defisit	(293.268)	(205.735)	87.533	29,85
III. Pembiayaan	293.268	293.406	138	0,04
III.1 Penerimaan	293.268	293.406	138	0,04
III.2 Pengeluaran	0	0	10.000	0
SILPA Tahun Berjalan	0	87.671	87.671	0

Tabel III.1 merupakan ringkasan dari Realisasi Anggaran dalam jutaan rupiah dengan penjelasan sebagai berikut, untuk Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp4.544.704.295.766,00 dengan realisasi sebesar Rp4.021.936.083.669,39 atau 88,50%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian pendapatan, belanja, pembiayaan beserta realisasi dan persentase perkembangannya dapat dilihat pada penjelasan dan tabel di bawah.

a. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas.

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel III.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018
s.d. 2023

(dalam juta rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	444.510	319.280
2	2019	429.370	226.245
3	2020	306.842	251.925
4	2021	344.444	284.247
5	2022	344.413	349.796
6	2023	487.664	614.588

Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan kemudian ada peningkatan pada tahun 2023. Untuk Tahun Anggaran 2023 peningkatan target sebesar Rp143.250.903.602,00 atau 41,59% yaitu Rp344.413.626.080,00 pada tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rp614.588.429.804,39 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp349.634.385.373,15 atau 75,78%.

Realisasi tahun 2022 sebesar Rp349.634.385.373,15 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yang realisasinya sebesar Rp284.235.094.573,72 atau 23,00%. Pada tahun 2021 PAD sebesar Rp284.235.094.573,72 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang realisasinya sebesar Rp 251.925.869.915,53 atau 12,82%.

Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.679.985.183,31 atau 11,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Dilihat dari realisasi PAD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.47.414.915.184,03 atau 17,44% dibanding realisasi Tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami penurunan Rp.93.034.626.359,89 atau 29,14% dibandingkan realisasi tahun 2018.

2) Pendapatan Dana Transfer

Target dan realisasi dana transfer dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, digambarkan dengan tabel dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

Tabel III. 3

Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	3.055.965	3.040.447
2	2019	3.385.824	3.463.146
3	2020	2.538.339	2.573.597
4	2021	3.014.118	3.955.128
5	2022	3.003.565	2.979.779
6	2023	4.057.039	3.407.347

Dana Transfer Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 4.057.039.766.084,00 dan target Tahun 2022 sebesar Rp3.003.565.233.511,00, terdapat peningkatan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.053.474.532.573,00 atau 35%.

Realisasi Dana Transfer tahun 2023 sebesar Rp 3.407.347.653.865,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.979.779.293.522,00 mengalami peningkatan sebesar Rp427.568.360.343,00 atau 14,35%. Realisasi Dana Transfer tahun 2022 sebesar Rp2.979.779.293.552,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.955.128.529.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp975.349.290.358,00 atau 24,66%. Realisasi Dana Transfer tahun 2021 sebesar Rp3.955.128.529.440,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 mengalami kenaikan sebesar Rp1.381.531.104.061,51 atau 53,68%. Realisasi Dana Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 mengalami penurunan sebesar Rp889.548.879.393,98 atau 25,69%. Realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp422.698.905.773,59 atau 13,90% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mencakup beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Hibah;
- 2) Dana darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

Tabel III.4
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	0,00	0,00
2	2019	86.287	85.045
3	2020	92.243	91.869
4	2021	84.924	82.544
5	2022	0,00	0,00
6	2023	0,00	0,00

Sebagaimana yang digambarkan pada tabel III.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, Lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan target Tahun 2022 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp85.045.520.000 atau 100%. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.824.360.000,00 atau 8,02%. tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.324.970.000,00 atau 10,15%, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp82.544.910.000,00 atau 100%. dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 808.958,15 atau 100%.

b. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Tahun Anggaran 2023 belanja ditargetkan sebesar Rp4.837.972.971.732,00 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.517.938.208.653,00, terdapat kenaikan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp320.034.763.079 atau 7,08%. Untuk tahun anggaran 2023 realisasi belanja sebesar Rp4.227.671.123.678,05 ada kenaikan sebesar Rp1.146.129.726.17 atau 26% dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk tahun anggaran 2022 realisasi belanja sebesar Rp4.216.524.993.951,88 dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja sebesar Rp3.292.971.152.357,36, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp923.564.180.754,52 atau 28,05%. Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Tabel III.5
Perkembangan Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2018 s.d. 2023

(Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	2.070.115	1.846.310
2	2019	2.374.493	2.191.978
3	2020	2.079.598	1.981.293



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
4	2021	2.430.196	2.199.513
5	2022	2.799.554	2.598.560
6	2023	2.980.439	2.729.054

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.980.439.438.024,00 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.799.554.077.247,00, terdapat kenaikan target sebesar Rp180.885.360,77 atau 6,46%. Realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp2.729.054.015.689,05, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.598.560.224.108,88, terdapat kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp130.493.791.580,17 atau 5,02%. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp2.598.560.224.108,88, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.199.513.911.321,94, terdapat kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp399.066.306.986,94 atau 18,14%.

Dari Tabel III.4 dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 hampir setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020.

2) Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Persentase belanja modal dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2018 sebesar 28,18%, Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,99%, Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,72%, Tahun Anggaran 2021 sebesar 20,73%, Tahun Anggaran 2022 sebesar 26,26% dan Tahun Anggaran 2023 sebesar 24,22%. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel dan penjelasan terinci sebagai berikut:

Tabel III.6
Perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d. 2023
(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2018	982.172	903.407
2	2019	1.217.603	1.108.175
3	2020	559.891	500.329



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
4	2021	745.222	679.492
5	2022	1.186.441	1.109.714
6	2023	1.171.879	891.490

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.171.879.218.740,00, dibandingkan dengan target belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.186.441.773.748,00, terdapat penurunan target belanja modal sebesar Rp14.562.555.008,00 atau 1,24%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 891.490.372.209,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.109.714.993.117,00, terdapat penurunan realisasi belanja modal sebesar Rp218.224.620.908,00 atau 24,48%.

Perkembangan realisasi belanja modal dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut: tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan Rp204.768.232.108,67 atau 22,67%, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85%, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp179.162.892.930,58 atau 35,81%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.109.714.993.117,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp679.492.555.913,42, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp430.222.437.203,58 atau 63,32%.

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Secara umum faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Adanya perbaikan tata kelola pendapatan asli daerah dengan melakukan perombakan administrasi perpajakan dan retribusi daerah;
- b. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Meningkatnya sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- d. meningkatnya koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan daerah khususnya pada kinerja pemungutan dan data hasil pemungutan;
- e. Adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama menyangkut dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- f. Adanya Sosialisasi, mendorong dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan di wilayah Kabupaten Bengkalis.
- g. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- h. Memperkuat kerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan program-program kerja sama dengan swasta seperti, pengelolaan aset daerah oleh pihak swasta, dan sebagainya.
- i. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi ke daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur yang memadai, memberikan insentif investasi yang menarik, serta menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi investor.
- j. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, dengan memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan efektivitas penggunaan aset daerah.
- k. Memperkuat sinergi antar daerah: dengan mengembangkan program-program kerja sama antar daerah seperti pengembangan wisata bersama, pengembangan kawasan industri bersama, dan sebagainya.
- l. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pendapatan selain dari pendapatan asli daerah.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2023 antara lain:

- a. Sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat;
- b. Menurunnya secara drastis harga minyak di pasaran internasional, dan kecenderungan menurunnya produksi minyak, kondisi yang demikian diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- d. Peremajaan data dan validasi data objek pajak dan objek retribusi belum memadai;
- e. Pengawasan dan evaluasi dari pejabat terkait terhadap pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal; dan
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi kurang maksimal oleh setiap SKPD penerima pajak atau retribusi;
- g. Pertambahan wajib pajak dan wajib retribusi baru untuk sebagian jenis pajak/retribusi tidak signifikan terutama wajib pajak reklame dan wajib pajak PBB;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- h. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami penambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- i. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari SKPD penerima pajak dan retribusi untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah;
- j. Birokrasi yang berbelit dan proses yang lama membuat wajib pajak dan wajib retribusi mengurungkan niatnya untuk membayar pajak dan retribusi;
- k. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengonsolidasi Laporan Keuangan setiap entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh Pengawas internal yakni Inspektorat Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat nomor: 700.1.2.8/52/ITDA tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Jumlah entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk 47 SKPD menyampaikan laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan ke Bupati Bengkalis (entitas pelaporan) melalui Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkalis. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus Lampiran I yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada standar tersebut. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengakomodir Basis Akrual



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada entitas pelaporan yakni Bupati Bengkalis, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh setiap entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD) dalam satu set Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dalam satu Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan, serta **Basis Akrual untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan ekuitas.** Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dan informasi lain, namun bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Nama SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berupaya untuk menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berupaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 29 kebijakan. Berikut ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan/penyajian dan pengungkapan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan pada Entitas Pelaporan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. LP-SAL memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi Jangka Pendek;
- 3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi Jangka Panjang;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban Jangka Pendek;
- 8) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 9) Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam Neraca mengungkapkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktifitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- 2) Beban dari Kegiatan Operasional;
- 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- 4) Pos Luar Biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/Defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding ditingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Pernyataan kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan pemerintahan daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan Realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam beberapa format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 TENTANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
- b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- c. Rincian yang diperlukan; dan
- d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 TENTANG LAPORAN NERACA

Tujuan pelaporan Neraca adalah memberikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Basis yang digunakan untuk Laporan Neraca adalah Basis Akrua.

Basis Akrua untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca. Selain itu entitas pelaporan juga mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara Aset Lancar dan Non Lancar dalam neraca untuk Memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok Aset Tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain Piutang Pajak, Retribusi, Denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan Piutang Lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan Laporan Neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- (a) Piutang dirinci menurut jumlah Piutang Pajak, Retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
- (b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- (c) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- (d) Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- (e) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (f) Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan Laporan Neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 TENTANG LAPORAN ARUS KAS

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pencatatan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pendanaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan Kas dan Setara Kas;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Jumlah Kas dan Setara Kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah Aset dan Utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan Utang selain Kas dan Setara Kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

Untuk transaksi bukan kas, transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran Kas dan Setara Kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan Tujuan Laporan Arus Kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo Kas dan Setara Kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 TENTANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah Memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan 16 mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (c) Rincian yang diperlukan; dan
- (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; dan
- d. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- a. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- b. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan-LRA untuk PPKD dan Pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah lain atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG PENDAPATAN-LO

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut atau terdapat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai Pendapatan Operasional, apabila perolehan Hibah Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

3) Pendapatan Pajak Tipe C

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

4) Pendapatan Retribusi Tipe A

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan.

5) Pendapatan Retribusi Tipe B

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG AKUNTANSI BEBAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas, antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari:

- a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat timbulnya kewajiban. Meskipun demikian Beban Bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

- b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk meyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sosial. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah timbul setelah Pemda secara formal mengakuinya.

e. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti Honorarium Non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Beban Pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, Beban Pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban Perjalanan Dinas. Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Beban Barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pmutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Metode periodik tidak langsung memperbaharui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

c. **Hibah dan Bantuan Sosial**

Beban Hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Beban dan Pendekatan Aset.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 TENTANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14 TENTANG KAS DAN SETARA KAS

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, missal Bendahara Pengeluaran.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 TENTANG PIUTANG

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang pemerintah daerah karena pungutan adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang termasuk dalam piutang yang timbul karena peristiwa pungutan adalah:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas Pendapatan Pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Sarang burung walet;
- 10) PBB pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya.

Piutang yang berasal dari pungutan diakui pada saat munculnya klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Secara umum, pengakuan piutang yang berasal dari pungutan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

Piutang yang timbul karena peristiwa perikatan terdiri atas:

- a. Piutang karena Pemberian Pinjaman
Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).
- b. Piutang karena Penjualan
Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah antara lain melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran.
- c. Piutang karena Kemitraan
Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dituangkan dalam naskah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

perjanjian kerjasama. Piutang yang timbul diakui sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Piutang karena Pemberian Fasilitas

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat.

Pengakuan piutang karena perikatan dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan yang berasal dari perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang berasal dari perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Transfer Dana Bagi Hasil dari provinsi dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian.

Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar;
- c. Kualitas Diragukan;
- d. Kualitas Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) **Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.**
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak dapat dipilah berdasarkan karakter sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 4.1
Besaran Penyisihan Piutang Setiap Tahun

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di Neraca, informasi mengenai piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut harus menjelaskan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang.

4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 TENTANG BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Beban Dibayar Dimuka yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikati oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (*cut off*).

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari Aset Lancar.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 TENTANG PERSEDIAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya barang pakai habis seperti Alat Tulis Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.
- b. Branga atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan disajikan sebesar:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis berupa FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama);
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan beban persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di SKPD.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan: kebijakan akuntansi yang digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.18 TENTANG INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerja sama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrument ekuitas.

Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka Pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka Pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi Non Permanen Lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerimaan dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek).
- 1) Dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi Non Permanen:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- 2) Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi Non Permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
- 3) Investasi Non Permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*). diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai akun Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.19 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 TENTANG ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria bahwa suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jika Aktiva Tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap Kas atau Setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf diatas dan dengan suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pengadaan Aset Tetap pada tahun berjalan sudah dilakukan penyusutan sejak Aset Tetap tersebut dicatat ke dalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun ke dalam pencatatan akuntansi. Terhadap Aset Tetap tersebut dilakukan proses penyusutan dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan penyusutan dilakukan tiap semester dan tahunan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Buku/Barang Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- c. Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. Tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang/Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Necara; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:

- a. Ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas, nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu Aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi Aset Tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.3.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 TENTANG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standard ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 TENTANG DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan nilai yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening Koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan;
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.3.22 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 TENTANG ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan terjadi.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BSK dicatat sebesar nilai tercatat Aset Tetap yang dikerjasamakan. Pada saat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

bangunan diserahkan dari pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. *Lisensi* dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan Aset Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian Aset Lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.3.23 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 23 TENTANG KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancer utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam regulasi tersendiri. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

a. Utang Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh pembangunan fasilitas atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Utang Bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai.

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang:

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman.
 - 2) Modifikasi persyaratan utang.
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.24 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 24 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.25 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 25 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan **gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.**

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi Laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah Laporan Keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.3.26 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 26 TENTANG AKUNTANSI TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas daerah tidak termasuk perusahaan daerah

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pengakuan dan Pencatatan Penyaluran Pokok DBH/DAU Melalui Fasilitas TDF:

- a. Dalam hal pokok DBH yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) Pada Pendapatan Transfer – **Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO)**;
- b. Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
- c. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD. Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah Pada Aset Lainnya (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer– Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Pengakuan dan Pencatatan Penyaluran Remunerasi DBH/DAU Melalui Fasilitas TDF:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Dalam hal Bank Indonesia (BI) telah memberikan remunerasi atas DBH /DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO);
- b. Dalam hal remunerasi atas DBH /DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, maka Pemda mencatat Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah (neraca), dan mengakui Pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga- Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LRA).

4.3.27 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 26 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:

- a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
- b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan-kan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan);
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
- b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kadaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:

- a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

**4.3.28 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 26 TENTANG PERJANJIAN KONSESI
JASA – PEMBERI KONSESI**

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.

Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Perjanjian di luar ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) disediakan oleh mitra, yang:
 - (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- (a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- (b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- (d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengungkapan merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

4.3.29 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 29 TENTANG PROPERTI INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

- a) Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
- b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (Aset Tetap).



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Berikut adalah contoh properti investasi:

- a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini:

- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai Aset Tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Entitas mengungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. Pelepasan;
 - iv. Penyusutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- v. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri;
dan
 - vi. Perubahan lain.
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- i. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - v. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari:
- i) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- i. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. **Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)** yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
4.544.704.295.766,00	4.021.936.083.669,39	88,50	3.329.414.487.853,30	692.521.595.816,09

Sumber Pendapatan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Asli Daerah	487.664.529.682,00	614.588.429.804,39	126,03	349.634.385.373,15	264.954.044.431,24
Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	3.690.983.482.111,00	3.081.458.066.503,00	83,49	2.701.274.490.590,00	380.183.575.913,00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	235.566.830.973,00	196.266.249.291,00	83,32	151.480.204.993,00	44.786.044.298,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	808.958,15	(808.958,15)
Jumlah	4.544.704.295.766,00	4.021.936.083.669,39	88,50	3.329.414.487.853,30	692.521.595.816,09

Realisasi Pendapatan Kabupaten Bengkalis TA 2023 adalah sebesar Rp4.021.936.083.669,39 atau 88,50% dari nilai anggaran sebesar Rp4.544.704.295.766,00. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.329.414.487.853,30 mengalami kenaikan sebesar Rp692.521.595.816,09 atau 20,80%.

Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
487.664.529.682,00	614.588.429.804,39	126,03	349.634.385.373,15	264.954.044.431,24

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis TA 2023 adalah sebesar Rp614.588.429.804,39 atau 126,03% dari nilai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp349.634.385.373,15 mengalami kenaikan sebesar Rp264.954.044.431,24 atau 75,78%.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Pajak Daerah	105.504.075.000,00	106.094.877.800,42	100,56	94.213.069.616,00	11.881.808.184,42
Pendapatan Retribusi Daerah	22.681.190.000,00	14.326.950.569,00	63,17	11.711.114.828,00	2.615.835.741,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.861.797.346,00	316.861.797.346,00	1.179,60	27.311.794.580,00	289.550.002.766,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	332.617.467.336,00	177.304.804.088,97	53,31	216.398.406.349,15	(39.093.602.260,18)
Jumlah	487.664.529.682,00	614.588.429.804,39	126,03	349.634.385.373,15	264.954.044.431,24

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
105.504.075.000,00	106.094.877.800,42	100,56	94.213.069.616,00	11.881.808.184,42



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Reklame, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 dan Pajak Air bawah tanah menggunakan metode *Official Assesment* sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB menggunakan metode *Self Assesment* sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	c=b/a	d	e=b-d
Pajak Hotel	3.839.075.000,00	4.129.578.252,00	107,57	3.622.970.810,00	506.607.442,00
Pajak Restoran	15.615.000.000,00	16.746.168.222,00	107,24	15.094.975.589,00	1.651.192.633,00
Pajak Hiburan	1.700.000.000,00	1.651.045.976,00	97,12	1.631.703.647,00	19.342.329,00
Pajak Reklame	1.600.000.000,00	1.478.483.165,00	92,41	1.302.150.406,00	176.332.759,00
Pajak Penerangan Jalan	35.500.000.000,00	35.014.021.551,42	98,63	32.856.985.614,00	2.157.035.937,42
Pajak Parkir	700.000.000,00	326.816.873,00	46,69	386.354.005,00	(59.537.132,00)
Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.370.853.566,00	97,92	1.304.374.066,00	66.479.500,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000.000,00	541.073.728,00	54,11	567.110.748,00	(26.037.020,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.350.000.000,00	6.920.935.550,00	94,16	6.924.910.650,00	(3.975.100,00)
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	27.300.000.000,00	27.864.616.194,00	102,07	24.356.482.448,00	3.508.133.746,00
Pajak BPHTB	9.500.000.000,00	10.051.284.723,00	105,80	6.165.051.633,00	3.886.233.090,00
Jumlah	105.504.075.000,00	106.094.877.800,42	100,56	94.213.069.616,00	11.881.808.184,42

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan Penerimaan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp106.094.877.800,42 atau 100,56% dari anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp94.213.069.616,00 Penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp11.881.808.184,42 atau 12,61%. Pendapatan Pajak Daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
22.681.190.000,00	14.326.950.569,00	63,17	11.711.114.828,00	2.615.835.741,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2023 dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi serta diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan Retribusi sampai dengan TA 2023 sebesar Rp14.326.950.569,00 atau 63,17% dari anggaran sebesar Rp22.681.190.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp11.711.114.828,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.615.835.741,00 atau 22,34% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Jasa Umum	7.480.000.000,00	5.129.670.000,00	68,58	4.607.397.500,00	522.272.500,00
Jasa Usaha	12.481.190.000,00	7.780.327.727,00	62,34	5.341.267.347,00	2.439.060.380,00
Pertizinan Tertentu	2.720.000.000,00	1.416.952.842,00	52,09	1.762.449.981,00	(345.497.139,00)
Jumlah	22.681.190.000,00	14.326.950.569,00	63,17	11.711.114.828,00	2.615.835.741,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.750.000.000,00	1.311.240.000,00	74,93	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.157.650.000,00	74,69	687.400.000,00	470.250.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	490.000.000,00	333.044.000,00	67,97	358.835.000,00	(25.791.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.850.000.000,00	1.498.731.000,00	52,59	1.419.738.500,00	78.992.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	34.471.000,00	57,45	44.276.000,00	(9.805.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	180.000.000,00	192.272.000,00	106,82	180.883.000,00	11.389.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	602.262.000,00	100,38	598.740.000,00	3.522.000,00
Jumlah	7.480.000.000,00	5.129.670.000,00	68,58	4.607.397.500,00	522.272.500,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum selama TA 2023 sebesar Rp7.480.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.129.670.000,00 atau 68,58%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.194.320.000,00	555.135.000,00	46,48	423.950.000,00	131.185.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	380.000.000,00	260.720.000,00	68,61	177.370.000,00	83.350.000,00
Retribusi Terminal	60.000.000,00	5.929.000,00	9,88	8.021.000,00	(2.092.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	420.000.000,00	276.395.000,00	65,81	239.185.000,00	37.210.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	26.870.000,00	13.420.000,00	49,94	11.080.000,00	2.340.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000,00	6.469.863.727,00	64,70	4.212.463.347,00	2.257.400.380,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	198.865.000,00	79,55	171.274.000,00	27.591.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00	97.924.000,00	(97.924.000,00)
Jumlah	12.481.190.000,00	7.780.327.727,00	62,34	5.341.267.347,00	2.439.060.380,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp12.481.190.000,00 terealisasi sebesar Rp7.780.327.727,00 atau 62,34%.

Retribusi tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

2.1. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Hal ini dikarenakan :

- Ada beberapa aset yang tak layak/ rusak dan kurangnya daya tarik masyarakat
- Kurangnya permintaan masyarakat terhadap sewa mobil pemadam kebakaran seperti pada acara mandi taman pengantin, dan juga karena tingginya satuan tarif yang dikarenakan atas sewa pemakaian alat (sewa mobil pemadam kebakaran) untuk masyarakat umum.

2.2 Tidak tercapainya Retribusi Terminal dikarenakan :

Retribusi yang terdapat di terminal diperoleh dari angkot/oplek yang keluar/masuk terminal, namun dikarenakan kurang strategis potensi/letak terminal dengan pusat kegiatan ekonomi sehingga membuat para supir enggan/tidak mau masuk ke dalam terminal yang menyebabkan turunnya retribusi yang masuk ke dalam PAD.

2.3. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan :

Keadaan tempat khusus parkir yang ada di Kecamatan Mandau (kota Duri) tidak kondusif dikarenakan akses jalan masuk yang sulit. Serta kondisi gedung yang kurang memungkinkan untuk dijadikan tempat parkir. Menyebabkan pengendara kendaraan bermotor lebih memilih memarkirkan kendaraannya ditepi jalan, dibandingkan parkir di tempat khusus parkir.

2.4. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan dikarenakan :

Adanya beberapa faktor antara lain: adanya pemasukan daging dari luar pulau Bengkulu, tersedianya outlet penjualan daging beku di pulau Bengkulu, adanya perubahan pola konsumen dari mengkonsumsi daging segar ke daging olahan dan adanya peralihan konsumen menjadi vegetarian.

2.5. Tidak tercapainya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikarenakan :

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa bibit atau benih pada tahun 2023 belum ada realisasi dikarenakan sarana dan prasarana produksi padi belum mendukung.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	200.000.000,00	180.680.000,00	90,34	301.822.600,00	(121.142.600,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	1.236.272.842,00	49,45	0,00	1.236.272.842,00
Retribusi Pembenan Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.460.627.381,00	(1.460.627.381,00)
Jumlah	2.720.000.000,00	1.416.952.842,00	52,09	1.762.449.981,00	(345.497.139,00)

Anggaran Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp2.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.416.952.842,00 atau 52,09%.

Retribusi tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

3.1. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum

Karena sepanjang tahun anggaran 2023 belum ada perusahaan angkutan umum yang mengajukan pengurusan perizinan trayek melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terlebih lagi perusahaan angkutan umum Kabupaten Bengkulu lebih banyak melayani izin trayek antar kota dalam provinsi yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3.2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dikarenakan minimnya badan usaha/perusahaan yang mendirikan tempat usaha atau fasilitas pendukungnya sehingga izin persetujuan bangunan gedung sangat jarang diterbitkan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Retribusi per SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.749.320.000,00	1.598.357.842,00	58,14	1.726.267.381,00	(127.909.539,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	35.821.000,00	55,11	44.876.000,00	(9.055.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.750.000.000,00	1.311.240.000,00	74,93	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Dinas Perhubungan	14.540.000.000,00	9.132.173.727,00	62,81	6.327.622.847,00	2.804.550.880,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	600.000.000,00	602.262.000,00	100,38	598.740.000,00	3.522.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00	198.865.000,00	79,55	171.274.000,00	27.591.000,00
Dinas Perikanan	200.000.000,00	180.680.000,00	90,34	399.746.600,00	(219.066.600,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	116.870.000,00	13.420.000,00	11,48	11.080.000,00	2.340.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.050.000.000,00	786.036.000,00	74,86	717.088.000,00	68.948.000,00
Sekretariat Daerah	1.320.000.000,00	417.200.000,00	31,61	368.385.000,00	48.815.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	50.895.000,00	127,24	28.510.000,00	22.385.000,00
Jumlah	22.681.190.000,00	14.326.950.569,00	63,17	11.711.114.828,00	2.615.835.741,00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.9 Rincian Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	249.320.000,00	362.085.000,00	145,23	265.640.000,00	96.445.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	1.236.272.842,00	49,45	0,00	1.236.272.842,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.460.627.381,00	(1.460.627.381,00)
Jumlah	2.749.320.000,00	1.598.357.842,00	58,14	1.726.267.381,00	(127.909.539,00)

Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.10 Rincian Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	34.471.000,00	57,45	44.276.000,00	(9.805.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	1.350.000,00	27,00	600.000,00	750.000,00
Jumlah	65.000.000,00	35.821.000,00	55,11	44.876.000,00	(9.055.000,00)

Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.11 Rincian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.750.000.000,00	1.311.240.000,00	74,93	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Jumlah	1.750.000.000,00	1.311.240.000,00	74,93	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perhubungan

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.157.650.000,00	74,69	687.400.000,00	470.250.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.850.000.000,00	1.498.731.000,00	52,59	1.419.738.500,00	78.992.500,00
Retribusi Terminal	60.000.000,00	5.929.000,00	9,88	8.021.000,00	(2.092.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	6.469.863.727,00	64,70	4.212.463.347,00	2.257.400.380,00
Retribusi Izin Trayek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.540.000.000,00	9.132.173.727,00	62,81	6.327.622.847,00	2.804.550.880,00

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	602.262.000,00	100,38	598.740.000,00	3.522.000,00
Jumlah	600.000.000,00	602.262.000,00	100,38	598.740.000,00	3.522.000,00

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	198.865.000,00	79,55	171.274.000,00	27.591.000,00
Jumlah	250.000.000,00	198.865.000,00	79,55	171.274.000,00	27.591.000,00

Dinas Perikanan

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	97.924.000,00	(97.924.000,00)
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	200.000.000,00	180.680.000,00	90,34	301.822.600,00	(121.142.600,00)
Jumlah	200.000.000,00	180.680.000,00	90,34	399.746.600,00	(219.066.600,00)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	26.870.000,00	13.420.000,00	49,94	11.080.000,00	2.340.000,00
Jumlah	116.870.000,00	13.420.000,00	11,48	11.080.000,00	2.340.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Pasar	490.000.000,00	333.044.000,00	67,97	358.835.000,00	(25.791.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	180.000.000,00	192.272.000,00	106,82	180.883.000,00	11.389.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	380.000.000,00	260.720.000,00	68,61	177.370.000,00	83.350.000,00
Jumlah	1.050.000.000,00	786.036.000,00	74,86	717.088.000,00	68.948.000,00

Sekretariat Daerah

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	920.000.000,00	152.450.000,00	16,57	138.210.000,00	14.240.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	400.000.000,00	264.750.000,00	66,19	230.175.000,00	34.575.000,00
Jumlah	1.320.000.000,00	417.200.000,00	31,61	368.385.000,00	48.815.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	39.250.000,00	196,25	19.500.000,00	19.750.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	20.000.000,00	11.645.000,00	58,23	9.010.000,00	2.635.000,00
Jumlah	40.000.000,00	50.895.000,00	127,24	28.510.000,00	22.385.000,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
26.861.797.346,00	316.861.797.346,00	1.179,60	27.311.794.580,00	289.550.002.766,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp316.861.797.346,00 dari anggaran sebesar Rp26.861.797.346,00 atau 1.179,60% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sd TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20 Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
PT Bank Riau	26.861.797.346,00	26.861.797.346,00	100,00	27.311.794.580,00	(449.997.234,00)
PT. Bumi Laksamana Jaya	0,00	290.000.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000.000,00
Jumlah	26.861.797.346,00	316.861.797.346,00	1.179,60	27.311.794.580,00	289.550.002.766,00

Penerimaan pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama TA 2023 adalah sebesar Rp316.861.797.346,00 atau 1.179,60% dari anggaran sebesar Rp26.861.797.346,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp27.311.794.580,00 menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebesar Rp289.550.002.766,00 atau 1.060,16%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola oleh BPKAD Kabupaten Bengkulu.

Pendapatan dividen sebesar Rp26.861.797.346,00 Rapat RUPS Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Bank Riau Kepri Nomor:033/TS.05/OPS/DIR/2023 tanggal 07 Juni 2023 hal pembagian Dividen PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2022 serta pengembalian sisa dividen saham yang tidak mencukupi nilai per lembar saham PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT. Bumi Laksamana Jaya Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu memperoleh *Participating Interest* 10% sebesar Rp290.000.000.000,00.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT. BUMI LAKSMANA JAYA dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tanggal 27 Desember 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS luar biasa PT. BUMI LAKSMANA JAYA No. 06 Tanggal 28 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
332.617.467.336,00	177.304.804.088,97	53,31	216.398.406.349,150	(39.093.602.260,18)

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	955.544.021,00	(955.544.021,00)
Jasa Giro Kas Daerah	41.507.033.929,00	2.357.994.260,00	5,68	16.842.971.640,000	(14.484.977.360,00)
Jasa Giro Pemegang Kas	16.000.000.000,00	241.430.959,00	1,51	483.922.532,000	(242.491.573,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	25.000.000.000,00	6.019.095.062,00	24,08	0,00	6.019.095.062,00
Pendapatan Denda Pajak	342.340.000,00	411.375.719,00	120,17	328.161.551,00	83.214.168,00
Hasil Eksekusi Jaminan	20.000.000.000,00	505.671.927,02	2,53	24.944.402.619,00	(24.438.730.691,98)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.300.000.000,00	126.957.530,00	0,83	69.156.368,00	57.801.162,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	45.500.000.000,00	8.101.665.148,09	17,81	6.162.683.332,15	1.938.981.815,94
Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	1.707.804.667,00	0,00	310.396.893,00	1.397.407.774,00
Pendapatan BLUD	168.768.022.407,00	157.832.808.816,86	93,52	166.301.167.393,000	(8.468.358.576,14)
Jumlah	332.617.467.336,00	177.304.804.088,97	53,31	216.398.406.349,15	(39.093.602.260,18)

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp177.304.804.088,97 atau 53,31% dari nilai anggaran sebesar Rp332.617.467.336,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp216.398.406.349,15 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp39.093.602.260,18 atau 18,07%. Pendapatan lain-lain PAD ini dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut.

a) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.22 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.900.000,00	2.052.382,00	23,06	4.864.045,000	(2.811.663,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran	41.000.000,00	19.183.521,00	46,79	69.751.533,000	(50.568.012,00)
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.640.000,00	449.534,00	9,69	6.967.282,000	(6.517.748,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000,00	18.443.143,00	184,43	25.902.650,000	(7.459.507,00)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	18.700.000,00	1.051.131,00	5,62	161.779,000	889.352,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.000.000,00	3.220.528,00	107,35	540.640,00	2.679.888,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.200.000,00	4.168.991,00	67,24	12.911.805,00	(8.742.814,00)
Pendapatan Denda Pajak Walet	3.800.000,00	13.912.358,00	366,11	15.998.588,000	(2.086.230,00)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Denda PBB P2	234.000.000,00	348.894.131,00	149,10	191.063.229,000	157.830.902,00
Pendapatan Denda BPHTP	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	342.340.000,00	411.375.719,00	120,17	328.161.551,00	83.214.168,00

Penjelasan Realisasi Pendapatan Denda tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

a).1. Pendapatan Denda Pajak Restoran

Bahwa Pajak Restoran terdiri dari berbagai jenis sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang jenisnya terdiri dari : restoran sejenisnya, RM, Kafetaria, Kantin, warung, bar dan jasa boga. Untuk jasa boga tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayarannya karena wajib pajak bersifat insidental berupa catering namun telah ditetapkan menjadi wajib pajak terlebih dahulu. Penerimaan pajak terbesar dan jumlah wajib pajak yang banyak dari pajak restoran adalah dari jenis jasa boga. Untuk jenis pajak lain dalam pajak restoran wajib pajak membayar rata-rata sebelum jatuh tempo dan wajib pajak nya bersifat permanen serta mudah untuk ditemui dan didukung dengan giat penagihan pajak dilapangan yang membuat wajib pajak segera membayar pajak sebelum jatuh tempo sehingga denda pajak restoran sudah dibawah 50%.

a).2. Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Wajib pajak hiburan se-Kabupaten Bengkulu berjumlah 42, pajak hiburan bersifat permanen dan tidak sulit untuk ditemui objek pajaknya. Jika tidak dapat menemui pemilik/wajib pajak maka dapat mengkonfirmasi melalui pengelolanya. Wajib pajak hiburan sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan dalam pembayaran pajak, hanya beberapa wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajaknya sehingga denda sektor pajak hiburan tidak sampai 50%.

a).3. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

Terbagi dalam 2 jenis : -. Dari sumber lain dan - yang dihasilkan sendiri. Untuk pajak sumber lain berasal dari PLN membayar sudah tepat waktu sebelum jatuh tempo setiap bulannya sehingga tidak ada keterlambatan dalam pembayaran dan otomatis tidak dikenakan denda.

Untuk PPJ dihasilkan sendiri, wajib pajak terdiri dari 19 perusahaan yang tidak sulit dalam melakukan pembayaran pajak, hanya beberapa wajib pajak yang masih terlambat dalam pembayaran sehingga denda pajak PPJ telah berada dibawah 50%.

a).4. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

Wajib pajak minerba rata-rata tidak bersifat permanen hanya beberapa saja yang bersifat permanen. Pembayaran pajak dilakukan ketika ada pengerjaan yang mengambil mineral bukan logam batuan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2018, yang bersifat komersil. Pajak bersifat *self assesment*, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pembayarannya, jika tidak ada aktifitas pengerjaan maka pajak tidak dibayar.

a).5. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

Bisa dikatakan tidak ada, karena kepengurusan BPHTB bersifat insidental, masyarakat/wajib pajak sudah memahami dan sadar akan kewajiban perpajakan khusus utk BPHTB ini, ketika sudah dilakukan validasi/perhitungan pajaknya wajib pajak segera melakukan pembayaran, karena ada timbal balik kepada masyarakat/wajib pajak merupakan salah satu syarat dalam kepengurusan sertifikat sesuai *host to host* antara Bapenda dengan BPN.

b) Dinas Kesehatan

Tabel 5.23 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
a	30.350.022.407,00	27.917.105.561,00	91,98	16.992.771.928,00	10.924.333.633,00
Jumlah	30.350.022.407,00	27.917.105.561,00	91,98	16.992.771.928,00	10.924.333.633,00

c) RSUD Bengkulu

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkulu

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	58.418.000.000,00	56.508.713.106,00	96,73	72.031.428.172,00	(15.522.715.066,00)
Jumlah	58.418.000.000,00	56.508.713.106,00	96,73	72.031.428.172,00	(15.522.715.066,00)

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkulu TA 2023 sebesar Rp56.508.713.106,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp58.418.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	56.115.141.375,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	344.587.542,00
* Pendapatan Hibah	Rp	0,00
* Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	48.984.189,00 +
Jumlah	Rp	56.508.713.106,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau

Urutan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	80.000.000.000,00	73.406.990.149,86	91,76	77.276.967.293,00	(3.869.977.143,14)
Jumlah	80.000.000.000,00	73.406.990.149,86	91,76	77.276.967.293,00	(3.869.977.143,14)

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau TA 2023 sebesar Rp73.406.990.149,86 atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp80.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 72.966.780.993,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp 267.951.374,00
* Pendapatan Hibah	Rp 0,00
* Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 172.257.782,86 +
Jumlah	Rp 73.406.990.149,86

e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.26 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urutan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	955.544.021,00	(955.544.021,00)
Jasa Giro Kas Daerah	41.507.033.929,00	2.357.994.260,00	5,68	16.842.971.640,00	(14.484.977.380,00)
Jasa Giro Pemegang Kas	16.000.000.000,00	241.430.959,00	1,51	483.922.532,00	(242.491.573,00)
Pendapatan Bunga	25.000.000.000,00	6.019.095.062,00	24,08	0,00	6.019.095.062,00
Hasil Eksekusi Jaminan	20.000.000.000,00	505.671.927,02	2,53	24.944.402.619,00	(24.438.730.691,98)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15.300.000.000,00	126.957.530,00	0,83	69.156.368,00	57.801.162,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	45.500.000.000,00	8.101.665.148,09	17,81	6.162.683.332,15	1.938.981.815,94
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	1.707.804.667,00	0,00	310.396.893,00	1.397.407.774,00
Jumlah	163.507.104.929,00	19.060.619.553,11	11,66	49.769.077.405,15	(30.708.457.852,04)

B. Pendapatan Transfer

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
4.057.039.766.084,00	3.407.347.653.865,00	83,99	2.979.779.293.522,00	427.568.360.343,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp3.407.347.653.865,00 atau 83,99% dari anggaran sebesar Rp4.057.039.766.084,00, sementara realisasi pendapatan transfer TA. 2022 sebesar Rp2.979.779.293.522,00 .

Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta transfer pemerintah provinsi.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer selama TA 2023 dan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27 Pendapatan Transfer

Urutan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.690.983.482.111,00	3.081.458.066.503,00	83,49	2.701.274.490.590,00	380.183.575.913,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Transfer Antar Daerah	235.566.830.973,00	196.266.249.291,00	83,32	151.480.204.993,00	44.786.044.298,00
Jumlah	4.057.039.766.084,00	3.407.347.653.865,00	83,99	2.979.779.293.522,00	427.568.360.343,00

Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana transfer umum dan dana desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp3.215.306.488.055,00. Dari jumlah tersebut terdapat pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan DAU sebesar Rp4.225.083.481,00 yang disebabkan adanya kelebihan penyaluran TKD pada tahun-tahun sebelumnya, serta Dana Bos Reguler untuk sekolah swasta yang penyalurannya langsung ke rekening sekolah sebesar Rp98.866.678.447,00.

Jadi selama TA 2023 realisasi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Lainnya) ke Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp3.112.214.726.127,00. Sedang Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp196.266.249.291,- dari anggaran sebesar Rp235.566.830.973,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer selama tahun 2022 sebesar Rp2.979.779.293.522,00 terdapat kenaikan sejumlah Rp427.568.360.343,00 atau 14,35%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PENYALURAN DARI PUSAT	POTONGAN	REALISASI	KETERANGAN
Dana Transfer Umum-				
Dana Bagi Hasil (DBH)	2.410.096.284.255,00	0,00	2.410.096.284.255,00	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.546.381.926.495,00	0,00	1.546.381.926.495,00	
DBH PPh Pasal 21	41.364.992.188,00	0,00	41.364.992.188,00	
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	1.122.914.652,00	0,00	1.122.914.652,00	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	53.705,00	0,00	53.705,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	765.047.232.235,00	0,00	765.047.232.235,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	8.469.717.711,00	0,00	8.469.717.711,00	
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	5.914.447.338,00	0,00	5.914.447.338,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.182.770.720,00	0,00	16.182.770.720,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.451.825.211,00	0,00	3.451.825.211,00	
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	22.160.404.000,00	0,00	22.160.404.000,00	
Dana Alokasi Umum	354.443.414.000,00	33.058.163,00	354.410.355.837,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.083.395.782,00	0,00	67.083.395.782,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	704.743.220,00	0,00	704.743.220,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.139.078.822,00	0,00	1.139.078.822,00	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.006.873.399,00	0,00	4.006.873.399,00	
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Keluarga Berencana	183.950.000,00	0,00	183.950.000,00	
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	61.048.750.341,00	0,00	61.048.750.341,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	254.060.055.947,00	4.192.025.318,00	249.868.030.629,00	
DAK Non Fisik-BOS Reguler	96.326.678.447,00	0,00	96.326.678.447,00	BOS Reguler Swasta yang tidak di catat sebagai pendapatan Pemda



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Non Fisik-BOS	2.540.000.000,00	0,00	2.540.000.000,00
Kinerja			
DAK Non Fisik-TPG	112.545.702.000,00	0,00	112.545.702.000,00
PNSD			
DAK Non Fisik-Tamsil	2.549.750.000,00	0,00	2.549.750.000,00
Guru PNSD			
DAK Non Fisik-BOP	7.222.656.000,00	0,00	7.222.656.000,00
PAUD			
DAK Non Fisik-BOP	1.192.000.000,00	0,00	1.192.000.000,00
Pendidikan Kesetaraan			
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.897.834.000,00	1.682.792.964,00	5.215.041.036,00
			Pemotongan langsung dari Pusat
BOKKB - Akreditasi Puskesmas (BOK Puskesmas)	16.105.873.500,00	0,00	16.105.873.500,00
DAK Non Fisik BOKKB - BOKB	5.811.692.000,00	2.105.885.896,00	3.705.806.104,00
DAK Non Fisik-PKZUKM	369.370.000,00	43.178.700,00	326.191.300,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000,00	109.366.158,00	308.033.842,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan	375.000.000,00	124.071.600,00	250.928.400,00
Pertindungan Perempuan dan Anak			
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan	1.706.100.000,00	126.730.000,00	1.579.370.000,00
Dan Pertanian			
Jumlah Pendapatan			
Transfer Dana	3.085.683.149.984,00	4.225.083.481,00	3.081.458.066.503,00
Perimbangan			
Dana Desa	129.623.338.071,00	0,00	129.623.338.071,00
Dana Desa	129.623.338.071,00	0,00	129.623.338.071,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	3.215.306.488.055,00	4.225.083.481,00	3.211.081.404.574,00

URAIAN	Transfer Antar Daerah	POTONGAN	REALISASI	KETERANGAN
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	186.100.249.291,00	0,00	186.100.249.291,00	
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	10.166.000.000,00	0,00	10.166.000.000,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	196.266.249.291,00	0,00	196.266.249.291,00	

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.690.983.482.111,00	3.081.458.066.503,00	83,49	2.701.274.490.590,00	380.183.575.913,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp3.081.458.066.503,00 atau 83,49% dari anggaran sebesar Rp3.690.983.482.111,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2022 sebesar Rp2.701.274.490.590,00 terdapat kenaikan sejumlah Rp380.183.575.913,00 atau 14,07%, dengan rincian sebagai berikut:

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2023 dan TA. 2022 :

Tabel 5.28 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dana Bagi Hasil Pajak	2.144.941.685.111,00	1.588.869.887.040,00	74,08	1.577.609.899.644,00	11.259.987.396,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	867.364.813.000,00	821.226.397.215,00	94,68	499.596.568.395,00	321.629.828.820,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	354.443.414.000,00	354.410.355.837,00	99,99	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	324.233.570.000,00	316.951.426.411,00	97,75	288.340.394.551,00	28.611.031.860,00
Jumlah	3.690.983.482.111,00	3.081.458.066.503,00	83,49	2.701.274.490.590,00	380.183.575.913,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a) Dana Bagi Hasil

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.144.941.685.111,00	1.588.869.887.040,00	74,08	1.577.609.899.644,00	11.259.987.396,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak selama TA.2023 sebesar Rp1.588.869.887.040,00 atau 74,08% dari anggaran sebesar Rp2.144.941.685.111,00 dan jika dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.577.609.899.644,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.259.987.396,00 atau 0,71%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata, serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya serta DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil dari PBB	2.108.702.888.111,00	1.546.381.926.495,00	73,33	1.527.091.597.644,00	19.290.328.851,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	35.215.559.000,00	41.364.992.188,00	117,46	49.712.508.000,00	(8.347.515.812,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	1.023.238.000,00	1.122.914.652,00	109,74	805.794.000,00	317.120.652,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	53.705,00	#DIV/0!	0,00	53.705,00
Lainnya	2.144.941.685.111,00	1.588.869.887.040,00	74,08	1.577.609.899.644,00	11.259.987.396,00

Tabel 5.30 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2023	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d= b+c
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	41.364.992.188,00	0,00	41.364.992.188,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2023	7.043.111.800,00	0,00	7.043.111.800,00
DBH PPh Pasal 21 -DBH PPh Pasal 21 Non Tunai TW 4 2022	6.149.433.188,00	0,00	6.149.433.188,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2023	7.043.111.800,00	0,00	7.043.111.800,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2023	7.043.111.800,00	0,00	7.043.111.800,00
DBH PPh, Triwulan ke 4 TA 2023	14.086.223.600,00	0,00	14.086.223.600,00
Bagi Hasil DBH Pajak Pasal 25/29	1.122.914.652,00	0,00	1.122.914.652,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2023	204.647.600,00	0,00	204.647.600,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2023	204.647.600,00	0,00	204.647.600,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2023	204.647.600,00	0,00	204.647.600,00
DBH PPh, Triwulan ke 4 TA 2023	409.295.200,00	0,00	409.295.200,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN - DBH PPh Pasal 26/29 Non Tunai TW 4 2022	99.676.652,00	0,00	99.676.652,00
Bagi Hasil dari PBB	1.546.381.926.495,00	0,00	1.546.381.926.495,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA 2023	263.056.208.800,00	0,00	263.056.208.800,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH PBB Migas (**bukan pendapatan transfer: TDF, 3 2023	133.610.995.160,00	0,00	133.610.995.160,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA 2023	328.820.261.000,00	0,00	328.820.261.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Migas TA. 2022 (Reguler) (TDF)	45.754.110.582,00	0,00	45.754.110.582,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Migas 2021 (TDF)	14.282.527.003,00	0,00	14.282.527.003,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Migas Biaya Pungut TA. 2022 (Reguler) (TDF)	5.979.138.603,00	0,00	5.979.138.603,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Migas 2021 (TDF)	1.054.518.243,00	0,00	1.054.518.243,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 3 TA 2023	460.348.365.400,00	0,00	460.348.365.400,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA 2023	263.056.208.800,00	0,00	263.056.208.800,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Bagi Rata Tahap 3 2022 (Reguler) (TDF)	344.421.402,00	0,00	344.421.402,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Bagi Rata Tahap 3 2022 (Reguler) (TDF)	472.605.805,00	0,00	472.605.805,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-1 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-2 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-3 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-4 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-5 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah TA 2022 (Reguler) (TDF)	1.449.322.673,00	0,00	1.449.322.673,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Perkebunan 2021 (TDF)	5.758.609.106,00	0,00	5.758.609.106,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Perkebunan Biaya Pungut Non Tunai TA 2022 (Reguler) (TDF)	64.413.392,00	0,00	64.413.392,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Perkebunan 2021 (TDF)	255.937.960,00	0,00	255.937.960,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-6 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-7 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-8 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-9 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-10 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-11 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-12 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-13 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-14 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-15 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-16 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-17 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-18 TA 2023	608.476.050,00	0,00	608.476.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-19 TA 2023	1.216.952.100,00	0,00	1.216.952.100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-1 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-2 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-3 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-4 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-5 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Sektor Lainnya TA 2022 (Reguler) (TDF)	12.356.755,00	0,00	12.356.755,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Sektor Lainnya 2021 (TDF)	60.807.157,00	0,00	60.807.157,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Sektor Lainnya TA 2022 (Reguler) (TDF)	411.920,00	0,00	411.920,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Sektor Lainnya 2021 (TDF)	2.026.072,00	0,00	2.026.072,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-6 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-7 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-8 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-9 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-10 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-11 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-12 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-13 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-14 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-15 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-16 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-17 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-18 TA 2023	3.434.050,00	0,00	3.434.050,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-19 TA 2023	6.868.100,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-1 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-2 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-3 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-4 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-5 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah TA 2022 (Reguler) (TDF)	864.117.161,00	0,00	864.117.161,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Perhutanan 2021 (TDF)	1.692.889.290,00	0,00	1.692.889.290,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB Perhutanan Biaya Pungut Non Tunai TA 2022 (Reguler) (TDF)	33.603.453,00	0,00	33.603.453,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Perhutanan 2021 (TDF)	65.834.372,00	0,00	65.834.372,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-6 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-7 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-8 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-9 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-10 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-11 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-12 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-13 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-14 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-15 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-16 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-17 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-18 TA 2023	350.891.000,00	0,00	350.891.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-19 TA 2024	701.782.000,00	0,00	701.782.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 1 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 2 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 3 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 4 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 5 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Non Migas Lainnya 2021 (TDF))	10.909.728,00	0,00	10.909.728,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (KB DBH PBB Non Migas Lainnya 2021 (TDF))	363.658,00	0,00	363.658,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 6 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 7 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 8 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 9 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 10 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 11 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 12 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 13 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 14 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 15 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 16 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 17 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 18 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	3.747.050,00	0,00	3.747.050,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - DBH, MINGGU 19 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	7.494.100,00	0,00	7.494.100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	53.705,00	0,00	53.705,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - DBH Triwulan I 2023 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001. Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	21.420,00	0,00	21.420,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - CHT TW 4 2022 (*** bukan Pendapatan Transfer : TDF pada 2023 Tahap 1 => 827251 Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF - DBH (001.Pokok TDF) (Reguler)	32.285,00	0,00	32.285,00
Total	1.588.869.887.040,00	0,00	1.588.869.887.040,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak selama TA 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, lampiran V.02 rincian PPh Pasal 21 sebesar Rp35.215.559.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh 25/29 sebesar Rp1.023.238.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, rincian PPh Pasal 21 sebesar Rp42.117.417.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh 25/29 sebesar Rp1.052.017.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Rincian Penyaluran Tambahan PPh Pasal 21 sebesar Rp6.901.858.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh 25/29 sebesar Rp28.779.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, Penetapan Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2022 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp944.532.817,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp944.532.817,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Penetapan Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2022 Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp21.629.780.714,00,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2022 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp944.532.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp944.532.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp0,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Rincian Penyaluran Sisa Kurang Bayar DBH pada TA 2022 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 sebesar Rp817,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada TA 2022 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp944.532.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp944.532.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp0,00.

- Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, lampiran V.03 rincian DBH PBB, Sektor Perkebunan sebesar Rp12.169.521.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp7.017.820.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.315.281.044.000,00, sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebesar Rp74.941.000,- dan Sektor Lainnya sebesar Rp68.682.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Rincian penyaluran tambahan DBH PBB, Sektor Perkebunan sebesar Rp2.146.608.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp1.387.024.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp207.952.590.000,00, Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebesar Rp15.592.000,- dan Sektor Lainnya sebesar Rp13.791.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 rincian DBH PBB, Sektor Perkebunan sebesar Rp14.316.129.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp8.404.844.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.523.233.634.000,00, Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebesar Rp90.533.000,- dan Sektor Lainnya sebesar Rp82.472.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 sebesar Rp215.686.821,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH PBB, Sektor Perhutanan sebesar Rp207.603.343,00, BP Sektor Perhutanan sebesar Rp8.083.478,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 sebesar Rp102.779.889.427,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH PBB, Sektor Bagi Rata sebesar Rp69.373.552,00, Sektor Perkebunan sebesar Rp127.994.716,00, Sektor Lainnya sebesar Rp91.213.407,00, BP Sektor Perkebunan Rp5.680.038,00, BP Sektor Pertambangan Migas sebesar Rp3.308.542.560,00, BP Sektor Lainnya sebesar Rp3.040.708,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp215.686.821,00, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2022, Sektor Perhutanan sebesar Rp207.603.000,00, Sektor BP Sektor Perhutanan 8.083.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp821,00, dengan rincian Penetapan Sisa Kurang Bayar DBH PBB Tahun 2022, Sektor Perhutanan sebesar Rp343,00, dan BP Sektor Perhutanan sebesar Rp478,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp215.686.821,00. Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada TA 2022, sektor Perhutanan sebesar Rp207.603.000,00. Sektor BP Sektor Perhutanan 8.083.000,00 .

- Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp19.155,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH PBB Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp19.155,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 sebesar Rp4.708,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH PBB Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp4.708,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 rincian DBH Cukai Hasil Tembakau TA. 2023 sebesar Rp135.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Rincian Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Tembakau TA. 2023 sebesar Rp9.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp19.000,00. Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau pada TA 2021 sebesar Rp19.000,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp155,00, Rincian Penyaluran sisa Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau pada TA 2021 sebesar Rp155,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp19.000,00, Rincian Penyelesaian Lebih bayar DBH Cukai Hasil Tembakau pada TA 2021 sebesar Rp19.000,00.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
867.364.813.000,00	821.226.397.215,00	94,68	499.596.568.395,00	321.629.828.820

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2023 adalah sebesar Rp821.226.397.215,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp867.364.813.000,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Minerba, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp499.596.568.395,00 mengalami kenaikan sebesar Rp321.629.828.820,00 atau 64,38%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.31 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	846.671.692.000,00	773.516.949.946,00	91,36	478.222.145.000,00	295.294.804.946,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	3.188.055.000,00	5.914.447.338,00	185,52	2.892.430.000,00	3.022.017.338,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	14.264.994.000,00	38.343.174.720,00	268,79	16.523.519.000,00	21.819.655.720,00
Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	163.395,00	(163.395,00)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	3.240.072.000,00	3.451.825.211,00	106,54	1.958.311.000,00	1.493.514.211,00
Jumlah	867.364.813.000,00	821.226.397.215,00	94,68	499.596.568.395,00	321.629.828.820,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.32 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2023	Kurang Bayar	Total
	b	c	d = b+c
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	765.047.232.235,00	0,00	765.047.232.235,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	142.753.757.400,00	0,00	142.753.757.400,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	176.442.196.750,00	0,00	176.442.196.750,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi (DBH SDA Minyak Bumi 15% TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	49.624.261.972,00	0,00	49.624.261.972,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi (DBH SDA Minyak Bumi 0,5% TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	1.654.183.263,00	0,00	1.654.183.263,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	249.819.075.450,00	0,00	249.819.075.450,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	142.753.757.400,00	0,00	142.753.757.400,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	8.469.717.711,00	0,00	8.469.717.711,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2023	580.581.000,00	0,00	580.581.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2023	725.726.250,00	0,00	725.726.250,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi (DBH SDA Gas Bumi 30% TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	424.886.708,00	0,00	424.886.708,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi (DBH SDA Gas Bumi 0,5% TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	7.083.198,00	0,00	7.083.198,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi (KB DBH SDA Gas Bumi 30% 2021 (TDF)	5.050.665.087,00	0,00	5.050.665.087,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi (KB DBH SDA Gas Bumi 0,5% 2021 (TDF)	84.177.718,00	0,00	84.177.718,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 3 TA. 2023	1.016.016.750,00	0,00	1.016.016.750,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 4 TA. 2023	580.581.000,00	0,00	580.581.000,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	5.914.447.338,00	0,00	5.914.447.338,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 1 TA. 2023 Royalti	603.448.600,00	0,00	603.448.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 2 TA. 2023 Royalti	754.310.750,00	0,00	754.310.750,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-3 TA. 2023 Royalti	1.056.035.050,00	0,00	1.056.035.050,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-4 TA. 2023 Royalti	603.448.600,00	0,00	603.448.600,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti (KB DBH SDA Minerba - luran Tetap 2021 (TDF)	162.122.823,00	0,00	162.122.823,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti (DBH SDA Minerba - Royalti TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	907.084.322,00	0,00	907.084.322,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti (DBH SDA Minerba - Royalti TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	312.759.995,00	0,00	312.759.995,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti (KB DBH SDA Minerba - Royalti 2021 (TDF)	1.344.425.198,00	0,00	1.344.425.198,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 1 TA. 2023 luran Tetap	34.162.400,00	0,00	34.162.400,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 2 TA. 2023 luran Tetap	42.703.000,00	0,00	42.703.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-3 TA. 2023 luran Tetap	59.784.200,00	0,00	59.784.200,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-4 TA. 2023 luran Tetap	34.162.400,00	0,00	34.162.400,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	3.451.825.211,00	0,00	3.451.825.211,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke 1 TA. 2023	486.010.800,00	0,00	486.010.800,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke 2 TA. 2023	486.010.800,00	0,00	486.010.800,00
DBH Sumber Daya Alam Perikanan (DBH SDA Perikanan TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	211.753.211,00	0,00	211.753.211,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-3 TA. 2023	1.134.025.200,00	0,00	1.134.025.200,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-4 TA. 2023	1.134.025.200,00	0,00	1.134.025.200,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDH)	38.343.174.720,00	0,00	38.343.174.720,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke 1 TA. 2023	2.139.749.100,00	0,00	2.139.749.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-2 TA 2023	2.139.749.100,00	0,00	2.139.749.100,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (DBH SDA Kehutanan - PSDH TW 4 2022 (Reguler) (TDF)	1.786.696.906,00	0,00	1.786.696.906,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (KB DBH SDA Kehutanan - PSDH 2021 (TDF)	131.079.814,00	0,00	131.079.814,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-3 TA 2023	4.992.747.900,00	0,00	4.992.747.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-4 TA 2023	4.992.747.900,00	0,00	4.992.747.900,00
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH, TAHAP 1 2023 => 612711 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	22.160.404.000,00	0,00	22.160.404.000,00
Total	821.226.397.215,00	0,00	821.226.397.215,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak selama TA 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.05 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp716.671.692.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp713.768.787.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp2.902.905.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp760.012.912.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp757.110.007.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp2.902.905.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Rincian Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2023 sebesar Rp43.341.220.000,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp121.307.592.493,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi s/d TA 2021, Minyak Bumi sebesar Rp119.557.826.591,00. Gas Bumi sebesar Rp1.749.765.902,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp85.220.373.053,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH Minyak Bumi TA 2021 sebesar Rp85.220.373.053,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp121.307.591.000,00, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA 2022 sebesar Rp119.557.826.000 dan Gas Bumi pada TA 2022 sebesar Rp1.749.765.000,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp1.493,00, Rincian Penyaluran Sisa Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA 2022 sebesar Rp591,00 dan Gas Bumi pada TA 2022 sebesar Rp902,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp92.109.034.000,00, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA 2022 sebesar Rp92.109.034.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.06 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp3.188.055.000,00 dengan Rincian Iuran Tetap sebesar Rp170.812.000,00 dan Royalti sebesar Rp3.017.243.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun 2023 sebesar Rp4.270.999.000,00 dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp227.832.000,00 dan Royalti sebesar Rp4.043.167.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Rincian Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun 2023 sebesar Rp1.082.944.000,00 dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp57.020.000,00 dan Royalti sebesar Rp1.025.924.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp3.582.514.610,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batu Bara TA 2022, Iuran Tetap sebesar Rp262.143.071,00. Royalti sebesar Rp3.320.371.539,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp3.582.514.000,00. Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Minerba TA. 2022 sebesar Rp3.582.514.000,00 yakni Iuran Tetap sebesar Rp262.143.000,00 dan Royalti sebesar Rp3.320.371.000,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp610,00. Rincian Penyaluran Sisa Kurang Bayar DBH SDA Minerba TA 2022 sebesar Rp610,00 yakni Iuran Tetap sebesar Rp71,00 dan Royalti sebesar Rp539,00.

- Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.08 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp3.240.072.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp3.240.072.000,00 dengan rincian SDA Perikanan sebesar Rp3.240.072.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp173.472.924,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH SDA Perikanan TA 2021 sebesar Rp173.472.924,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp295.260.621,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH SDA Perikanan TA 2022 sebesar Rp295.260.621,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

- Bagi Hasil SDA Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.07 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2023 sebesar Rp14.264.994.000,00 dengan Rincian IIUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp14.264.994.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan Tahun 2023 sebesar Rp14.264.994.000,00 dengan rincian PSDH sebesar Rp14.264.994.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 Tentang Penetapan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp22.758.110,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2020 sebesar Rp22.758.110,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 Tentang Penetapan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp5.051.181.340,00, dengan rincian Penetapan Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2021 sebesar Rp5.051.181.340,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 Tentang Penetapan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp3.446.292.839,00, dengan rincian Penetapan Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2022 sebesar Rp3.446.292.839,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp22.758.000,00, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan pada TA 2020 sebesar Rp22.758.000,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp110,00, Rincian Penyaluran Sisa Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan pada TA 2020 sebesar Rp110,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp340,00, Rincian Penyaluran Sisa Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan pada TA 2021 sebesar Rp340,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp22.758.000,00, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan pada TA 2020 sebesar Rp22.758.000,00.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.07/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp5.051.181.000,00, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan PSDH pada TA 2021 sebesar Rp5.051.181.000,00.

- Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 rincian DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp22.160.404.000,00.

Pemerintah Pusat telah menyalurkan DBH Perkebunan Sawit kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp22.160.404.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada realisasi kegiatan yang bersumber dari dana DBH Perkebunan Sawit tersebut.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
354.443.414.000,00	354.410.355.837,00	99,99	335.727.628.000,00	18.682.727.837

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.10 Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp354.443.414.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Alokasi Umum	354.443.414.000,00	354.410.355.837,00	99,99	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00
Jumlah	354.443.414.000,00	354.410.355.837,00	99,99	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp354.410.355.837,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp172.492.424.837,00
2. Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp181.917.931.000,00, dapat dijelaskan realisasinya sebagai berikut:

Urutan	Penyaluran	Realisasi	Sisa Dana 2023
Penggajian PPPK	114.113.460.000,00	20.301.306.990,00	93.812.153.010,00
Bidang Pendidikan	32.948.798.000,00	26.082.417.978,00	6.866.380.022,00
Bidang Kesehatan	20.974.762.000,00	18.823.410.344,00	2.151.351.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bidang Pekerjaan Umum	10.080.911.000,00	9.490.888.354,00	590.022.646,00
Kelurahan	3.800.000.000,00	3.742.465.896,00	57.534.104,00
Total	181.917.931.000,00	78.440.489.562,00	103.477.441.438,00

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	a	b	c=b/a	d	e=b-d
DAK Fisik	68.515.492.000,00	67.083.395.782,00	97,91	77.629.486.104,00	(10.546.090.322,00)
DAK Non Fisik	255.718.078.000,00	249.868.030.629,00	97,71	210.710.908.447,00	39.157.122.182,00
Jumlah	324.233.570.000,00	316.951.426.411,00	97,75	288.340.394.551,00	28.611.031.860,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp316.951.426.411 atau sekitar 97,75 dari anggaran sebesar Rp324.233.570.000,- dikarenakan:

1. DAK Fisik terealisasi sebesar 97,91 % dari anggaran karna penyaluran sesuai kontrak pekerjaan.
2. DAK Non Fisik terealisasi sebesar 97,71 % dari anggaran karna masih terdapat sisa anggaran tahun sebelumnya di RKUD, dan Pemerintah Pusat melakukan pemotongan sebesar sisa dana tersebut sesuai laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk sisa DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.078.980.184,00

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.11 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp68.515.492.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Bidang Pendidikan	5.998.662.000,00	5.850.695.441,00	97,53	29.801.633.298,00	(23.950.937.857,00)
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	62.516.830.000,00	61.232.700.341,00	97,95	22.848.236.670,00	38.384.463.671,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	0,00	0,00	0,00	799.880.000,00	(799.880.000,00)
DAK Bidang Jalan Reguler	0,00	0,00	0,00	12.524.336.282,00	(12.524.336.282,00)
DAK Bidang Air Minum Reguler	0,00	0,00	0,00	7.350.954.854,00	(7.350.954.854,00)
DAK Bidang Sanitasi Reguler	0,00	0,00	0,00	4.304.445.000,00	(4.304.445.000,00)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerima Dana DAK Fisik sebesar Rp67.083.395.782,00 dan telah terealisasi kegiatannya sebesar Rp64.922.629.147,00, dengan sisa dana sebesar Rp2.160.766.635,00.

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran V.12 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp255.718.078.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Keputusan	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Non Fisik-BOS Reguler	96.354.900.000,00	96.326.678.447,00	99,97	81.602.875.514,00	14.723.802.933,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	100,00	0,00	2.540.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	114.643.551.000,00	112.545.702.000,00	98,17	104.271.442.960,00	8.274.259.040,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.549.750.000,00	2.549.750.000,00	100,00	2.411.750.000,00	138.000.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.594.000.000,00	7.222.656.000,00	109,53	6.678.030.000,00	544.626.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.117.700.000,00	1.192.000.000,00	106,65	773.400.000,00	418.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Non Fisik-BOKKB BOK	6.897.834.000,00	5.215.041.036,00	75,60	8.940.178.510,00	(3.725.137.474,00)
DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas	16.340.781.000,00	16.105.873.500,00	98,56	0,00	16.105.873.500,00
DAK Non Fisik-BOKKB Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB BOKB	5.811.692.000,00	3.705.806.104,00	63,76	4.277.408.598,00	(571.602.494,00)
DAK Non Fisik- PK2UKM	0,00	0,00	0,00	350.280.600,00	(350.280.600,00)
DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000,00	308.033.842,00	73,80	378.951.300,00	(70.917.458,00)
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	250.928.400,00	66,91	362.760.965,00	(111.832.565,00)
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.706.100.000,00	1.579.370.000,00	92,57	663.830.000,00	915.540.000,00
DAK Non Fisik- PK2UMK	369.370.000,00	326.191.300,00	88,31	0,00	326.191.300,00
Jumlah	255.718.078.000,00	249.868.030.629,00	97,71	210.710.908.447,00	39.157.122.182,00

Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 telah menerima DAK Non Fisik sebesar Rp249.868.030.629,00 dan telah terealisasi sebesar Rp247.142.407.963,00 dengan sisa dana sebesar Rp8.078.980.184,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	sisa Dana 2022	Penyaluran	Realisasi	Sisa Dana 2023
DAK Non Fisik-BOS	20.487.800,00	98.866.678.447,00	98.877.814.479,00	9.351.768,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD (TW) Tambahkan	736.094.400,00	112.545.702.000,00	109.683.346.800,00	3.598.449.600,00
Penghasilan Guru PNSD (TW)	404.750.000,00	2.549.750.000,00	2.105.250.000,00	849.250.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD (Tahap)	0,00	7.222.656.000,00	7.210.956.000,00	11.700.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (Tahap)	0,00	1.192.000.000,00	1.192.000.000,00	0,00
BOKKB - BOK (Tahap)	1.682.792.964,00	5.215.041.036,00	4.505.368.790,00	2.392.465.210,00
BOKKB Akreditasi Puskesmas	0,00	16.105.873.500,00	15.423.565.763,00	682.307.737,00
BOKKB - BOKB (Tahap)	2.105.885.896,00	3.705.806.104,00	5.415.334.390,00	396.357.610,00
PK2UKM (Tahap)	43.178.700,00	326.191.300,00	356.170.000,00	13.200.000,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal (Tahap)	109.366.158,00	308.033.842,00	373.812.180,00	43.587.820,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Tahap)	124.071.600,00	250.928.400,00	372.149.145,00	2.850.855,00
DTPHP(DKP)	126.730.000,00	1.579.370.000,00	1.626.640.416,00	79.459.584,00
Jumlah	5.353.357.518,00	249.868.030.629,00	247.142.407.963,00	8.078.980.184,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dana Desa	130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00
Jumlah	130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 adalah Transfer Dana Desa sebesar Rp129.623.338.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.598.740.132,00 atau 2,05% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp127.024.597.939,00.

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
235.566.830.973,00	196.266.249.291,00	83,32	151.480.204.993,00	44.786.044.298,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a). Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
225.370.830.973,00	186.100.249.291,00	82,58	138.522.362.493,00	47.577.886.798,00

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 adalah sebesar Rp186.100.249.291,00 atau 82,58% dari anggaran sebesar Rp225.370.830.973,00, mengalami kenaikan sebesar Rp47.577.886.798,00 atau 34,35% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 yang berjumlah Rp138.522.362.493,00.

Tabel 5.37 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pajak Kendaraan Bermotor	42.151.402.603,00	43.530.179.370,00	103,27	29.967.419.478,00	13.562.759.892,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58.787.596.660,00	33.146.122.546,00	56,38	30.785.220.348,00	2.360.902.198,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.109.932.447,00	76.785.063.562,00	98,30	45.364.296.738,00	31.420.766.824,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	7.636.916.414,00	1.185.185.553,00	15,52	1.082.953.355,00	102.232.198,00
Pajak Rokok	38.684.982.849,00	31.453.698.260,00	81,31	31.322.472.574,00	131.225.686,00
Jumlah	225.370.830.973,00	186.100.249.291,00	82,58	138.522.362.493,00	47.577.886.798,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dari selama TA 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 467 / III / 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2022) untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.733.749.793,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.733.825.708,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.609.177.514,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp95.118.380,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 551 / IV / 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.822.316.151,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.960.334.247,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.390.417.925,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp290.205.678,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 6766 / VII / 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.884.268.241,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.557.829.275,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.707.957.097,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp293.054.470,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7376 / X / 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.867.911.251,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.886.378.587,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.368.272.547,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp302.888.988,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7726 / XII / 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.447.478.282,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.636.614.031,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.279.368.347,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp203.918.037,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 588 /V/ 2023 tanggal 4 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.439.916.074,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 589 /V/ 2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp8.261.048.557,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 6765 /VII/ 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp7.093.368.488,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7458 /X/ 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp6.315.504.619,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7727 /XII/ 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp8.261.048.557,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
10.196.000.000,00	10.166.000.000,00	99,71	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2023 adalah sebesar Rp10.166.000.000,00 atau 99,71% dari anggarannya sebesar Rp10.196.000.000,00

Tabel 5.38 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	10.196.000.000,00	10.166.000.000,00	99,71	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.1/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp6.264.000.000,- , Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.000.000,00 Rumah Sederhana Layak Huni sebesar Rp4.536.000.000,00.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2023 adalah sebesar Rp10.196.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp10.166.000.000,00 atau 99,71% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan per SKPD

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	10.196.000.000,00	10.166.000.000,00	99,71	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)
Jumlah	10.196.000.000,00	10.166.000.000,00	99,71	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	808.938,15	(808.938,15)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun 2022 yang berjumlah Rp808.958,15.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	808.958,15	(808.958,15)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	808.958,15	(808.958,15)

5.1.2. Belanja

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
4.155.405.904.551,00	3.620.557.410.448,05	87,13	3.708.275.217.225,88	(87.717.806.777,83)

Realisasi Belanja Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2023 adalah sebesar Rp3.620.557.410.448,05 atau 87,13% dari nilai anggaran sebesar Rp4.155.405.904.551,00. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.708.275.217.225,88 mengalami penurunan sebesar Rp87.717.806.777,83 atau 2,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Belanja dan Transfer

Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Operasi	2.980.439.438.024,00	2.729.054.015.689,05	91,57	2.598.560.224.108,88	130.493.791.580,17
Belanja Modal	1.171.879.218.740,00	891.490.372.209,00	76,07	1.109.714.993.117,00	(218.224.620.908,00)
Belanja Tidak Terduga	3.087.247.787,00	13.022.550,00	0,42	0,00	13.022.550,00
Jumlah	4.155.405.904.551,00	3.620.557.410.448,05	87,13	3.708.275.217.225,88	(87.717.806.777,83)

A. Belanja Operasi

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.980.439.438.024,00	2.729.054.015.689,05	91,57	2.598.560.224.108,88	130.493.791.580,17

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2023 adalah sebesar Rp2.729.054.015.689,05 atau 91,57% dari nilai anggaran sebesar Rp2.980.439.438.024,00. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.598.560.224.108,88 mengalami kenaikan sebesar Rp130.493.791.580,17 atau 5,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Belanja Pegawai	1.278.630.915.885,00	1.163.398.270.080,00	90,99	1.052.966.396.064,00	110.431.874.016,00
Belanja Barang dan Jasa	1.495.929.986.102,00	1.381.790.584.075,05	92,37	1.381.017.141.616,88	773.442.458,17
Belanja Subsidi	26.326.079.298,00	26.215.958.998,00	99,58	23.970.315.000,00	2.245.643.998,00
Belanja Hibah	144.555.941.739,00	123.667.935.263,00	85,55	109.378.573.578,00	14.289.361.685,00
Belanja Bantuan Sosial	34.996.515.000,00	33.981.267.273,00	97,10	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00
Jumlah	2.980.439.438.024,00	2.729.054.015.689,05	91,57	2.598.560.224.108,88	130.493.791.580,17

1. Belanja Pegawai

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.278.630.915.885,00	1.163.398.270.080,00	90,99	1.052.966.396.064,00	110.431.874.016,00

Realisasi Belanja Pegawai selama TA 2023 sebesar Rp1.163.398.270.080,00 atau 90,99% dari anggaran sebesar Rp1.278.630.915.885,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.052.966.396.064,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp110.431.874.016,00 atau 10,49%.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.43 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Belanja Gaji dan Tunjangan	571.723.935.851,00	508.278.420.713,00	88,90	471.315.147.447,00	36.963.273.266,00
Belanja Gaji Pokok ASN	396.744.053.318,00	363.827.837.533,00	91,70	344.653.518.886,00	19.174.318.647,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan Keluarga ASN	46.670.626.935,00	36.793.095.975,00	78,84	34.970.565.164,00	1.822.530.811,00
Tunjangan Jabatan ASN	7.738.249.656,00	6.855.004.804,00	88,59	7.710.483.911,00	(855.479.107,00)
Tunjangan Fungsional ASN	29.553.203.837,00	25.455.070.256,00	86,13	24.374.331.984,00	1.080.738.272,00
Tunjangan Fungsional umum ASN	8.775.432.089,00	6.811.960.999,00	77,63	5.416.604.260,00	1.395.356.739,00
Tunjangan Beras ASN	27.766.393.958,00	22.791.590.558,00	82,08	21.783.428.705,00	1.008.161.853,00
PPh/Tunjangan	2.131.143.436,00	1.647.627.382,00	77,31	1.498.468.063,00	149.159.319,00
Pembulatan Gaji ASN	9.591.948,00	5.317.772,00	55,44	5.074.853,00	242.919,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.602.277.248,00	41.075.269.137,00	88,14	28.068.731.256,00	13.006.537.881,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.989.974.291,00	752.994.316,00	37,84	710.415.115,00	42.579.201,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.742.989.135,00	2.262.651.981,00	60,45	2.123.525.250,00	139.126.731,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	516.025.700.417,00	475.095.404.107,00	92,07	403.573.234.939	71.522.169.168,00
Penghasilan berdasarkan beban	222.724.701.079,00	209.119.558.497,00	93,89	157.715.395.003,00	51.404.163.494,00
Penghasilan berdasarkan tempat	2.448.642.166,00	1.955.090.000,00	79,84	3.003.429.500,00	(1.048.339.500,00)
Penghasilan berdasarkan kondisi	8.307.836.128,00	7.984.905.237,00	96,11	6.544.586.634,00	1.440.318.603,00
Penghasilan berdasarkan tambahan	5.662.823.322,00	5.334.851.122,00	94,21	6.892.797.394,00	(1.557.946.272,00)
Penghasilan berdasarkan prestasi	276.881.697.722,00	250.700.999.251,00	90,54	229.417.026.408,00	21.283.972.843,00
Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	154.698.633.872,00	144.876.708.897,00	93,65	141.843.256.423,00	3.033.452.474,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.684.313.188,00	5.203.324.686,00	91,54	3.709.009.344,00	1.494.315.342,00
Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah	700.427.500,00	399.016.000,00	56,97	344.840.000,00	54.176.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	114.643.551.000,00	109.683.346.800,00	95,67	107.984.483.000,00	1.698.863.800,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.549.750.000,00	2.105.250.000,00	82,57	2.490.140.000,00	(384.890.000,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	0,00	0,00	0,00	151.934.998,00	(151.934.998,00)
Belanja Honorarium	31.095.392.184,00	27.460.571.411,00	88,31	27.137.649.081,00	322.922.330,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	25.200.000,00	0,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	33.022.322.696,00	32.691.272.781,00	99,00	32.751.649.267,00	(60.376.486,00)
Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.004.010.000,00	0,00
Tunjangan Keluarga DPRD	149.822.400,00	105.611.100,00	70,49	104.099.100,00	1.512.000,00
Tunjangan Beras DPRD	191.623.320,00	144.622.740,00	75,47	142.594.980,00	2.027.760,00
Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	86.058.000,00	0,00
Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.455.814.500,00	0,00
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.848.500,00	133.005.600,00	89,36	132.640.200,00	365.400,00
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00	0,00
Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.925.700.000,00	97,04	1.969.800.000,00	(44.100.000,00)
Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	583.500.000,00	571.779.861,00	97,99	570.305.607,00	1.474.254,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan					
Kesejahteraan					
Pimpinan dan Anggota	8.974.601.384,00	8.946.370.980,00	99,69	9.016.326.880,00	(69.955.900,00)
DPRD					
Tunjangan					
Transportasi DPRD	10.374.000.000,00	10.374.000.000,00	100,00	10.332.000.000,00	42.000.000,00
Uang Jasa					
Pengabdian DPRD	131.544.592,00	6.300.000,00	4,79	0,00	6.300.000,00
Gaji dan Tunjangan					
KDH/WKDH	184.173.049,00	170.076.788,00	92,35	169.317.988,00	758.800,00
Gaji Pokok					
KDH/WKDH	58.688.000,00	54.600.000,00	93,03	54.600.000,00	0,00
Tunjangan Keluarga					
KDH/WKDH	4.424.700,00	4.116.000,00	93,02	4.116.000,00	0,00
Tunjangan Jabatan					
KDH/WKDH	105.651.000,00	98.280.000,00	93,02	98.280.000,00	0,00
Tunjangan Beras					
KDH/WKDH	5.449.612,00	5.069.400,00	93,02	4.345.200,00	724.200,00
Tunjangan					
PPh/Tunjangan	2.739.269,00	2.177.268,00	79,48	2.142.868,00	34.400,00
Khusus KDH/WKDH					
Pembulatan Gaji					
KDH/WKDH	9.408,00	2.120,00	22,53	1.920,00	200,00
Belanja Iuran Jaminan					
Kesehatan	6.750.548,00	5.382.720,00	79,74	5.382.720,00	0,00
KDH/WKDH					
Belanja Iuran Jaminan					
Kecelakaan Kerja	115.128,00	112.320,00	97,56	112.320,00	0,00
KDH/WKDH					
Belanja Iuran Jaminan					
Kematian Kerja	345.384,00	336.960,00	97,56	336.960,00	0,00
KDH/WKDH					
Penerimaan Lainnya					
Pimpinan DPRD serta	1.533.120.000,00	1.124.616.794,00	73,35	1.870.320.000,00	(745.703.206,00)
KDH/WKDH					
Dana Operasional					
Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	450.720.000,00	(57.600.000,00)
Dana Operasional					
KDH/WKDH	1.140.000.000,00	731.496.794,00	64,17	1.419.600.000,00	(688.103.206,00)
Belanja Pegawai					
BLUD	1.443.030.000,00	1.161.770.000,00	80,51	1.443.470.000,00	(281.700.000,00)
Jumlah	1.278.630.915.885,00	1.163.398.270.080,00	90,99	1.052.966.396.064,00	110.431.874.016,00

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44 Rincian Belanja Pegawai Per SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi 2022	Kenaiikan/ Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	658.517.701.144,00	584.003.768.941,00	88,88	525.728.867.864,00	58.274.901.077,00
Dinas Kesehatan	117.922.006.164,00	111.496.144.876,00	94,55	93.043.359.269,00	18.452.785.607,00
RSUD Bengkalis	43.234.751.516,00	40.439.417.902,00	93,53	37.674.969.703,00	2.764.448.199,00
RSUD Kecamatan	41.341.236.987,00	39.573.881.259,00	95,72	32.219.540.706,00	7.354.340.553,00
Mandau					
Dinas Pekerjaan					
Umum dan Penataan	15.872.643.061,00	15.266.204.625,00	96,18	14.230.815.141,00	1.035.389.484,00
Ruang					
Dinas Perumahan,					
Pemukiman dan	8.618.253.897,00	8.073.440.109,00	93,68	7.821.842.322,00	251.597.787,00
Pertanahan					
Badan					
Penanggulangan	5.046.851.129,00	5.033.612.841,00	99,74	4.860.417.432,00	173.195.409,00
Bencana Daerah					
Dinas Pemadam					
Kebakaran	6.614.717.998,00	6.593.177.557,00	99,67	5.862.602.439,00	730.575.118,00
Satuan Polisi Pamong					
Praja	12.349.565.535,00	12.060.974.109,00	97,66	11.039.797.567,00	1.021.176.542,00
Dinas Sosial	8.071.449.704,00	7.693.824.427,00	95,32	7.891.323.913,00	(197.499.486,00)
Dinas Tenaga Kerja					
dan Transmigrasi	7.184.827.355,00	6.953.551.099,00	96,78	6.104.293.195,00	849.257.904,00
Dinas Pemberdayaan					
Perempuan dan	7.093.874.772,00	6.543.159.295,00	92,24	6.654.370.288,00	(111.210.993,00)
Perlindungan Anak					
Dinas Ketahanan					
Pangan	5.073.602.272,00	4.951.694.419,00	97,60	4.879.743.816,00	71.950.603,00
Dinas Lingkungan					
Hidup	9.657.675.291,00	8.672.374.645,00	89,80	7.947.434.654,00	724.939.991,00
Dinas Kependudukan					
dan Pencatatan Sipil	10.558.903.105,00	9.665.772.391,00	91,54	9.647.197.501,00	18.574.890,00
Dinas Pemberdayaan					
Masyarakat dan Desa	5.645.585.451,00	5.227.428.617,00	92,59	5.217.502.484,00	9.926.133,00
Dinas Pengendalian					
Penduduk dan	6.330.233.830,00	5.867.250.343,00	92,69	5.620.191.905,00	247.058.438,00
Keluarga Berencana					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perhubungan	16.435.629.401,00	13.930.075.561,00	84,76	12.358.967.653,00	1.571.107.908,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.416.296.022,00	5.628.418.647,00	87,72	5.846.244.515,00	(217.825.868,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.626.613.033,00	6.205.017.488,00	93,64	6.233.845.632,00	(28.828.144,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9.511.947.800,00	9.425.616.920,00	99,09	8.849.872.545,00	575.744.375,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.684.147.641,00	8.454.247.443,00	87,30	8.387.284.527,00	66.962.916,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.055.760.299,00	9.027.732.194,00	99,69	8.995.998.469,00	31.733.725,00
Dinas Perikanan	8.267.610.952,00	7.691.160.666,00	93,03	7.421.328.308,00	269.832.358,00
Dinas Perkebunan	8.089.146.917,00	7.780.669.273,00	96,19	7.266.529.862,00	514.139.411,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	16.428.464.155,00	15.955.181.845,00	97,12	16.766.974.440,00	(811.792.595,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.047.693.019,00	8.155.174.876,00	90,14	8.106.075.342,00	49.099.534,00
Sekretariat Daerah	32.215.382.807,00	30.287.301.862,00	94,02	30.014.948.865,00	272.352.997,00
Sekretariat DPRD	42.733.052.158,00	41.248.187.932,00	96,53	40.767.406.081,00	480.781.851,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.885.418.994,00	8.732.624.983,00	88,34	7.791.757.787,00	940.867.196,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.568.093.098,00	15.187.950.677,00	77,62	9.882.759.395,00	5.305.191.282,00
Badan Pendapatan Daerah	22.658.567.907,00	19.554.368.314,00	86,30	16.306.537.683,00	3.247.830.631,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.420.257.846,00	8.323.999.129,00	98,86	7.490.280.955,00	833.718.164,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	5.127.873.651,00	4.941.165.579,00	96,36	4.489.004.047,00	452.161.532,00
Inspektorat	9.356.884.378,00	9.080.313.590,00	97,04	8.018.462.890,00	1.061.850.700,00
Kecamatan Bengkalis	7.948.827.802,00	7.328.833.138,00	92,20	6.723.031.245,00	605.801.893,00
Kecamatan Bantan	3.585.447.702,00	3.313.854.339,00	92,43	3.123.382.461,00	190.471.878,00
Kecamatan Bukit Batu	4.366.529.144,00	4.219.884.279,00	96,64	3.829.369.488,00	390.514.791,00
Kecamatan Siak Kecil	4.496.955.097,00	4.141.146.795,00	92,09	3.583.315.689,00	557.831.106,00
Kecamatan Bandar Laksamana	2.900.341.809,00	2.519.296.279,00	86,86	2.429.866.061,00	89.430.218,00
Kecamatan Rupal	5.821.055.637,00	5.118.889.417,00	87,94	4.994.032.158,00	124.857.259,00
Kecamatan Rupal Ulara	3.631.492.814,00	3.341.003.459,00	92,00	3.308.868.300,00	32.135.159,00
Kecamatan Mandau	10.902.672.925,00	10.475.749.189,00	96,08	9.985.277.119,00	490.472.070,00
Kecamatan Pinggir	5.465.431.125,00	4.932.741.110,00	90,25	4.143.143.470,00	789.597.640,00
Kecamatan Bathin Solapan	2.935.030.000,00	2.909.364.117,00	99,13	2.614.103.502,00	295.260.615,00
Kecamatan Talang Muandau	2.598.847.836,00	2.365.252.439,00	91,01	2.068.731.481,00	296.520.958,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.315.564.705,00	5.007.371.085,00	94,20	4.724.725.885,00	282.645.200,00
Jumlah	1.278.630.915.885,00	1.163.398.270.080,00	90,99	1.052.966.396.064,00	110.431.874.016,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.495.929.986.102,00	1.381.790.584.075,05	92,37	1.381.017.141.616,88	773.442.458,17

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama TA 2023 sebesar Rp1.381.790.584.075,05 atau 92,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.495.929.986.102,00, jika dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1.381.017.141.616,88 mengalami kenaikan Rp773.442.458,17 atau 0,06%.

Belanja Barang dan Jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.45 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bahan Habis Pakai	238.852.029.800,00	212.601.349.958,00	89,01	202.570.073.685,00	10.031.276.273,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	174.603.000,00	172.820.200,00	98,98	61.175.000,00	111.645.200,00
Belanja Jasa Kantor	494.978.947.040,00	468.999.309.679,00	94,75	467.529.980.189,00	1.469.329.490,00
Belanja Premi Asuransi	84.448.563.909,00	76.850.956.565,00	91,00	43.677.997.179,00	33.172.959.386,00
Belanja Sewa Tanah	80.000.000,00	79.000.000,00	98,75	0,00	79.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.228.600.000,00	5.848.672.130,00	80,91	7.553.360.748,00	(1.704.688.618,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.036.254.000,00	10.365.423.319,00	86,12	10.228.848.700,00	136.574.619,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	26.100.000,00	26.100.000,00	100,00	22.000.000,00	4.100.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	253.700.000,00	223.200.000,00	87,98	203.650.000,00	19.550.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.506.932.601,00	10.918.447.537,00	66,14	20.625.697.611,00	(9.707.250.074,00)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.675.393.598,00	2.386.621.600,00	64,94	4.504.486.821,00	(2.117.865.221,00)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	74.550.000,00	68.700.000,00	92,15	80.265.000,00	(11.565.000,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.300.000.000,00	1.066.500.000,00	82,04	367.500.000,00	699.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.987.451.000,00	19.263.990.259,00	87,61	23.056.337.050,00	(3.792.346.791,00)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	657.400.000,00	656.500.000,00	99,86	397.960.507,00	258.539.493,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	160.000.000,00	159.780.000,00	99,86	345.451.000,00	(185.671.000,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.235.429.686,00	31.993.867.482,00	93,45	36.462.244.229,00	(4.468.376.747,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.181.009.200,00	32.107.365.259,00	79,91	34.846.724.255,00	(2.739.358.996,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.405.647.300,00	6.573.948.186,00	88,77	3.010.399.521,00	3.563.548.665,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	220.250.000,00	218.808.523,00	99,35	105.490.000,00	113.318.523,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	268.149.581.180,00	240.464.346.573,00	89,68	243.970.292.340,00	(3.505.945.767,00)
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	22.789.982.000,00	19.706.454.840,00	86,47	26.086.650.997,00	(6.380.196.157,00)
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	15.902.563.800,00	14.984.281.396,00	94,23	28.485.390.538,00	(13.501.109.142,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	65.206.922.397,00	66.281.647.611,00	101,65	72.366.483.844,00	(6.084.836.233,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	159.368.075.591,00	159.742.492.958,05	100,23	154.458.682.402,88	5.283.810.555,17
Jumlah	1.495.929.986.102,00	1.381.790.584.075,05	92,37	1.381.017.141.616,88	773.442.458,17

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Dinas Pendidikan	198.505.586.687,00	189.438.016.627,00	95,43	204.995.567.451,00	(15.557.550.824,00)
Dinas Kesehatan	184.871.390.468,00	166.543.398.718,00	90,09	142.681.029.805,00	23.862.368.913,00
RSUD Bengkulu	88.340.478.754,00	88.639.375.247,00	100,34	105.598.591.808,00	(16.959.216.561,00)
RSUD Kecamatan Mandau	110.182.783.023,00	108.303.305.560,05	98,29	116.833.774.328,88	(8.530.468.768,83)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.348.921.312,00	45.202.317.646,00	93,49	47.929.240.010,00	(2.726.922.364,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	32.659.498.392,00	29.748.246.429,00	91,09	23.420.191.147,00	6.328.055.282,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.735.823.152,00	13.161.534.572,00	95,82	12.110.597.252,00	1.050.937.320,00
Dinas Pemadam Kebakaran	10.933.884.460,00	10.849.695.786,00	99,23	11.950.861.091,00	(1.101.165.305,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	16.782.058.356,00	16.632.557.638,00	99,11	15.555.648.435,00	1.076.909.203,00
Dinas Sosial	13.425.573.055,00	11.878.383.055,00	88,48	13.520.024.941,00	(1.641.641.886,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.532.707.710,00	12.216.482.862,00	97,48	9.039.339.224,00	3.177.143.638,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.782.529.152,00	9.162.765.570,00	93,66	10.588.751.526,00	(1.425.985.956,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.154.426.680,00	4.075.615.655,00	98,10	4.120.239.183,00	(44.623.528,00)
Dinas Lingkungan Hidup	40.046.567.012,00	39.417.478.321,00	98,43	40.886.819.583,00	(1.469.341.262,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.008.309.570,00	13.278.991.528,00	88,48	15.936.378.632,00	(2.657.387.104,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.648.681.105,00	30.838.808.549,00	97,44	31.908.615.498,00	(1.069.806.949,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.625.001.180,00	12.897.019.303,00	94,66	12.814.092.524,00	82.926.779,00
Dinas Perhubungan	78.388.529.124,00	63.832.402.307,00	81,43	53.042.160.910,00	10.790.241.397,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan	10.363.749.040,00	9.198.055.139,00	88,75	9.836.609.336,00	(638.554.197,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.734.399.840,00	8.626.239.630,00	98,76	9.104.392.235,00	(478.152.605,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.626.925.120,00	8.077.684.764,00	93,64	5.864.809.505,00	2.213.075.259,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	27.084.433.360,00	23.868.622.406,00	88,13	30.256.573.410,00	(6.387.951.004,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.093.457.952,00	5.067.908.832,00	99,50	6.577.411.538,00	(1.509.502.706,00)
Dinas Penanaman	11.557.006.840,00	10.779.134.379,00	93,27	11.746.078.217,00	(966.943.838,00)
Dinas Perkebunan	12.097.038.920,00	8.330.760.105,00	68,87	11.395.808.271,00	(3.065.048.166,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	18.685.916.748,00	16.677.055.845,00	90,32	13.276.935.421,00	3.600.120.424,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.599.050.700,00	17.417.790.248,00	88,87	20.468.586.214,00	(3.050.795.966,00)
Sekretariat Daerah	132.701.071.997,00	113.418.551.660,00	85,47	106.008.577.758,00	7.409.973.902,00
Sekretariat DPRD	80.406.692.500,00	72.900.319.591,00	90,66	76.139.730.610,00	(3.239.411.019,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.257.900.850,00	16.297.453.443,00	89,26	16.945.239.788,00	(647.786.345,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.611.831.902,00	45.270.143.835,00	93,13	42.788.793.340,00	2.481.350.495,00
Badan Pendapatan Daerah	24.476.204.400,00	24.043.029.498,00	98,23	24.996.322.771,00	(953.293.273,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	13.756.579.953,00	11.061.154.209,00	80,41	9.129.822.103,00	1.931.332.106,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	5.599.890.600,00	5.308.857.105,00	94,80	5.907.523.580,00	(598.666.475,00)
Inspektorat	10.143.473.780,00	8.303.033.217,00	81,86	8.346.784.208,00	(43.750.991,00)
Kecamatan Bengkalis	9.132.466.992,00	8.217.450.077,00	89,98	7.743.911.598,00	473.538.479,00
Kecamatan Bantan	4.154.269.460,00	4.051.271.559,00	97,52	4.359.891.877,00	(308.620.318,00)
Kecamatan Bukit Batu	5.988.586.403,00	5.865.968.299,00	97,95	5.989.046.890,00	(123.078.591,00)
Kecamatan Siak Kecil	4.516.021.440,00	4.214.150.550,00	93,32	4.315.195.982,00	(101.045.432,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	5.145.012.320,00	4.745.687.773,00	92,24	4.336.609.655,00	409.078.118,00
Kecamatan Rupal	11.035.798.430,00	10.967.557.363,00	99,36	11.168.159.935,00	(200.602.572,00)
Kecamatan Rupal Utara	6.576.855.920,00	5.911.831.465,00	89,89	5.109.875.010,00	801.956.455,00
Kecamatan Mandau	36.952.536.545,00	36.693.361.932,00	99,30	33.221.574.393,00	3.471.787.539,00
Kecamatan Pinggir	8.407.081.856,00	8.274.397.836,00	98,42	7.524.888.774,00	749.509.062,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bathin Solapan	7.410.695.192,00	7.358.518.586,00	99,30	6.532.642.083,00	825.876.503,00
Kecamatan Talang Muandau	5.810.918.000,00	5.533.126.638,00	95,22	4.882.244.432,00	650.882.206,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.031.369.850,00	8.994.872.718,00	74,76	4.111.179.334,00	4.883.693.384,00
Jumlah	1.495.929.986.102,00	1.381.790.584.075,05	92,37	1.381.017.141.616,88	773.442.458,17

3. Belanja Subsidi

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
26.326.079.298,00	26.215.958.998,00	99,58	23.970.315.000,00	2.245.643.998,00

Realisasi Belanja Subsidi selama TA 2023 adalah sebesar Rp26.215.958.998,00 atau 99,58% dari anggaran sebesar Rp26.326.079.298,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.245.643.998,00 atau 9,37% dibandingkan realisasi TA 2022 yang berjumlah Rp23.970.315.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	11.721.579.498,00	11.721.579.498,00	100,00	12.000.000.000,00	(278.420.502,00)
Belanja Subsidi Kepada BUMN	14.604.499.800,00	14.494.379.500,00	99,25	11.970.315.000,00	2.524.064.500,00
Jumlah	26.326.079.298,00	26.215.958.998,00	99,58	23.970.315.000,00	2.245.643.998,00

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terealisasi sebesar Rp11.721.579.498,- yakni Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan dana subsidi kepada Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.

Realisasi Belanja Subsidi Kepada BUMN merupakan belanja barang yang diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk pasar murah dengan output keluaran penerima semua masyarakat kurang mampu yang berada di lingkungan Kabupaten Bengkalis selama tahun 2023. Untuk belanja subsidi ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Bulog Kabupaten Bengkalis. Dengan anggaran sebesar Rp14.604.499.800,00 dengan realisasi kegiatan sebesar Rp14.494.379.500,00. Penetapan Jumlah Rumah Tangga Penerima Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat, Jenis dan Jumlah Komoditi serta Besaran Harga yang dibayar Perpaket pada Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 60 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi.

4. Belanja Hibah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
144.555.941.739,00	123.667.935.263,00	85,55	109.378.573.578,00	14.289.361.685,00

Peraturan terkait Belanja Hibah yakni Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Belanja Hibah terdapat di beberapa SKPD dengan dasar peraturan sebagai berikut:

4.a. Dinas Pendidikan

4.a.1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

4.a.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.a.3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/P/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023.

4.a.4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Sekolah yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023.

4.a.5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

4.a.6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 200/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2023

4.a.7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor 132/KPTS-DISDIK/IX/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.a.8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor 795/KPTS-DISDIK/IX/2022 tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bengkalis.

4.a.9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor 399/KPTS-DISDIK/IX/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.b. Dinas Kesehatan

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 120/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

4.c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Nomor 600/KPTS/PUPR/2023/558 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.d. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

4.d.1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor 600/KPTS/DPPP-SEKR/I/2023/18 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.d.2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor 600/KPTS/DPPP-SEKR/XI/2023/57 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.e. Dinas Sosial

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Kepada Panti Asuhan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

4.f. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor 06/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

4.g. Sekretariat Daerah

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

4.h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 294/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Realisasi belanja hibah selama TA 2023 adalah sebesar Rp123.667.935.263,00 atau 85,55% dari anggaran sebesar Rp144.555.941.739,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.289.361.685,00 atau 13,06% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp109.378.573.578,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.48 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	126.036.737.739,00	104.601.257.212,00	82,99	107.791.592.578,00	(3.190.335.366,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.462.504.000,00	3.462.504.000,00	100,00	1.586.981.000,00	1.875.523.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	15.056.700.000,00	15.604.174.051,00	103,64	0,00	15.604.174.051,00
Jumlah	144.555.941.739,00	123.667.935.263,00	85,55	109.378.573.578,00	14.289.361.685,00

Rincian Belanja Hibah berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Rincian Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	34.481.239.301,00	29.944.858.843,00	86,84	16.333.898.406,00	13.610.960.437,00
Dinas Kesehatan	765.000.000,00	722.405.514,00	94,43	496.135.899,00	226.269.615,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.652.339.283,00	23.481.979.209,00	95,25	18.362.835.501,00	5.119.143.708,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	37.978.962.755,00	24.845.660.756,00	65,42	27.266.259.579,00	(2.420.598.823,00)
Dinas Sosial	330.050.000,00	329.111.000,00	99,72	1.052.582.220,00	(723.471.220,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.080.000.000,00	6.078.855.868,00	85,86	24.628.690.455,00	(18.549.834.587,00)
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	399.251.185,00	(399.251.185,00)
Sekretariat Daerah	6.670.000.000,00	5.724.436.673,00	85,82	18.657.674.333,00	(12.933.237.660,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.598.350.400,00	32.540.627.400,00	99,82	1.881.246.000,00	30.659.381.400,00
Jumlah	144.555.941.739,00	123.667.935.263,00	85,55	109.378.573.578,00	14.289.361.685,00

5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
34.996.515.000,00	33.961.267.273,00	97,10	31.227.797.630,00	2.733.469.643,00

Peraturan terkait Belanja Bantuan Sosial yakni Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu terkait Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 400.9.14.5/DINSOS/2023/76 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 400.9.14.5/DINSOS/2023/194 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom APBD-P pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 400.9.14.5/DINSOS/2023/77 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 400.9.14.5/DINSOS/2023/78 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat Berat pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 400.9.14.5/DINSOS/2023/116 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Permakanan bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor: 191 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Penerima Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja bantuan sosial selama TA 2023 adalah sebesar Rp33.981.267.273,00 atau 97,10% dari anggaran sebesar Rp34.996.515.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.753.469.423,00 dari realisasi TA 2022 berjumlah Rp31.227.797.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.893.715.000,00	4.071.094.473,00	83,19	4.420.249.700,00	(349.155.227,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	28.139.400.000,00	28.134.172.800,00	99,98	24.366.448.150,00	3.767.724.650,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.963.400.000,00	1.776.000.000,00	90,46	2.341.100.000,00	(565.100.000,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Jumlah	34.996.515.000,00	33.981.267.273,00	97,10	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00

Tabel 5.51 Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	106.390.000,00	(106.390.000,00)
Dinas Sosial	34.996.515.000,00	33.981.267.273,00	97,10	31.121.407.850,00	2.859.859.423,00
Jumlah	34.996.515.000,00	33.981.267.273,00	97,10	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00

B. Belanja Modal

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.171.879.218.740,00	891.490.372.209,00	76,07	1.109.714.993.117,00	(218.224.620.908,00)

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp891.490.372.209,00 atau 76,07% dari anggaran sebesar Rp1.171.879.218.740,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp218.224.620.908,00 atau 19,66% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.109.714.993.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Peralatan dan Mesin	173.014.630.758,00	129.460.420.955,00	74,83	214.056.580.897,00	(84.596.159.942,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	161.569.492.573,00	133.063.665.969,00	82,36	163.846.016.961,00	(30.782.350.992,00)
Belanj Jalan, Irigasi dan Jaringan	800.100.779.110,00	618.021.154.762,00	77,24	720.331.145.069,00	(102.309.990.307,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya	37.124.316.299,00	10.896.502.523,00	29,35	10.867.289.576,00	29.212.947,00
Belanja Aset Lainnya	70.000.000,00	48.628.000,00	69,47	613.960.614,00	(565.332.614,00)
Jumlah	1.171.879.218.740,00	891.490.372.209,00	76,07	1.109.714.993.117,00	(218.224.620.908,00)

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi belanja modal selama TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
173.014.630.758,00	129.460.420.955,00	74,83	214.056.580.897,00	(84.596.159.942,00)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2023 sebesar Rp129.460.420.955,00 atau 74,83% dari anggaran sebesar Rp173.014.630.758,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp84.596.159.942,00 atau 39,52% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp214.056.580.897,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.460.420.955,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Modal Alat Besar	9.901.435.179,00	9.781.512.910,00	98,79	17.303.069.159,00	(7.521.556.249,00)
Belanja Modal Alat Angkutan	48.037.859.200,00	33.635.577.808,00	70,02	57.386.841.100,00	(23.751.263.292,00)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	712.032.000,00	309.094.000,00	43,41	247.875.155,00	61.218.845,00
Belanja Modal Alat Pertanian	317.974.000,00	314.231.614,00	98,82	449.595.900,00	(135.364.286,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.063.238.043,00	19.106.973.157,00	76,24	32.817.984.809,00	(13.711.011.652,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.637.838.000,00	2.488.709.480,00	68,41	4.473.609.657,00	(1.984.900.177,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.918.098.327,00	34.362.392.820,00	86,08	56.318.225.218,00	(21.955.832.398,00)
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	15.073.903.221,00	4.063.449.004,00	26,96	2.511.780.775,00	1.551.668.229,00
Belanja modal Pengadaan Komputer	14.008.823.073,00	10.352.443.582,00	73,90	20.498.833.735,00	(10.146.390.153,00)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.170.766.000,00	629.765.000,00	53,79	349.650.000,00	280.115.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	359.797.595,00	338.065.322,00	93,96	259.245.575,00	78.819.747,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	293.825.000,00	(245.825.000,00)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	28.996.000,00	27.425.000,00	94,58	107.700.000,00	(60.275.000,00)
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	21.318.000,00	(21.318.000,00)
Belanja Modal Ramburambu	2.281.594.000,00	1.537.092.286,00	67,37	2.404.616.998,00	(867.524.712,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	287.180.000,00	286.728.950,00	99,84	179.701.674,00	107.027.276,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.487.019.304,00	7.255.173.097,00	132,22	9.995.830.437,00	(2.740.657.340,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.680.076.816,00	4.923.786.925,00	73,71	8.436.877.705,00	(3.513.090.780,00)
Jumlah	173.014.630.758,00	129.460.420.955,00	74,83	214.056.590.807,00	(84.596.169.842,00)

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.54 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	22.924.448.104,00	8.828.927.977,00	38,51	18.826.318.494,00	(9.997.390.517,00)
Dinas Kesehatan	29.765.692.067,00	23.799.524.471,00	79,96	18.463.357.901,00	5.336.166.570,00
RSUD Bengkulu	2.367.440.399,00	997.027.500,00	42,11	19.690.443.838,00	(18.693.416.338,00)
RSUD Kecamatan Mandau	22.530.000.000,00	22.049.129.678,00	97,87	37.950.366.510,00	(15.901.236.832,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.952.400.843,00	9.732.030.760,00	88,86	16.062.594.038,00	(6.330.563.278,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Badan	836.070.900,00	624.577.500,00	74,70	1.036.694.100,00	-412.116.600,00
Penanggulangan Bencana Daerah	462.154.000,00	451.819.500,00	97,76	1.091.579.150,00	(639.759.650,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	10.966.138.000,00	10.964.160.700,00	99,98	1.174.003.615,00	9.790.157.085,00
Satuan Polisi Pamong Praja	233.409.000,00	71.960.000,00	30,83	33.839.000,00	38.121.000,00
Dinas Sosial	413.990.000,00	367.801.500,00	88,84	2.213.218.660,00	(1.845.417.160,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	337.637.100,00	285.306.150,00	84,50	563.531.405,00	(278.225.255,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	353.216.000,00	298.399.500,00	84,48	389.132.700,00	(90.733.200,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Ketahanan Pangan	22.132.000,00	21.950.000,00	99,18	315.147.000,00	(293.197.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.755.133.000,00	407.545.000,00	14,79	2.129.118.800,00	(1.721.573.800,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	720.787.000,00	552.451.600,00	76,65	6.578.087.190,00	(6.025.635.590,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	388.855.000,00	353.338.000,00	90,87	411.021.400,00	(57.683.400,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	884.843.000,00	751.685.830,00	84,95	575.429.905,00	176.255.925,00
Dinas Perhubungan	4.786.791.000,00	3.852.901.138,00	80,49	9.730.714.882,00	(5.877.813.744,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.035.417.000,00	670.532.490,00	64,76	489.815.600,00	180.716.890,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.202.000,00	0,00	0,00	343.282.476,00	(343.282.476,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.572.136.000,00	3.024.770.600,00	84,68	251.369.000,00	2.773.401.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.328.986.000,00	2.323.080.464,00	99,75	1.533.539.795,00	789.540.669,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.264.000,00	17.900.000,00	32,99	11.155.000,00	6.745.000,00
Dinas Perikanan	481.319.000,00	441.212.318,00	91,67	1.885.994.000,00	(1.444.781.682,00)
Dinas Perkebunan	519.333.000,00	325.354.000,00	62,65	1.069.084.900,00	(743.730.900,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	227.767.600,00	227.464.600,00	99,87	2.031.879.250,00	(1.804.414.650,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	120.677.000,00	104.955.000,00	86,97	879.408.800,00	(774.453.800,00)
Sekretariat Daerah	18.646.858.800,00	8.391.279.290,00	45,00	9.622.704.730,00	(1.231.425.440,00)
Sekretariat DPRD	2.662.952.000,00	2.324.456.892,00	87,29	1.322.289.470,00	1.002.167.422,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	811.210.846,00	689.550.000,00	85,00	1.745.367.200,00	(1.055.817.200,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.265.932.000,00	18.186.217.250,00	99,56	43.460.237.500,00	(25.274.020.250,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.415.173.000,00	1.411.954.700,00	99,77	2.653.743.803,00	-1.241.789.103,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	554.038.000,00	194.210.000,00	35,05	837.033.000,00	(642.823.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	245.612.000,00	46.695.000,00	19,01	180.288.000,00	(133.593.000,00)
Inspektorat	3.181.121.000,00	617.291.500,00	19,40	776.088.600,00	(158.797.100,00)
Kecamatan Bengkulu	742.250.000,00	353.809.200,00	47,67	455.924.700,00	(102.115.500,00)
Kecamatan Bantan	112.577.304,00	89.925.000,00	79,88	199.424.000,00	(109.499.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	279.575.800,00	259.136.800,00	92,69	432.949.400,00	(173.812.600,00)
Kecamatan Siak Kecil	610.064.500,00	117.479.400,00	19,26	142.035.900,00	(24.556.500,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	1.161.119.100,00	1.046.374.500,00	90,12	833.994.100,00	212.380.400,00
Kecamatan Rupal	175.846.000,00	175.791.000,00	99,97	1.267.274.750,00	(1.091.483.750,00)
Kecamatan Rupal Utara	220.440.800,00	193.192.350,00	87,64	271.188.000,00	(77.995.650,00)
Kecamatan Mandau	1.932.191.995,00	1.912.265.322,00	98,97	2.135.593.145,00	(223.327.823,00)
Kecamatan Pinggir	380.993.600,00	380.656.000,00	99,91	372.774.000,00	7.882.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	729.416.000,00	718.649.350,00	98,52	940.375.100,00	(221.725.750,00)
Kecamatan Talang Muandau	616.650.000,00	585.408.000,00	94,93	554.267.000,00	31.141.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228.369.000,00	220.273.125,00	96,45	122.901.090,00	97.372.035,00
Jumlah	173.014.630.758,00	129.460.420.955,00	74,83	214.056.580.897,00	(84.596.159.942,00)

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c/b/a	d	e/b-d
161.569.492.573,00	133.063.665.969,00	82,36	163.846.016.961,00	(30.782.350.992,00)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2023 sebesar Rp133.063.665.969,00 atau 82,36% dari anggaran sebesar Rp161.569.492.573,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp30.782.350.992,00 atau 18,79% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp163.846.016.961,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.063.665.969,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	157.529.714.573,00	131.486.066.681,00	83,47	154.232.157.497,00	(22.746.090.816,00)
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	437.938.000,00	437.135.150,00	99,82	1.515.515.663,00	(1.078.380.513,00)
Belanja modal					
Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.525.000.000,00	728.727.421,00	28,86	6.952.195.684,00	(6.223.468.263,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.076.840.000,00	411.736.717,00	38,24	1.146.148.117,00	(734.411.400,00)
Jumlah	161.569.492.573,00	133.063.665.969,00	82,36	163.846.016.961,00	(30.782.350.992,00)

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.56 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	30.134.591.550,00	16.621.541.484,00	55,16	61.651.495.136,00	(45.029.953.652,00)
Dinas Kesehatan	65.152.600.000,00	56.640.527.428,00	86,94	32.109.360.218,00	24.531.167.210,00
RSUD Bengkalis	1.240.000.000,00	723.713.732,00	58,36	744.132.000,00	(20.418.268,00)
RSUD Kecamatan Mandau	400.000.000,00	384.246.717,00	96,06	598.696.117,00	(214.449.400,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.746.004.026,00	31.736.987.983,00	94,05	14.279.168.948,00	17.457.819.035,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	566.824.000,00	(566.824.000,00)
Badan					
Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	199.612.810,00	99,81	398.773.160,00	(199.160.350,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	457.420.000,00	249.995.781,00	54,65	50.703.769,00	199.292.012,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	130.000.000,00	121.656.000,00	93,58	1.481.852.145,00	(1.360.196.145,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	280.482.313,00	(280.482.313,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	248.600.000,00	184.200.000,00	74,09	0,00	184.200.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	340.136.270,00	(340.136.270,00)
Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	199.535.000,00	66,51	456.596.550,00	(257.061.550,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	440.088.416,00	(440.088.416,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	790.000.000,00	787.352.730,00	99,66	3.189.800.340,00	(2.402.447.610,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	750.434.996,00	(750.434.996,00)
Dinas Perhubungan	9.490.000.000,00	7.176.878.885,00	75,63	17.635.133.752,00	(10.458.254.867,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	120.000.000,00	118.900.000,00	99,08	299.434.000,00	(180.534.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.020.750.000,00	760.235.652,00	74,48	1.167.482.800,00	(407.247.148,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.123.000.000,00	10.048.280.132,00	99,26	4.791.801.436,00	5.256.478.696,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	150.000.000,00	149.800.000,00	99,87	1.196.782.973,00	(1.046.982.973,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	400.000.000,00	399.344.000,00	99,84	989.676.852,00	(590.332.852,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	272.000.000,00	171.573.860,00	63,08	3.523.487.308,00	(3.351.913.448,00)
Sekretariat Daerah	2.372.438.000,00	2.086.010.690,00	87,93	827.916.000,00	1.258.094.690,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	1.222.667.355,00	(1.222.667.355,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	750.000.000,00	598.930.146,00	79,86	2.144.420.614,00	(1.545.490.468,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	2.380.902.812,00	(2.380.902.812,00)
Badan Pendapatan Daerah	367.592.000,00	367.225.102,00	99,90	733.460.900,00	(366.235.798,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000,00	5.000.000,00	62,50	305.845.227,00	(300.845.227,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00	0,00	0,00	597.767.175,00	(597.767.175,00)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	465.989.000,00	(465.989.000,00)
Kecamatan Bengkalis	415.600.000,00	402.433.000,00	96,83	495.544.000,00	(93.111.000,00)
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	315.471.357,00	265.212.000,00	84,07	702.110.415,00	(436.898.415,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	400.000.000,00	399.645.000,00	99,91	1.543.551.930,00	(1.143.906.930,00)
Kecamatan Rupat	323.120.000,00	276.000.000,00	85,42	519.575.600,00	(243.575.600,00)
Kecamatan Rupat Utara	46.000.000,00	45.926.250,00	99,84	299.236.000,00	(253.309.750,00)
Kecamatan Mandau	1.276.746.640,00	1.271.859.858,00	99,62	694.935.879,00	576.923.979,00
Kecamatan Pinggir	328.611.000,00	281.334.317,00	85,61	953.675.857,00	(672.341.540,00)
Kecamatan Bathin Solapan	240.000.000,00	239.763.412,00	99,90	1.545.608.167,00	(1.305.844.755,00)
Kecamatan Talang Muandau	150.948.000,00	149.944.000,00	99,33	1.450.966.531,00	(1.301.022.531,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	161.569.492.573,00	133.063.665.969,00	82,36	163.846.016.961,00	(30.782.350.992,00)

3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
800.100.779.110,00	618.021.154.762,00	77,24	720.331.145.069,00	(102.309.990.307,00)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023 sebesar Rp618.021.154.762,00 atau 77,24% dari anggaran sebesar Rp800.100.779.110,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp102.309.990.307,00 atau 14,20% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp720.331.145.069,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp618.021.154.762,0 merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	c=b/a	d	e=b-d
Belanja modal Jalan	582.295.939.224,00	461.197.640.347,00	79,20	540.217.825.580,00	(79.020.185.233,00)
Belanja Modal	29.988.105.738,00	14.459.426.235,00	48,22	13.611.866.586,00	847.559.649,00
Jembatan					
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan	14.263.048.201,00	9.930.057.450,00	69,62	10.604.018.023,00	(673.960.573,00)
Air Irigasi					
Belanja Modal					
Bangunan Pengairan	16.614.706.650,00	15.529.171.369,00	93,47	21.794.342.933,00	(6.265.171.564,00)
Pasang Surut					
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan					
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.670.061.729,00	13.250.219.391,00	96,93	20.128.512.964,00	(6.878.293.573,00)
Belanja Modal					
Bangunan					
Pengembangan	248.005.029,00	247.410.000,00	99,76	1.474.720.551,00	(1.227.310.551,00)
Sumber Air dan Air Tanah					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	877.198.443,00	546.391.336,00	62,29	616.515.230,00	(70.123.894,00)
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Air Kotor	73.155.439.977,00	66.076.254.730,00	90,32	59.232.843.021,00	6.843.411.709,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	28.547.688.000,00	(26.047.688.000,00)
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	670.519.286,00	494.819.286,00	73,80	1.468.260.000,00	(973.440.714,00)
Belanja Modal Jaringan Air Minum	58.154.803.808,00	28.418.016.638,00	48,87	17.096.400.621,00	11.321.616.017,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	7.462.201.025,00	5.253.859.680,00	70,41	5.331.515.495,00	(77.655.815,00)
Belanja Modal Jaringan Gas	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	750.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00	117.138.300,00	58,57	98.873.416,00	18.264.884,00
Belanja modal					
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	107.762.649,00	(107.762.649,00)
Jumlah	800.100.779.110,00	618.021.154.762,00	77,24	720.331.145.069,00	(102.309.990.307,00)

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.58 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Konakan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	288.259.902,00	(288.259.902,00)
RSUD Kecamatan Mandau	200.000.000,00	117.138.300,00	58,57	248.756.416,00	(131.618.116,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	625.894.113.470,00	465.993.295.446,00	74,45	552.974.105.302,00	(86.980.809.856,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Badan	130.555.824.447,00	118.294.946.198,00	90,61	125.354.893.356,00	(7.059.947.158,00)
Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	382.028.313,00	(382.028.313,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	58.446.384,00	(58.446.384,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.024.597.000,00	(2.024.597.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	38.249.000,00	(38.249.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	750.000,00
Dinas Perhubungan	9.921.000.000,00	6.082.834.840,00	61,31	4.035.047.954,00	2.047.786.886,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	49.474.920,00	98,95	0,00	49.474.920,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00	49.895.000,00	99,79	0,00	49.895.000,00
Dinas Perikanan	350.000.000,00	349.487.956,00	99,85	1.452.356.169,00	(1.102.868.213,00)
Dinas Perkebunan	19.529.000.000,00	15.084.325.575,00	77,24	14.184.222.039,00	900.103.536,00
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	5.353.019.029,00	4.920.900.945,00	91,93	8.614.071.903,00	(3.693.170.958,00)
Sekretariat Daerah	165.000.000,00	6.900.000,00	4,18	944.262.000,00	(937.362.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	130.591.500,00	(130.591.500,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
Kecamatan Bengkalis	438.450.000,00	109.713.000,00	25,02	1.726.853.030,00	(1.617.140.030,00)
Kecamatan Bukit Batu	413.000.000,00	7.000.000,00	1,69	436.633.593,00	(429.633.593,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00	47.950.000,00	(47.950.000,00)
Kecamatan Rupat	2.175.131.550,00	1.975.850.000,00	90,84	2.540.329.000,00	(564.479.000,00)
Kecamatan Rupat Utara	0,00	0,00	0,00	206.617.000,00	(206.617.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Mandau	3.923.420.614,00	3.897.260.505,00	99,33	3.282.195.948,00	615.064.567,00
Kecamatan Pinggir	1.032.070.000,00	1.031.382.077,00	99,93	1.172.798.860,00	(141.416.783,00)
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00	163.880.400,00	(163.880.400,00)
Jumlah	800.100.779.110,00	618.021.154.762,00	77,24	720.331.145.069,00	(102.309.990.307,00)

4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
37.124.316.299,00	10.896.502.523,00	29,35	10.867.289.576,00	29.212.947,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama TA 2023 sebesar Rp10.896.502.523,00 atau 29,35% dari anggaran sebesar Rp37.124.316.299,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp29.212.947,00 atau 0,27% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp10.867.289.576,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.896.502.523,00 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	22.612.968.000,00	0,00	0,00	278.630.000,00	(278.630.000,00)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	242.000.000,00	238.900.000,00	98,72	65.385.500,00	173.514.500,00
Belanja Modal Musik	246.390.000,00	97.878.590,00	39,73		97.878.590,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	119.000.000,00	118.844.500,00	99,87	25.241.800,00	93.602.700,00
Belanja Modal Alat Bercorak kebudayaan	370.000.000,00	369.418.013,00	99,84	1.119.076.328,00	(749.658.315,00)
Belanja Modal Hewan Piaraan	200.000.000,00	198.989.700,00	99,49	0,00	198.989.700,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	189.700.000,00	135.652.000,00	71,51	1.897.101.907,00	(1.761.449.907,00)
Belanja Modal Aset tetap lainnya Dana BOS	13.144.258.299,00	9.736.819.720,00	74,08	7.481.854.041,00	2.254.965.679,00
Jumlah	37.124.316.299,00	10.896.502.523,00	29,35	10.867.289.576,00	29.212.947,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	35.860.226.299,00	9.744.819.720,00	27,17	7.559.537.541,00	2.185.282.179,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	29.803.500,00	(29.803.500,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00	0,00	1.900.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	119.650.000,00	(119.650.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.195.000,00	48.028.590,00	99,65	0,00	48.028.590,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	0,00	0,00	271.750.000,00	(271.750.000,00)
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.392.642.907,00	(1.392.642.907,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	720.000.000,00	718.102.213,00	99,74	803.471.328,00	(85.369.115,00)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	456.032.500,00	(456.032.500,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	195.360.000,00	(195.360.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	31.700.000,00	27.700.000,00	87,38	5.500.000,00	22.200.000,00
Inspektorat	148.195.000,00	99.952.000,00	67,45	0,00	99.952.000,00
Kecamatan Bengkulu	0,00	0,00	0,00	10.241.800,00	(10.241.800,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Mandau	240.000.000,00	237.000.000,00	98,75	0,00	237.000.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)
Kecamatan Pinggir	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	21.500.000,00	(2.500.000,00)
Jumlah	37.124.316.299,00	10.896.502.523,00	29,35	10.867.289.576,00	29.212.947,00

5. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
70.000.000,00	48.628.000,00	69,47	613.960.614,00	(565.332.614,00)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp48.628.000,00 atau 69,47% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp565.332.614,00 atau 92,08 realisasi TA. 2022 sebesar Rp613.960.614,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.61 Belanja Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	48.628.000,00	69,47	0,00	48.628.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	613.960.614,00	(613.960.614,00)
Jumlah	70.000.000,00	48.628.000,00	69,47	613.960.614,00	(565.332.614,00)

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.62 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00	38.628.000,00	96,57	0,00	38.628.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	613.960.614,00	(613.960.614,00)
Jumlah	70.000.000,00	48.628.000,00	69,47	613.960.614,00	(565.332.614,00)

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.087.247.787,00	13.022.550,00	0,42	0,00	13.022.550,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama TA 2023 adalah sebesar Rp13.022.550,00 atau 0,42% dari anggarannya sebesar Rp3.087.247.787,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.022.550,00 jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.3. Transfer

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
682.567.067.181,00	607.113.713.230,00	88,95	508.249.776.726,00	98.863.936.504,00

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkalis tahun selama 2023 adalah sebesar Rp607.113.713.230,00 atau 88,95% dari nilai anggaran sebesar Rp682.567.067.181,00. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp508.249.776.726,00 mengalami kenaikan sebesar Rp98.863.936.504,00 atau 19,45% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.63 Transfer

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	c=b/a	d	e=b-d
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.818.526.500,00	12.818.526.500,00	100,00	11.024.106.888,00	1.794.419.612,00
Transfer Bantuan Keuangan	669.748.540.681,00	594.295.186.730,00	88,73	497.225.669.838,00	97.069.516.892,00
Jumlah	682.567.067.181,00	607.113.713.230,00	88,95	508.249.776.726,00	98.863.936.504,00

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
12.818.526.500,00	12.818.526.500,00	100,00	11.024.106.888,00	1.794.419.612,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama TA 2023 adalah sebesar Rp12.818.526.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp12.818.526.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.794.419.612,00 atau 0,16% dibandingkan realisasi TA 2022 yang berjumlah Rp11.024.106.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	10.550.407.500,00	10.550.407.500,00	100,00	8.925.199.999,00	1.625.207.501,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.268.119.000,00	2.268.119.000,00	100,00	2.098.906.889,00	169.212.111,00
Jumlah	12.818.526.500,00	12.818.526.500,00	100,00	11.024.106.888,00	1.794.419.612,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
669.748.540.681,00	594.295.186.730,00	88,73	497.225.669.838,00	97.069.516.892,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama selama TA 2023 adalah sebesar Rp594.295.186.730,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp669.748.540.681,00 mengalami kenaikan sebesar Rp97.069.516.892,00 atau 19,52% dibandingkan realisasi TA 2022 yang berjumlah Rp497.225.669.838,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa -ADD se-Kabupaten Bengkalis	403.259.087.681,00	330.807.666.274,00	82,03	239.820.514.541,00	90.987.151.733,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa -DD se-Kabupaten Bengkalis	130.489.453.000,00	129.623.338.071,00	99,34	127.024.597.939,00	2.598.740.132,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (BERMASA)	136.000.000.000,00	133.864.182.385,00	98,43	130.380.557.358,00	3.483.625.027,00
Jumlah	669.748.540.681,00	594.295.186.730,00	88,73	497.225.669.838,00	97.069.516.892,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu Selatan terealisasi sebesar Rp330.807.666.274,00 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp265.010.721.747,- Kurang Salur ADD 2022 sebesar Rp1.197.866.459,00 dan Tunda Bayar ADD 2017 sebesar Rp64.599.078.068,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tunda Bayar Tahun 2017 Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN se-Kabupaten Bengkulu Selatan terealisasi sebesar Rp129.623.338.071,00 berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp133.864.182.385,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 373/KPTS/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
(293.268.675.966,00)	(205.735.040.008,66)	70,15	(887.110.506.098,58)	681.375.466.089,92

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp205.735.040.008,66 tersebut merupakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2023 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp4.021.936.083.669,39 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer TA 2023 sebesar Rp4.227.671.123.678,05.

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
293.268.675.966,00	293.406.324.261,33	100,05	1.180.379.182.064,91	(886.972.857.803,58)

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2023 sebesar Rp293.406.324.261,33 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu atau akhir tahun 2022 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Tabel 5.66 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	293.268.675.966,00	293.268.675.966,33	100,00	1.179.959.349.062,91	(886.690.673.096,58)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	137.648.295,00	0,00	419.833.002,00	(282.184.707,00)
Jumlah	293.268.675.966,00	293.406.324.261,33	100,05	1.180.379.182.064,91	(886.972.857.803,58)

Tabel 5.67 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman berdasarkan SKPD

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	37.969.223,00	0,00	26.363.633,00	11.605.590,00
Dinas Perikanan	0,00	1.272.726,00	0,00	1.090.908,00	181.818,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	0,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	48.406.346,00	0,00	332.378.461,00	(283.972.115,00)
Jumlah	0,00	137.648.295,00	0,00	419.833.002,00	(282.184.707,00)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp137.648.295,00 merupakan pengembalian pokok atas Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 5.68 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.6. SiLPA

Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	87.671.284.252,67	0,00	293.268.675.966,33	(205.597.391.713,66)

Jumlah SiLPA sebesar Rp87.671.284.252,67 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2023 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp4.315.342.407.930,720 sementara total realisasi pengeluaran TA 2023 sebesar Rp4.227.671.123.678,05.

Tabel 5.69 SiLPA

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Daerah	4.544.704.295.766,00	4.021.936.083.669,39	88,50	3.329.414.487.853,30	692.521.595.816,09
Belanja dan Transfer Daerah	4.837.972.971.732,00	4.227.671.123.678,05	87,39	4.216.524.993.951,88	11.146.129.726,17
Surplus/ (Defisit): 1-2	(293.268.675.966,00)	(205.735.040.009)	70,15	(887.110.506.098,58)	681.375.466.089,92
Penerimaan Pembiayaan	293.268.675.966,00	293.406.324.261,33	100,05	1.180.379.182.064,91	(886.972.857.803,58)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto : 4-5	293.268.675.966,00	293.406.324.261,33	100,05	1.180.379.182.064,91	(886.972.857.803,58)
SILPA (SIKPA) 3+6	0,00	87.671.284.252,67	0,00	293.268.675.966,33	(205.597.391.713,66)

Jumlah SiLPA selama TA 2023 sebesar Rp87.671.284.252,67 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp205.597.391.713,66 atau 70,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp293.268.675.966,33. Realisasi SiLPA tahun 2023 sebesar 87.671.284.252,67 dibandingkan dengan SiLPA 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.70 Rincian SiLPA

Uraian	2023	2022	
Kas di BUD	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52	332,03
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.400.263,00	3.540.999.407,00	6.509,16
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	13.329.000,00	1.179.559,00	8,85



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas di Bendahara BLUD	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66	391,11
Kas di Bendahara BOS	9.912.068,00	21.048.100,00	212,35
Kas Lainnya	940.006.002,00	258.507.223,15	27,50
Jumlah	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33	29,89



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALISCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5. 2. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp293.268.675.966,33, mengalami penurunan sebesar Rp886.690.673.096,58 atau 75,15% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.179.959.349.062,91.

5. 2. 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2023, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp293.268.675.966,33 mengalami penurunan sebesar Rp886.690.673.096,58 atau 75,15% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.179.959.349.062,91.

5. 2. 3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA selama TA 2023 sebesar Rp87.671.284.252,67 mengalami penurunan sebesar Rp205.597.391.713,66 atau 70,11 % jika dibandingkan TA 2022 sebesar Rp293.268.675.966,33.

5. 2. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk Tahun 2023 tidak terdapat koreksi.

5. 2. 5. Saldo Anggaran Lebih selama TA 2023 sebesar Rp87.672.984.252,67 terdiri dari :

Tabel 5. 71 Rincian Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
	Rp	Rp	%
Kas di BUD	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52	(69,88)
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.400.263,00	3.540.999.407,00	(98,46)
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	13.329.000,00	1.179.559,00	1.030,00
Kas di Bendahara BLUD	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66	(74,43)
Kas di Bendahara BOS	9.912.068,00	21.048.100,00	(52,91)
Kas Lainnya	940.006.002,00	258.507.223,15	263,63
Jumlah	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33	861,65

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp87.672.984.252,67.

Penerimaan SAL TA 2023 terdiri dari :

Tabel 5.72 Rincian Penerimaan SAL

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren
Pendapatan Asli Daerah	614.588.429.804,39	349.634.385.373,15	75,78
Pendapatan Transfer	3.407.347.653.865,00	2.979.779.293.522,00	14,35
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	808.958,15	(100,00)
Jumlah	4.021.936.083.669,39	3.329.414.487.853,30	20,80
Belanja Operasi	2.729.054.015.689,05	2.598.560.224.108,88	5,02
Belanja Modal	891.490.372.209,00	1.109.714.993.117,00	(19,66)
Belanja Tidak Terduga	13.022.550,00	0,00	0,00
Transfer	607.113.713.230,00	508.249.776.726,00	19,45
Jumlah	4.227.671.123.678,05	4.216.524.993.951,88	0,26
Penerimaan Pembiayaan	293.406.324.261,33	1.180.379.182.064,91	(75,14)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	293.406.324.261,33	1.180.379.182.064,91	(75,14)

Tabel 5.73 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91	(75,15)
Pendapatan	4.021.936.083.669,39	3.329.414.487.853,30	20,80
Belanja dan Transfer	4.227.671.123.678,05	4.216.524.993.951,88	0,26
Penerimaan Pembiayaan	293.406.324.261,33	1.180.379.182.064,91	(75,14)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33	(70,11)

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 berasal dari:

Tabel 5.74 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren
Realisasi Pendapatan	4.021.936.083.669,39	3.329.414.487.853,30	20,80
Realisasi Belanja dan Transfer	4.227.671.123.678,05	4.216.524.993.951,88	0,26
Penerimaan Pembiayaan	293.406.324.261,33	1.180.379.182.064,91	(75,14)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
SiLPA	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33	(70,11)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 3. PENJELASAN POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

5. 3. 1. Aset

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	9.655.995.052.336,12	9.054.735.127.515,06	601.259.924.821,06

Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.655.995.052.336,12 dan Rp9.054.735.127.515,06 terdiri dari:

Tabel 5. 75 Rincian Aset Kabupaten Bengkulu

	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar	252.957.901.018,74	449.421.333.248,76	-196.463.432.230,02
Investasi Jangka Panjang	1.111.253.806.431,00	517.383.104.479,00	593.870.701.952,00
Aset Tetap	7.739.308.790.905,37	7.522.101.779.551,60	217.207.011.353,77
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	552.474.553.981,01	565.828.910.235,70	-13.354.356.254,69
	9.655.995.052.336,12	9.054.735.127.515,06	601.259.924.821,06

A. Aset Lancar

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	252.957.901.018,74	449.421.333.248,76	(196.463.432.230,02)

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing Rp252.957.901.018,74 dan Rp449.421.333.248,76 terdiri dari:

Tabel 5. 76 Rincian Aset Lancar

	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Kas di Kas Daerah	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52	-194.269.188.674,32
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.400.263,00	3.540.999.407,00	-3.486.599.144,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	124.947.086,03	0,00	124.947.086,03
Kas di Bendahara Penerimaan	13.329.000,00	1.179.559,00	12.149.441,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66	-8.524.116.083,19
Kas di Bendahara BOS	9.912.068,00	21.048.100,00	-11.136.032,00
Kas Lainnya	940.006.002,00	258.507.223,15	681.498.778,85
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	102.773.167.264,45	95.530.271.319,87	7.242.895.944,58

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Retribusi Daerah	6.562.482.884,50	6.345.736.695,50	216.746.189,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.504.772.148,00	7.121.958.022,01	8.382.814.125,99
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	4.346,00	5.051.200.495,00	-5.051.196.149,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	23.735.453.608,51	33.829.083.722,51	-10.093.630.114,00
Piutang Lainnya	13.451.632.620,24	12.781.757.258,24	669.875.362,00
Penyisihan Piutang	-86.804.602.904,41	-79.581.794.870,19	-7.222.808.034,22
Beban Dibayar Dimuka	194.645.833,33	52.207.800,00	142.438.033,33
Persediaan	89.744.113.879,42	75.022.236.839,49	14.721.877.039,93
	252.957.901.018,74	449.421.333.248,76	(196.463.432.230,02)

1. Kas di Kas Daerah

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52	(194.269.188.674,32)

Akun ini merupakan kas sebesar Rp83.725.505.975,20 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan Rp277.994.694.649,52 di Kas Daerah per 31 Desember 2022. Nilai kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Kas di Kas Daerah

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-00180	191.193.845.971,20	278.016.208.149,52
Koreksi Kurang Kesalahan Pencatatan		-21.513.000,00	-21.513.000,00
Kesalahan Kurang Transfer Bank Riau		-500,00	-500,00
Outstanding Desember 2023		-107.459.733.841,00	0,00
Kesalahan Debet Pajak		12.907.345,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		83.725.505.975,20	277.994.694.649,52

Dari tabel diatas pada posisi per 31 Desember 2023 terdapat sisa di Kas Daerah sebesar Rp83.725.505.975,20. Sisa tersebut dapat kami rincikan sebagai berikut:

Sisa DAU yang ditentukan peruntukannya:

- Penggajian PPPK	42.351.726.233,20
- Bidang Pendidikan	6.866.380.022,00
- Bidang Kesehatan	2.151.351.656,00
- Bidang Pekerjaan Umum	590.022.646,00
- Kelurahan	57.534.104,00
Jumlah	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit:

- Bagi Hasil Perkebunan Sawit	22.160.404.000,00
-------------------------------	-------------------

Sisa DAK Non Fisik:

- Tunjangan Profesi Guru PNSD (TW)	3.598.449.600,00
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TW)	849.250.000,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD (Tahap)	11.700.000,00
- BOKKB - BOK (Tahap)	2.392.465.210,00
- BOKKB - BOKB (Tahap)	396.357.610,00
- PK2UKM (Tahap)	13.200.000,00
- Dana Fasilitasi Penanaman Modal (Tahap)	43.587.820,00
- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Tahap)	2.850.855,00
- DTPHP(DKP)	79.459.584,00

Sisa DAK Fisik:

Bidang Pendidikan	
- Sub Bidang Pendidikan PAUD	70.000,00
- Sub Bidang Pendidikan SD	313.000,00
Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
- Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	2.160.383.635,00

JUMLAH**83.725.505.975,20**

Terjadinya perbedaan saldo Rekening Koran Bank Riau dengan Saldo Pembukuan karena adanya:

- Kurang Transfer untuk Nomor SP2D 001160 Tanggal 16 Desember 2022	(500)
- Salah setor Dana BOS Th 2021 SD IT Al Huda Duri	(21.513.000)
- Outstanding SP2D Desember 2023	(107.459.733.841)
- Kesalahan Debet Pajak	12.907.345
	(107.468.339.996,00)

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 78 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	278.016.208.149,52		278.016.208.149,52
Pendapatan 2023	3.611.091.099.834,53		3.889.107.307.984,05
Setoran UYHD 2023 (Jasa Giro)	14.143.934.499,00		3.903.251.242.483,05
Belanja (SP2D)		3.823.184.859.227,00	80.066.383.256,05
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	1.179.559,00		80.067.562.815,05
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	3.540.999.407		83.608.562.222,05
Kas Lainnya (DINKES)	808.958,15		83.609.371.180,20
Pengembalian Dobel Posting SP2D Gaji Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanggal 13 Juni 2023	235.216.485,00		83.844.587.665,20

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bergulir SKPD	137.648.295,00		83.982.235.960,20
Pengembalian Pajak CV Paku Bangun Jaya	2.023.500,00	2.023.500,00	83.982.235.960,20
Dobel Posting Gaji DLH (SP2D Tanpa IWP)	-	234.952.300,00	83.747.283.660,20
Dobel Posting Gaji DLH (Total IWP)		31.467.168,00	83.715.816.492,20
Kesalahan Debet Pajak CV Titah Paduka	1.293.243,00	1.293.243,00	83.715.816.492,20
Pengembalian Dobel Posting SP2D Gaji Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	31.202.983,00		83.747.019.475,20
Kelebihan posting SP2D Nomor 09.01/04.0/000051/LS Pada tanggal 11 Desember, dan kelebihan tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 12 Desember	45.000,00	45.000,00	83.747.019.475,20
Kelebihan Posting SP2D	23.400.000,00	23.400.000,00	83.747.019.475,20
Kesalahan Debet Pajak		12.907.345,00	83.734.112.130,20
Outstanding SP2D Desember		-107.459.733.841,00	191.193.845.971,20
Jumlah	3.907.225.059.913,20	3.716.031.213.942,00	191.193.845.971,20

Saldo kas pada Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2023 sebesar Rp191.193.845.971,20

Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 79 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri (PFK) Cab. Bengkulu

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PFK	202.076.758.790,00	0,00	202.076.758.790,00
Pengeluaran PFK	0,00	202.076.758.790,00	0,00
	202.076.758.790,00	202.076.758.790,00	-

Untuk melihat rincian Kas di Kasda dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Kasda**2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
54.400.263,00	3.540.999.407,00	-3.486.599.144,00

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 80 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	3.540.888.407,00	-3.540.888.407,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	11.000,00	-11.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	263,00	0,00	263,00
Badan Pendapatan Daerah	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Kecamatan Siak Kecil	30.400.000,00	100.000,00	30.300.000,00
Jumlah	54.400.263,00	3.540.999.407,00	-3.486.599.144,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp263,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp24.000.000 dan Kecamatan Siak Kecil sebesar Rp30.400.000,00, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Tahun 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada SKPD yang bersangkutan.

Untuk melihat rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	124.947.086,03	0,00	124.947.086,03

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp124.947.086.03. dan 31 Desember 2022 Sebesar Rp0,00. Kenaikan saldo tersebut merupakan pajak PPN dan PPh atas belanja di tahun 2023 yang hingga akhir 2023 belum dibayar/disetor.

4. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	13.329.000,00	1.179.559,00	12.149.441,00

Akun ini merupakan saldo kas yang ada dalam pengelolaan bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.179.559,00	-1.179.559,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.329.000,00	0,00	13.329.000,00
Jumlah	13.329.000,00	1.179.559,00	12.149.441,00

Terhadap saldo Kas di Bendahara Penerimaan di atas, masing-masing SKPD telah melakukan penyetoran dengan rincian sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 82 Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per SKPD

SKPD	Jumlah	Rincian Penyetoran	Tanggal Setor
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.329.000,00	13.329.000,00	12 Januari 2024
Jumlah	13.329.000,00	13.329.000,00	

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada SKPD yang bersangkutan.

5. Kas di Bendahara JKN

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Kas di Bendahara JKN merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2023 yang merupakan dana yang masih berada di rekening maupun tangan Bendahara Penerimaan JKN pada FKTP - UPT Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Pada Tahun 2023, Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

6. Kas di BLUD

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66	(8.524.116.083,19)

Kas di BLUD merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2023 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Pada Tahun 2022, Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 5. 83 Rincian Kas di BLUD per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	1.153.899.984,10	3.895.605.133,10	(2.741.705.149,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	719.685.807,37	7.019.066.471,56	(6.299.380.664,19)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	1.054.545.153,00	537.575.423,00	516.969.730,00
Jumlah	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66	(8.524.116.083,19)
SKPD	Kas Di Bank	Kas Tunai	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	1.132.060.393,10	21.839.591,00	1.153.899.984,10
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	656.823.996,37	62.861.811,00	719.685.807,37
Dinas Kesehatan	1.054.545.153,00	0,00	1.054.545.153,00
Jumlah	2.843.429.542,47	84.701.402,00	2.928.130.944,47

Kas Tunai BLUD yang terdapat pada RSUD Kabupaten Bengkalis Sebesar Rp21.839.591,00 dan RSUD Kecamatan Mandau Sebesar Rp62.861.811,00 merupakan uang yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan, yang mana sampai dengan akhir tahun 2023 belum disetor ke Bendahara Pengeluaran BLUD.

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

Tabel 5. 84 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	3.895.605.133,10	0,00	3.895.605.133,10
Pendapatan BLUD	56.508.713.106,00	0,00	60.404.318.239,10
Belanja BLUD	0,00	59.250.418.255,00	1.153.899.984,10
Jumlah	60.404.318.239,10	59.250.418.255,00	1.153.899.984,10

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat pada :

Tabel 5. 85 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	21.839.591,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00086	138.096.919,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00087	0,00
4	Bank BRI Cabang Bengkalis	18901000921307	993.963.438,10
5	Kesalahan Bank		36,00
	Jumlah		1.153.899.984,10

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Tabel 5. 86 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	7.019.066.471,56	0,00	7.019.066.471,56
Pendapatan BLUD	73.406.990.149,86	0,00	80.426.056.621,42

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja BLUD	0,00	79.706.370.814,05	719.685.807,37
Jumlah	80.426.056.621,42	79.706.370.814,05	719.685.807,37

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau terdapat pada:

Tabel 5. 87 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	62.861.811,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00006	0,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00034	409.789.540,45
4	Bank BRI Cabang Duri Kota	56001000834306	247.034.455,92
	Jumlah		719.685.807,37

Kas BLUD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Tabel 5. 88 Mutasi Kas BLUD di Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	537.575.423,00	0,00	537.575.423,00
Pendapatan BLUD	27.917.105.561,00	0,00	28.454.680.984,00
Belanja BLUD	0,00	27.400.135.831,00	1.054.545.153,00
Jumlah	28.454.680.984,00	27.400.135.831,00	1.054.545.153,00

Adapun Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terdapat pada:

Tabel 5. 89 Rincian Kas BLUD di Dinas Kesehatan

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	-
2	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	8-200-351-084	304.692.711,00
3	UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	8-200-351-083	36.185.028,00
4	UPT PUSKESMAS SELAT BARU	8-200-35-1085	186.158.315,00
5	UPT PUSKESMAS TELUK PAMBANG	8-200-351-087	1.848.912,00
6	UPT PUSKESMAS SEI. PAKNING	8-200-351-241	43.742.586,00
7	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	8-200-351-242	31.685.403,00
8	UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	8-200-351-243	26.021.953,00
9	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	104-0-201291	133.695.247,00
10	UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	104-0-201290	2.975.000,00
11	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	8-200-351-086	32.371.895,00
12	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	8-200-351-225	10.813.872,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

13	UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	8-200-351-222	50.146.363,00
14	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	8-200-351-224	30.201.314,00
15	UPT PUSKESMAS PINGGIR / SEBANGA	8-200-351-226	19.135.014,00
16	UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	8-200-351-221	2.039.526,00
17	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	8-200-351-227	121.294.997,00
18	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	8-200-351-225	14.872.313,00
19	UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	8-200-351-223	6.664.704,00
	JUMLAH		1.054.545.153,00

7. Kas di Bendahara Dana BOS

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	9.912.068,00	21.048.100,00	-11.136.032,00

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2023 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 90 Rincian Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dana BOS Reguler / 392 Sekolah	9.351.768,00	20.487.800,00	-11.136.032,00
Dana BOS Afirmasi / 0 Sekolah	-	-	0,00
Dana BOS Kinerja / 0 Sekolah	-	-	0,00
Jumlah	9.351.768,00	20.487.800,00	-11.136.032,00

Tabel 5. 91 Rincian Kas di Bendahara BOS (Jasa Giro)

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Giro	560.300,00	560.300,00	0,00
Jumlah	560.300,00	560.300,00	0,00

Tabel 5. 92 Rincian Kas di Bendahara BOS Per Sekolah

No	Keterangan	2023	2022	Kenaikan/(Penurunan)
1	SDN 2 BENGKALIS	0,00	634.773,00	-634.773,00
2	SDN 3 BENGKALIS	0,00	507.693,00	-507.693,00
3	SDN 8 BENGKALIS	0,00	182.448,00	-182.448,00
4	SDN 11 BENGKALIS	0,00	50.000,00	-50.000,00
5	SDN 13 BENGKALIS	16.240,00	16.240,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6	SDN 18 BENGKALIS	0,00	47.550,00	-47.550,00
7	SDN 21 BENGKALIS	0,00	297.247,00	-297.247,00
8	SDN 22 BENGKALIS	0,00	170.328,00	-170.328,00
9	SDN 23 BENGKALIS	158.856,00	134.366,00	24.490,00
10	SDN 30 BENGKALIS	0,00	888.239,00	-888.239,00
11	SDN 34 BENGKALIS	0,00	303.000,00	-303.000,00
12	SDN 40 BENGKALIS	0,00	372,00	-372,00
13	SDN 44 BENGKALIS	0,00	251.695,00	-251.695,00
14	SDN 46 BENGKALIS	0,00	60.000,00	-60.000,00
15	SDN 55 BENGKALIS	0,00	170.665,00	-170.665,00
16	SMPN 11 BENGKALIS	0,00	99.000,00	-99.000,00
17	SDN 4 BANTAN	0,00	123.500,00	-123.500,00
18	SDN 7 BANTAN	0,00	3.000,00	-3.000,00
19	SDN 8 BANTAN	33.000,00	138.000,00	-105.000,00
20	SDN 15 BANTAN	0,00	576.184,00	-576.184,00
21	SDN 23 BANTAN	0,00	3.000,00	-3.000,00
22	SMPN 3 BUKIT BATU	0,00	75.500,00	-75.500,00
23	SMPN 5 MANDAU	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
24	SDN 3 BATHIN SOLAPAN	0,00	97.500,00	-97.500,00
25	SDN 12 BATHIN SOLAPAN	0,00	57.500,00	-57.500,00
26	SDN 6 PINGGIR	93.672,00	0,00	93.672,00
27	SMPN 1 PINGGIR	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
28	SDN 33 RUPAT	0,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
29	SMPN 5 RUPAT	0,00	3.600.000,00	-3.600.000,00
30	SDN 10 RUPAT UTARA	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
Jumlah		9.351.768,00	20.487.800,00	(11.136.032,00)

8. Kas Lainnya

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
940.006.002,00	258.507.223,15	681.498.778,85

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp940.006.002,00 merupakan saldo yang terdapat di rekening penampung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebesar Rp257.698.265,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bengkalis, yang mana saldo kas tersebut merupakan sisa dana BOK yang pegang oleh Bendahara Puskesmas sebesar Rp682.307.737,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan saldo kas lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp682.307.737,00 yang merupakan saldo atas dana BOK. Sedangkan saldo kas yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan saldo tahun sebelumnya yang sampai dengan akhir tahun 2023 belum ada penyetoran karena perlu ditelusuri lebih lanjut, karena penyetorannya sesuai nama (*by name*) yang melakukan pembayaran. Dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5. 93 Rincian Saldo Kas Lainnya

No.	SKPD	No. Rekening Penampung	Nama Bank	Nilai
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			682.307.737,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	108-03-17190	Bank Riau Kepri	205.705.035,00
		108-03-00571	Bank Riau Kepri	51.993.230,00
Jumlah				940.006.002,00

9. Piutang

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
75.417.555.800,62	81.130.420.442,94	(5.712.864.642,32)

Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp61.730.013.987,62 dan Rp81.130.420.442,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Rincian Piutang

Jenis Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	102.773.167.264,45	95.530.271.319,87	7.242.895.944,58
Piutang Retribusi Daerah	6.562.482.884,50	6.345.736.695,50	216.746.189,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.504.772.148,00	7.121.958.022,01	8.382.814.125,99
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	4.346,00	5.051.200.495,00	-5.051.196.149,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	23.735.453.608,51	33.829.083.722,51	-10.093.630.114,00
Piutang Lainnya	13.451.632.620,24	12.781.757.258,24	669.875.362,00
Penyisihan Piutang	-86.804.602.904,41	-79.581.794.870,19	-7.222.808.034,22
Beban Dibayar Dimuka	194.645.833,33	52.207.800,00	142.438.033,33
	75.417.555.800,62	81.130.420.442,94	(5.712.864.642,32)

a) Piutang Pajak Daerah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
102.773.167.264,45	95.530.271.319,87	7.242.895.944,58

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Akun piutang pajak daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Mutasi Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang	Saldo Awal 2023	01 Jan	Mutasi 2023	Saldo Akhir 2023
Pajak Hiburan		0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel		709.779.712,70	796.049.431,00	1.505.829.143,70
Pajak Restoran		425.775.928,00	273.298.015,00	699.073.943,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN		289.822.476,24	-13.040.277,42	276.782.198,82
Pajak Sarang Burung Walet		84.085.000,00	0,00	84.085.000,00
Pajak Air Bawah Tanah		45.752.956,60	48.856.848,00	94.609.804,60
Pajak PBB P2		93.866.608.138,00	6.136.674.268,00	100.003.282.406,00
Pajak Reklame		108.447.108,33	1.057.660,00	109.504.768,33
Jumlah	95.530.271.319,87		7.242.895.944,58	102.773.167.264,45

b) Piutang Retribusi Daerah

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
6.562.482.884,50	6.345.736.695,50	216.746.189,00

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen penetapan retribusi lainnya. Adapun rincian piutang retribusi daerah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Mutasi Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang	Saldo Awal 2023	01 Jan	Mutasi 2023	Saldo Akhir 2023
Retribusi Izin Gangguan / HO Golongan		3.002.227.945,50	0,00	3.002.227.945,50
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		1.163.725.500,00	90.250.000,00	1.253.975.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar		11.700.000,00	-250.000,00	11.450.000,00
Retribusi Limbah Cair		3.517.300,00	0,00	3.517.300,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		806.596.872,00	76.046.189,00	882.643.061,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		572.200.000,00	50.700.000,00	622.900.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jasa Umum Pasien 2011	12.706.150,00	0,00	12.706.150,00
BPJS Kesehatan	280.259.100,00	0,00	280.259.100,00
BPJS Ketenagakerjaan	2.803.828,00	0,00	2.803.828,00
Jumlah	6.345.736.695,50	216.746.189,00	6.562.482.884,50

Untuk Piutang Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusinya adalah sebagai berikut :

Retribusi HO Golongan

Tabel 5. 97 Rincian Piutang Retribusi HO Golongan

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00
- Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50
Jumlah	3.002.227.945,50

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tabel 5. 98 Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.253.975.500,00
Jumlah	1.253.975.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 5. 99 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.450.000,00
Jumlah	11.450.000,00

Retribusi Limbah Cair

Tabel 5. 100 Rincian Piutang Retribusi Limbah Cair

- Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00
Jumlah	3.517.300,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 5. 101 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
- Dinas Perhubungan	490.000.000,00
Jumlah	490.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tabel 5. 102 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- Dinas Perhubungan	882.643.061,00
Jumlah	882.643.061,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**Tabel 5. 103 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

- Dinas Perhubungan	622.900.000,00
Jumlah	622.900.000,00

Jasa umum Pasien 2011**Tabel 5. 104 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum Pasien 2011**

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12.706.150,00
Jumlah	12.706.150,00

BPJS Kesehatan**Tabel 5. 105 Rincian Piutang Retribusi BPJS Kesehatan**

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	280.259.100,00
Jumlah	280.259.100,00

BPJS Ketenagakerjaan**Tabel 5. 106 Rincian Piutang Retribusi BPJS Ketenagakerjaan**

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	2.803.828,00
Jumlah	2.803.828,00

Jenis Piutang Retribusi Berdasarkan SKPD terdiri dari :

Tabel 5. 107 Rincian Piutang Retribusi per SKPD

Piutang Retribusi	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.995.543.061,00	1.868.796.872,00	126.746.189,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.265.425.500,00	1.175.425.500,00	90.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Jumlah	6.562.482.884,50	6.345.736.695,50	216.746.189,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan Surat Ketetapan besarnya retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 oleh pelanggan kepada pengelola pendapatan retribusi.

Untuk rincian Piutang retribusi per SKPD dapat dilihat pada:

Lampiran Piutang Retribusi

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	15.504.772.148,00	7.121.958.022,01	8.382.814.125,99

Akun piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang BLUD yang merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Sebesar Rp.4.478.053.925,00, Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Sebesar Rp.10.848.569.523,00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp178.148.700,00. Adapun rincian piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu

Tabel 5. 108 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
BPJS	4.407.677.925,00	3.157.599.800,00	1.250.078.125,00
Ambulance BPJS	70.376.000,00	70.376.000,00	0,00
Jamkesda Meranti	0,00	106.547.619,00	-106.547.619,00
Covid-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.478.053.925,00	3.334.523.419,00	1.143.530.506,00

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Tabel 5. 109 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Jamkesda Siak	67.461.900,00	0,00	67.461.900,00
Jampersal Siak	0,00	0,00	0,00
Jampersal Rohil	0,00	7.428.909,00	-7.428.909,00
BPJS	5.499.284.623,00	3602770300,00	1.896.514.323,00
Covid	5.281.823.000,00	105.762.000,00	5.176.061.000,00
Sewa ATM BRI	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.848.569.523,00	3.715.961.209,00	7.132.608.314,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5. 110 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Remunerasi Dana TDF	0,00	71.473.394,01	-71.473.394,01
Jumlah	0,00	71.473.394,01	-71.473.394,01

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan**Tabel 5. 111 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu**

No.	Nama Puskesmas /	Jenis Piutang	Nilai	Total
1	Puskesmas Lubuk Muda			49.520.040,00
	- Rawat Inap	Jasa Pelayanan	14.197.100,00	
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	12.000.000,00	
	- ANC	Jasa Pelayanan	2.060.000,00	
	- KB	Jasa Pelayanan	2.420.000,00	
	- Pelayanan Rujukan Ambulance	Jasa Pelayanan	18.842.940,00	
2	Puskesmas Pematang Duku			8.012.300,00
	- Rawat Inap	Jasa Pelayanan	1.440.000,00	
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	3.040.000,00	
	- Jasa ANC	Jasa Pelayanan	528.000,00	
	- PNC	Jasa Pelayanan	256.000,00	
	- KB	Jasa Pelayanan	384.000,00	
	- Pelayanan Rujukan Ambulance	Jasa Pelayanan	213.120,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	2.151.180,00	
3	Puskesmas Sungai Pakning			11.214.870,00
	- Rawat Inap	Jasa Pelayanan	2.400.000,00	
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	1.280.000,00	
	- Jasa ANC	Jasa Pelayanan	108.000,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	7.426.870,00	
4	Puskesmas Tanjung Medang			14.394.200,00
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	11.515.360,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	2.878.840,00	
5	Puskesmas Tenggayun			6.597.100,00
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	5.277.680,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	1.319.420,00	
6	Puskesmas Teluk Lecah			27.569.200,00
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	20.800.000,00	
	- Jasa ANC	Jasa Pelayanan	864.000,00	
	- KB	Jasa Pelayanan	396.000,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	5.509.200,00	
7	Puskesmas Bengkulu			4.797.100,00
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	3.840.000,00	
	- Operasional Kantor	Operasional	957.100,00	
8	Puskesmas Pambang			12.945.300,00
	- Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	12.945.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

9	Puskesmas Serai Wangi		26.345.450,00
-	Rawat Inap	Jasa Pelayanan	2.640.000,00
-	Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	7.040.000,00
-	ANC	Jasa Pelayanan	3.744.000,00
-	KB	Jasa Pelayanan	2.352.000,00
-	Pelayanan Rujukan Ambulance	Jasa Pelayanan	2.868.720,00
-	Operasional Kantor	Operasional	7.700.730,00
10	Puskesmas Serai Wangi		16.753.140,00
-	Rawat Inap	Jasa Pelayanan	4.200.000,00
-	Jasa Persalinan	Jasa Pelayanan	4.640.000,00
-	Operasional Kantor	Operasional	7.913.140,00
Jumlah			178.148.700,00
			178.148.700,00

d) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	4.346,00	5.051.200.495,00	-5.051.196.149,00

Akun piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan selisih antara surat ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan dana yang telah disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.346,00 dan Rp5.051.200.495,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	1.793,00	19.155,00	-17.362,00
DBH Pajak Penghasilan	817,00	0,00	817,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	821,00	0,00	821,00
DBH CTH	155,00	19.155,00	-19.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	2.553,00	5.051.181.340,00	-5.051.178.787,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	1.493,00	0,00	1.493,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	610,00	0,00	610,00
DBH SDA Kehutanan	450,00	5.051.181.340,00	-5.051.180.890,00
DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.346,00	5.051.200.495,00	-5.051.196.149,00

Tabel 5. 113 Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Saldo Awal	5.051.200.495,00	0,00	5.051.200.495,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH Pajak Penghasilan	944.532.817,00	944.532.000,00	5.051.201.312,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	215.686.821,00	215.686.000,00	5.051.202.133,00
DBH CHT	0,00	19.000,00	5.051.183.133,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	121.307.592.493,00	121.307.591.000,00	5.051.184.626,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	3.320.371.539,00	3.582.514.000,00	4.789.042.165,00
DBH SDA Kehutanan	284.901.181,00	5.073.939.000,00	4.346,00
DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	4.346,00
Jumlah	131.124.285.346,00	131.124.281.000,00	4.346,00

Piutang DBH Pusat mengalami perubahan yang disebabkan terbitnya PMK Nomor 108/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2022 dan KMK NOMOR 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2023.

e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	23.735.453.608,51	33.829.083.722,51	-10.093.630.114,00

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi disajikan berdasarkan saldo bagi hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dan Rp23.735.453.608,51 dan Rp33.829.083.722,51. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

Jenis Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.787.561.948,00	10.955.683.727,00	831.878.221,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	6.186.496.652,51	5.648.471.437,51	538.025.215,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	5.565.123.850,00	17.039.047.646,00	-11.473.923.796,00
Pajak Air Permukaan (Pajak AP)	105.508.626,00	95.118.380,00	10.390.246,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	86.712.532,00	86.712.532,00	0,00
Jumlah	23.735.453.608,51	33.829.083.722,51	10.093.630.114,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.735.453.608,51 berdasarkan rincian piutang dari Dinas Pendapatan Daerah. Terdapat saldo awal sebesar Rp33.829.083.722,51. Pada awal tahun terdapat penambahan koreksi Piutang berdasarkan SK Gubernur Riau (Gubri) No. KPTS.588/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp4.439.916.074,00 dan terdapat Pembayaran Piutang berdasarkan SK Gubri No. KPTS.588/V/2023 dan SK Gubri No. KPTS.1801/XII/2022 Tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp25.966.365.869,00 dan SK Gubri No.KPTS.467/III/2023 TANGGAL 13 MARET 2023 sebesar Rp12.211.871.395,00 dan Penambahan Piutang Berdasarkan SK Gubri No.KPTS 7726/XII/S023 TANGGAL 20 DESEMBER 2023 sebesar Rp9.990.983.313,51. serta koreksi audited penambahan piutang Berdasarkan SK Gubri No.KPTS 359/IV/2024 TANGGAL 03 APRIL 2024 sebesar Rp13.653.707.763,00.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, Pasal 26 dengan pembagian 70% Provinsi Riau dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Pendapatan Lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan, Pendapatan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis No 13/PK/III/2011 dan No 03/PJJ-HK/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pembagian Provinsi Riau 60% dan Kabupaten/Kota 40%.

f) Piutang Lainnya

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	13.451.632.620,24	12.781.757.258,24	669.875.362,00

Akun piutang lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mempunyai saldo sebesar Rp13.451.632.620,24 dan Rp12.781.757.258,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD	182.064.000,00	182.064.000,00	0,00
Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD	1.375.373.000,00	1.375.373.000,00	0,00
Piutang dari PT BLJ atas Bagi Hasil Penyediaan Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang	490.180.223,00	490.180.223,00	0,00
Piutang pada PT Tenggau Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Piutang Dana Bantuan Keuangan	1.957.728.969,00	1.287.853.607,00	669.875.362,00
Piutang pada Pihak Ketiga	7.446.286.428,24	7.446.286.428,24	0,00
Piutang Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.451.632.620,24	12.781.757.258,24	669.875.362,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Akun Piutang Lain-lain merupakan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.451.632.620,24 terdiri atas :

Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

Saldo awal piutang penunjang operasi pimpinan DPRD sebesar Rp265.608.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2010 sebesar Rp21.000.000,00, TA 2011 sebesar Rp62.544.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2013 sebesar **Rp182.064.000,00**.

Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD

Saldo awal sebesar Rp2.191.626.000,00 pada tahun anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2009 sebesar Rp576.168.000,00, TA 2011 sebesar Rp30.500.000,00, TA 2012 sebesar Rp109.295.000,00, TA 2013 sebesar Rp72.095.000,00, TA 2014 sebesar Rp28.195.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2014 sebesar **Rp1.375.373.000,00**.

Kewajiban Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Terhadap saldo tersebut telah sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Piutang lain-lain khususnya pengembalian dana belanja operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis TA 2013 antara sub Bagian Keuangan pada Bagian umum sekretariat DPRD dengan sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Desember 2014.

Piutang Bagi Hasil dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) atas keuntungan pengelolaan Jual Beli Listrik dan Pengelolaan PKS dengan Rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2008, PT BLJ berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 07/PJJ-HK/VII/2007 dan atau nomor 002/PPJ-BLJ/LIST/IV/2008 tanggal 2 Januari 2008 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) tentang Bagi Hasil Pembelian/ Penyediaan (Jual Beli Daya) Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menerima pendapatan Bersih sebesar 70% dari hasil penjualan daya listrik yang diterima oleh PT BLJ dan harus dibayarkan oleh PT BLJ paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui penyeteroran langsung ke Kas Daerah. Saldo awal piutang bagi hasil kepada BUMD sebesar Rp1.601.755.223,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.111.575.000,00 sehingga saldo piutang bagi hasil Per 31 Desember 2012 sebesar **Rp490.180.223,00** sesuai berita acara rekonsiliasi realisasi pembayaran piutang lain-lain pada PT. Bumi Laksamana Jaya TA 2012 tanggal 10 Jan 2012 antara PT Bumi Laksamana Jaya dengan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kab. Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang pada PT Tenganau Mandiri

Piutang Kabupaten Bengkalis pada Koperasi Tenganau Mandiri tercatat sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Piutang tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 agustus 2005 sesuai perjanjian kerjasama.

Nomor : 573 /EK /93

Nomor : 21 / KOP-TM / VIII / 2005

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125K/Pid.sus/2014 Tanggal 17 September 2014 JO putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau nomor 05/TIPIKOR/2014/PTR Tanggal 6 Mei 2014 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/TIPIKOR/2013/PN.pbr tanggal 4 Februari 2014, bahwa atas aset-aset pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS)Tenganau mandiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

sehingga ketika Pemda Tidak mau lagi menambah Investasi maka Koperasi mencari kerja sama dengan pihak ketiga untuk menaikkan kapasitas PKS Koperasi menjadi 20 Ton TBS/Jam, maka pada tahun 2010 Koperasi Tenganau Mandiri membuat perjanjian kerja sama dengan PT Tenganau Mandiri Lestari atau disingkat PT TML. Tertuang dalam perjanjian kerja sama BOT (*Built Operational Transfer*) akte Nomor Akte : 04 Tanggal 05 Mei 2010, yang mana didalam perjanjian tersebut fisik Pabrik dikelola oleh PT TML dan akan memberikan laporan setiap bulan kepada Koperasi Tenganau Mandiri, mulai dari laporan Produksi hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Piutang Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus

Sisa Dana BERMASA yang belum disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.957.728.969,00.

Piutang Pada Pihak Ketiga

Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan atau kontraktor) atas pelaksanaan kegiatan TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp7.446.286.428,24. Kelebihan ini timbul akibat adanya perbedaan penetapan hutang yang lebih rendah berdasarkan LHP BPK RI No.52/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dengan SK Bupati Bengkalis No. 171/KPTS/V/2010 tanggal 03 Mei 2010.

10. Penyisihan Piutang

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
(86.804.602.904,41)	(79.581.794.870,19)	(7.222.808.034,22)

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.804.606.504,41 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 116 Rincian Penyisihan Piutang per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkani/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	-523.849.940,00	-438.351.510,00	-85.498.430,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-953.166.985,30	-683.248.267,00	-269.918.718,30
Dinas Kesehatan	-11.477.971,00	0,00	-11.477.971,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-7.446.286.428,24	-7.446.286.428,24	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	-3.517.300,00	-3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	-1.923.361.833,95	-1.459.684.266,73	-463.677.567,22
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-426.426.125,00	-426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-1.162.393.250,00	-1.040.201.300,00	-122.191.950,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-4.047.617.223,00	-4.047.617.223,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	-70.306.505.847,92	-64.036.462.450,22	-6.270.043.397,70
Jumlah	-86.804.602.904,41	-79.581.794.870,19	-7.222.808.034,22

Tabel 5. 117 Rincian Jenis Penyisihan Piutang per SKPD

	Penyisihan Piutang			
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.706.150,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	440.767.790,00	0,00	70.376.000,00
Total				523.849.940,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	283.062.928,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.886.605,00	646.851.702,30	1.365.750,00	0,00
Total				953.166.985,30
Dinas Kesehatan				
Piutang Non Kapitasi	333.521,00	11.144.450,00	0,00	0,00
Total				11.477.971,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.446.286.428,24
Total				7.446.286.428,24
Dinas Lingkungan Hidup				
Piutang Retribusi Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	3.517.300,00
Total				3.517.300,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perhubungan				
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	72.620,75	3.674.816,20	24.656.352,00	782.058.045,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	622.900.000,00
Total				1.923.361.833,95
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Piutang Retribusi HO Golongan	0,00	0,00	0,00	426.426.125,00
Total				426.426.125,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	87.750,00	4.705.000,00	43.225.000,00	1.102.925.500,00
Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00
Total				1.162.393.250,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.047.617.223,00
Total				4.047.617.223,00
Badan Pendapatan Daerah				
Piutang Pajak	39.682.742,04	1.530.525.456,20	12.533.736.608,25	53.626.759.220,93
Piutang Retribusi HO Golongan	0,00	0,00	0,00	2.575.801.820,50
Total				70.306.505.847,92
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				86.804.602.904,41

11. Beban Dibayar Dimuka

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	194.645.833,33	52.207.800,00	142.438.033,33

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Akun Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2023 mempunyai saldo sebesar Rp194.645.833,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 118 Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pemadam Kebakaran	29.333.333,33	28.875.000,00	458.333,33
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	145.312.500,00	0,00	145.312.500,00
Sekretariat Daerah	20.000.000,00	23.332.800,00	-3.332.800,00
Jumlah	194.645.833,33	52.207.800,00	142.438.033,33

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja sewa terhadap pemakaian gedung untuk UPT. Kecamatan Mandau pada bulan Desember 2023 sebesar Rp32.000.000,00. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 119 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
UPT Kecamatan Mandau (Masa Pembayaran Bulan Desember) Dinas Pemadam Kebakaran	32.000.000,00	2.666.666,67	29.333.333,33
Jumlah	32.000.000,00	2.666.666,67	29.333.333,33

Beban dibayar dimuka pada Rumah Sakit Umum Bengkalis merupakan pembayaran atas sewa satu unit ruko selama 4 (empat) tahun yang digunakan untuk Rumah Dokter terhitung 31 Desember 2023 sebesar Rp145.312.500,00.

Tabel 5. 120 Rincian Beban Dibayar Dimuka Rumah Sakit Umum Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
Sewa 1 (satu) unit ruko untuk Rumah Dokter	145.312.500,00	0,00	145.312.500,00
Jumlah	145.312.500,00	-	145.312.500,00

Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja barang/jasa terhadap Sewa Ruko/Gudang Bagian Umum sebanyak 2 Unit terhitung mulai bulan Mei 2023. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 121 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
Ruko/Gudang Bagian Umum (Masa Pembayaran Bulan Mei)	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00

12. Persediaan

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	89.744.113.879,42	75.022.236.839,49	14.721.877.039,93

Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp89.744.113.879,42 terdiri dari persediaan obat sebesar Rp16.575.211.636,08 dan persediaan non obat sebesar Rp71.497.933.375,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Rincian Persediaan

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Persediaan Obat	16.637.730.969,90	23.948.283.711,45	(7.310.552.741,55)
Persediaan Alat Kesehatan	10.455.513.647,00	11.117.394.791,58	(661.881.144,58)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Persediaan ATK	2.912.850.383,24	2.385.965.917,96	526.884.465,28
Persediaan Barang Cetak	933.434.263,51	1.013.890.549,33	(80.456.285,82)
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	398.864.776,89	139.624.376,18	259.240.400,71
Persediaan Perlengkapan Listrik	79.413.789,00	103.421.887,00	(24.008.098,00)
Persediaan Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.607.000,00	2.207.000,00	2.400.000,00
Persediaan Perabot Kantor	29.528.600,00	-	29.528.600,00
Persediaan Suku Cadang	228.963.427,54	520.419.767,78	(291.456.340,24)
Persediaan Bahan Bakar	41.377.943,75	935.000,00	40.442.943,75
Persediaan Bahan Kimia	1.929.991.557,05	2.623.233.866,45	(693.242.309,40)
Persediaan Hibah pada Pihak Ketiga/ Masyarakat	54.777.641.311,54	30.381.750.531,76	24.395.890.779,78
Persediaan Dalam proses	429.589.980,00	2.221.991.340,00	(1.792.401.360,00)
Persediaan Bahan Baku/Bahan Lainnya	884.606.230,00	563.118.100,00	321.488.130,00
Jumlah	89.744.113.879,42	75.022.236.839,49	14.721.877.039,93

0,00

a) Persediaan Obat

Nilai persediaan obat per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.637.730.969,90 berada pada SKPD:

Tabel 5. 123 Rincian Persediaan Obat per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	8.429.850.172,86	8.370.178.135,48	59.672.037,38
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	3.470.784.131,00	6.589.212.147,00	-3.118.428.016,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	4.667.401.276,04	8.861.164.932,72	-4.193.763.656,68
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.695.390,00	124.135.496,25	-54.440.106,25
Dinas Perikanan	0,00	3.593.000,00	-3.593.000,00
Jumlah	16.637.730.969,90	23.948.283.711,45	-7.310.552.741,55

Terdapat Persediaan Vaksin Pada Dinas Kesehatan Berupa Vaksin Astrazenica @10 Dosis sebanyak 99 Vial, Coronavac @2 Dosis Sebanyak 2.110 Vial dan Moderna @10 Dosis sebanyak 375 Vial yang tidak memiliki nilai

b) Persediaan Alat Kesehatan

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.455.513.647,00 berada pada SKPD:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 124 Rincian Persediaan Alat Kesehatan per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	5.943.234.884,90	10.823.559.246,43	-4.880.324.361,53
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	4.512.278.762,10	293.835.545,15	4.218.443.216,95
Jumlah	10.455.513.647,00	11.117.394.791,58	-661.881.144,58

c) Persediaan ATK

Nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.912.850.383,24 berada pada SKPD:

Tabel 5. 125 Rincian Persediaan ATK per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	2.129.200,00	0,00	2.129.200,00
Dinas Kesehatan	20.017.100,00	4.713.500,00	15.303.600,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	15.590.500,00	1.788.000,00	13.802.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	34.798.693,24	90.526.842,96	-55.728.149,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.741.000,00	927.000,00	4.814.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	777.500,00	1.330.700,00	-553.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.679.100,00	1.588.700,00	90.400,00
Dinas Pemadam Kebakaran	718.000,00	732.700,00	-14.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.006.200,00	1.158.700,00	-152.500,00
Dinas Sosial	0,00	856.400,00	-856.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.492.900,00	1.894.100,00	-401.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	618.000,00	299.800,00	318.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.097.700,00	5.192.100,00	-94.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000,00	525.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.681.928.300,00	2.179.997.500,00	501.930.800,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.985.300,00	3.439.400,00	-1.454.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.200,00	1.188.000,00	-862.800,00
Dinas Perhubungan	83.696.840,00	5.158.100,00	78.538.740,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.042.600,00	2.688.810,00	-646.210,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	579.600,00	504.600,00	75.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.818.000,00	771.900,00	1.046.100,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.225.100,00	720.000,00	505.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.010.600,00	-1.010.600,00
Dinas Perikanan	3.571.500,00	3.408.900,00	162.600,00
Dinas Perkebunan	0,00	26.521.950,00	-26.521.950,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	8.685.944,00	8.102.048,00	583.896,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	47.800,00	293.600,00	-245.800,00
Sekretariat Daerah	6.754.200,00	3.045.865,00	3.708.335,00
Sekretariat DPRD	3.700.400,00	5.058.400,00	-1.358.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	889.000,00	6.349.200,00	-5.460.200,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.699.800,00	817.800,00	882.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.296.106,00	1.296.102,00	4,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	336.000,00	99.800,00	236.200,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.467.500,00	5.322.000,00	-854.500,00
Inspektorat	1.055.000,00	920.000,00	135.000,00
Kecamatan Bengkalis	60.000,00	140.000,00	-80.000,00
Kecamatan Bantan	161.100,00	643.600,00	-482.500,00
Kecamatan Bukit Batu	898.300,00	993.000,00	-94.700,00
Kecamatan Siak Kecil	1.484.700,00	1.932.300,00	-447.600,00
Kecamatan Bandar Laksamana	858.800,00	883.200,00	-24.400,00
Kecamatan Rupert	368.600,00	423.300,00	-54.700,00
Kecamatan Rupert Utara	1.658.700,00	2.072.200,00	-413.500,00
Kecamatan Mandau	2.805.800,00	2.100.300,00	705.500,00
Kecamatan Pinggir	2.500.000,00	2.700.000,00	-200.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	4.394.100,00	4.960.200,00	-566.100,00
Kecamatan Talang Muandau	1.058.600,00	390.500,00	668.100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	306.600,00	479.200,00	-172.600,00
Jumlah	2.912.850.383,24	2.385.965.917,96	526.884.465,28

d) Persediaan Barang Cetak

Nilai persediaan barang cetak per 31 Desember 2023 sebesar Rp933.434.263,51 berada pada SKPD:

Tabel 5. 126 Rincian Persediaan Barang Cetak per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Perubahan (Peningkatan)
Dinas Pendidikan	3.032.000,00	0,00	3.032.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	5.260.000,00	23.262.380,00	-18.002.380,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	32.695.000,00	18.200.000,00	14.495.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	71.224.093,51	121.015.084,33	-49.790.990,82
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000,00	333.000,00	17.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	826.000,00	-826.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	572.800,00	-572.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.809.500,00	1.254.500,00	555.000,00
Dinas Sosial	704.000,00	1.347.500,00	-643.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.533.200,00	3.674.800,00	-1.141.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	715.000,00	515.000,00	200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	786.726.670,00	709.978.150,00	76.748.520,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.144.000,00	1.074.600,00	1.069.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	239.500,00	266.000,00	-26.500,00
Dinas Perhubungan	5.968.500,00	116.955.860,00	-110.987.360,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.138.200,00	300.000,00	838.200,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	652.700,00	819.500,00	-166.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	804.000,00	262.400,00	541.600,00
Dinas Perkebunan	2.070.000,00	1.758.766,00	311.234,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1.236.000,00	1.363.309,00	-127.309,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	93.000,00	150.000,00	-57.000,00
Sekretariat DPRD	489.700,00	1.008.200,00	-518.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.595.400,00	76.300,00	4.519.100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	566.900,00	-566.900,00
Badan Pendapatan Daerah	1.354.200,00	1.354.200,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	440.000,00	240.000,00	200.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	404.700,00	0,00	404.700,00
Inspektorat	1.082.000,00	1.398.400,00	-316.400,00
Kecamatan Bantan	314.000,00	268.000,00	46.000,00
Kecamatan Bukit Batu	846.500,00	233.000,00	613.500,00
Kecamatan Siak Kecil	925.800,00	1.792.200,00	-866.400,00
Kecamatan Rupert	20.000,00	11.100,00	8.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Mandau	1.611.000,00	732.000,00	879.000,00
Kecamatan Talang Muandau	892.200,00	0,00	892.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.063.400,00	2.280.600,00	-1.217.200,00
Jumlah	933.434.263,51	1.013.890.549,33	-80.456.285,82

e) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp398.864.776,89 berada pada SKPD:

Tabel 5. 127 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	382.000,00	6.276.500,00	(5.894.500,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	280.172.576,89	72.690.817,00	207.481.759,89
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.331.000,00	923.000,00	408.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	98.457.000,00	886.200,00	97.570.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	326.000,00	(326.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	206.000,00	(206.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	110.000,00	168.000,00	(58.000,00)
Dinas Sosial	2.038.000,00	3.186.000,00	(1.148.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.505.000,00	(1.505.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	4.964.000,00	(4.964.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	18.000,00	18.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.300,00	169.300,00	-
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.697.000,00	5.206.000,00	(3.509.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	445.000,00	128.000,00	317.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	359.000,00	(359.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	352.000,00	190.000,00	162.000,00
Dinas Perikanan	0,00	1.219.000,00	(1.219.000,00)
Dinas Perkebunan	0,00	17.025.250,00	(17.025.250,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	3.781.000,00	7.667.000,00	(3.886.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.000,00	221.000,00	(196.000,00)
Sekretariat Daerah	4.231.000,00	4.648.909,18	(417.909,18)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat DPRD	3.545.500,00	3.916.000,00	(370.500,00)
Badan Pendapatan Daerah	418.200,00	418.200,00	-
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	204.000,00	(204.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	910.000,00	1.335.000,00	(425.000,00)
Inspektorat	0,00	172.000,00	(172.000,00)
Kecamatan Bengkalis	36.000,00	46.000,00	(10.000,00)
Kecamatan Bantan	210.000,00	210.000,00	-
Kecamatan Bukit Batu	168.000,00	185.000,00	(17.000,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	1.059.000,00	(1.059.000,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	239.000,00	224.000,00	15.000,00
Kecamatan Rupal	0,00	151.000,00	(151.000,00)
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	-
Kecamatan Mandau	0,00	2.853.600,00	(2.853.600,00)
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	-
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	475.000,00	(475.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	129.200,00	392.600,00	-263.400,00
Jumlah	398.864.776,89	139.624.376,18	259.240.400,71

f) Persediaan Perlengkapan Listrik

Nilai persediaan perlengkapan listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.413.789,00 berada pada SKPD:

Tabel 5. 128 Rincian Persediaan Perlengkapan Listrik per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	7.345.000,00	5.873.000,00	1.472.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	53.509.789,00	62.383.003,00	-8.873.214,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.000,00	434.000,00	-299.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	62.700,00	177.000,00	-114.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	188.000,00	139.000,00	49.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	249.000,00	127.000,00	122.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	346.500,00	210.000,00	136.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.961.100,00	3.286.000,00	-324.900,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	800.900,00	632.000,00	168.900,00
Dinas Perhubungan	951.000,00	0,00	951.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	122.500,00	122.500,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	504.000,00	693.600,00	-189.600,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perkebunan	0,00	11.486.500,00	-11.486.500,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.496.900,00	921.500,00	575.400,00
Sekretariat Daerah	5.307.500,00	5.812.284,00	-504.784,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	387.000,00	516.000,00	-129.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.314.300,00	2.789.000,00	-1.474.700,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	57.900,00	92.000,00	-34.100,00
Inspektorat	19.400,00	0,00	19.400,00
Kecamatan Bantan	236.000,00	111.000,00	125.000,00
Kecamatan Bukit Batu	130.000,00	0,00	130.000,00
Kecamatan Siak Kecil	276.300,00	937.100,00	-660.800,00
Kecamatan Mandau	1.059.000,00	2.385.000,00	-1.326.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	154.000,00	450.000,00	-296.000,00
Kecamatan Talang Muandau	1.800.000,00	3.844.400,00	-2.044.400,00
Jumlah	79.413.789,00	103.421.887,00	-24.008.098,00

g) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Nilai persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.607.000,00 berada pada SKPD:

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	180.000,00	0,00	180.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.650.000,00	1.000.000,00	650.000,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	650.000,00	500.000,00	150.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	110.000,00	-110.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
Kecamatan Siak Kecil	11.000,00	187.000,00	-176.000,00
Kecamatan Rupal Utara	180.000,00	150.000,00	30.000,00
Kecamatan Mandau	1.850.000,00	200.000,00	1.650.000,00
Kecamatan Talang Muandau	36.000,00	0,00	36.000,00
Jumlah	4.607.000,00	2.207.000,00	2.400.000,00

h) Persediaan Perabot Kantor

Nilai persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.528.600,00 berada pada SKPD:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Perabot Kantor per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	816.000,00	0,00	816.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.000,00	0,00	36.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	388.000,00	0,00	388.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	6.363.000,00	0,00	6.363.000,00
Dinas Perhubungan	12.425.500,00	0,00	12.425.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	553.400,00	0,00	553.400,00
Dinas Perikanan	943.000,00	0,00	943.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	143.000,00	0,00	143.000,00
Inspektorat	265.000,00	0,00	265.000,00
Kecamatan Bantan	386.000,00	0,00	386.000,00
Kecamatan Siak Kecil	478.000,00	0,00	478.000,00
Kecamatan Rupal	258.000,00	0,00	258.000,00
Kecamatan Mandau	1.610.700,00	0,00	1.610.700,00
Kecamatan Bathin Solapan	162.000,00	0,00	162.000,00
Jumlah	29.528.600,00	0,00	29.528.600,00

i) Persediaan Suku Cadang

Nilai persediaan suku cadang per 31 Desember 2023 sebesar Rp228.963.427,54 berada pada SKPD:

Tabel 5. 131 Rincian Persediaan Suku Cadang per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	210.689.317,54	306.924.067,78	(96.234.750,24)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.274.110,00	199.877.700,00	(181.603.590,00)
Dinas Perkebunan	0,00	13.618.000,00	(13.618.000,00)
Jumlah	228.963.427,54	520.419.767,78	291.456.340,24

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

j) Persediaan Bahan Bakar

Nilai persediaan bahan bakar per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.377.943,75 berada pada SKPD:

Tabel 5. 132 Rincian Persediaan Bahan Bakar per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.877.943,75	0,00	40.877.943,75
Dinas Perikanan	0,00	675.000,00	-675.000,00
Kecamatan Rupa Utara	500.000,00	260.000,00	240.000,00
Jumlah	41.377.943,75	935.000,00	40.442.943,75

k) Persediaan Bahan Kimia

Nilai persediaan bahan kimia per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.929.991.557,05 berada pada SKPD:

Tabel 5. 133 Rincian Persediaan Bahan Kimia per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	973.803.999,00	797.576.697,00	176.227.302,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	801.500,00	0,00	801.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	768.861.808,05	1.737.540.829,45	(968.679.021,40)
Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	83.000,00	(83.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	241.000,00	(241.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312.000,00	312.000,00	-
Dinas Perikanan	22.940.000,00	640.000,00	22.300.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	161.964.250,00	86.580.340,00	75.383.910,00
Kecamatan Talang Muandau	1.308.000,00	260.000,00	1.048.000,00
Jumlah	1.929.991.557,05	2.623.233.866,45	-693.242.309,40

l) Persediaan Hibah

Nilai persediaan yang akan dihibahkan pada masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.777.641.311,54 berada pada SKPD:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 134 Rincian Persediaan Hibah per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	0,00	1.288.591.724,00	(1.288.591.724,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.694.573.855,93	24.413.581.482,15	23.280.992.373,78
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	4.200.398.593,00	2.584.261.193,00	1.616.137.400,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	635.403.828,00	635.403.828,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	644.148.870,00	644.148.870,00	-
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	787.352.730,00	0,00	787.352.730,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.763.434,61	815.763.434,61	-
Jumlah	54.777.641.311,54	30.381.750.531,76	24.395.890.779,78

m) Persediaan Dalam Proses

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp429.589.980,00 berada pada SKPD:

Tabel 5. 135 Rincian Persediaan Dalam Proses per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	429.589.980,00	2.221.991.340,00	-1.792.401.360,00
Jumlah	429.589.980,00	2.221.991.340,00	-1.792.401.360,00

n) Persediaan Bahan Baku/Bahan Lainnya

Nilai Persediaan Bahan Baku/Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp622.044.730,00 Berada pada SKPD:

Tabel 5. 136 Rincian Persediaan Bahan Baku/Bahan Lainnya per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Ketahanan Pangan	620.394.730,00	563.118.100,00	57.276.630,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	226.822.250,00	0,00	226.822.250,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandai	35.739.250,00	0,00	35.739.250,00
Dinas Perikanan	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Jumlah	884.606.230,00	563.118.100,00	321.488.130,00

Rincian Persediaan Per SKPD dapat dilihat pada:

Lampiran Persediaan

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

B. Investasi Jangka Panjang**1. Investasi Non Permanen**

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	30.926.285.784,00	31.385.302.136,00	(459.016.352,00)
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	(30.677.535.784,00)	(31.086.802.136,00)	409.266.352,00
Nilai Bersih	248.750.000,00	298.500.000,00	-49.750.000,00

Akun Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.926.285.784,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.385.302.136,00 merupakan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir, Pinjaman Lunak, *Buffer Stock*, Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan penagihan piutang terhadap investasi non permanen kepada KPKNL untuk diproses lebih lanjut. sampai dengan saat laporan keuangan dibuat investasi non permanen pada Dinas Perikanan sudah dilakukan proses penagihan kepada debitur.

Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SPnPPN-01/PUPNC.03.03/2016 perihal penolakan pengurusan Piutang Negara, proyek P3TP dan PUPR dikeluarkan dari investasi non permanen dikarenakan:

- 1) Tidak adanya kepastian ada dan besarnya piutang negara
- 2) Tidak adanya dokumen yang mendukung dan membuktikan sebagai piutang negara
- 3) Sesuai dengan surat nomor 5.24.3/DISTANNAK/XI/2015/135 tanggal 23 November 2015 terhadap dua proyek tersebut diatas telah dinyatakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Bukan Pinjaman bagi petani tetapi merupakan bantuan saprodi langsung habis pakai kepada petani.

Tabel 5. 137 Rincian Investasi Non Permanen per SKPD

SKPD	Nilai Kotor	Diragukan Tertagih	Nilai Bersih
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.310.767.404,00	(19.310.767.404,00)	0,00
Dinas Perikanan	2.163.432.184,00	(2.163.432.184,00)	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4.235.161.400,00	(3.986.411.400,00)	248.750.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.016.924.796,00	(5.016.924.796,00)	0,00
Pabrik VCO Yayasan Melayu	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00
Jumlah	30.926.285.784,00	(30.677.535.784,00)	248.750.000,00

a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 138 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	19.310.767.404,00	19.366.324.140,00	(55.556.736,00)
Investasi Non Permanen diragukan tertagih	(19.310.767.404,00)	(19.366.324.140,00)	55.556.736,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) rekening penampung yaitu: No.108-0321034, 108-0321046 dan 108-0307740. Saldo pada rekening penampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321034, sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321046 dan sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0307740.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM, Proyek Pengembangan Usaha Koperasi di Kecamatan Bantan dan Rangsang, Proyek Pembangunan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis dan Kegiatan Pengembangan Koperasi Unggulan.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM mengalami penurunan sebesar Rp55.556.736,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman oleh peminjam, yaitu:

1 Koperasi Karya Tani (Ketua; Suratno)	35.257.859,00
2 Pusat Koperasi Pegawai R.I (Drs. Hendra)	909.091,00
3 Perabot Asmita (Para Ahli Waris Aldi)	18.181.818,00
4 Koperasi Mutiara Bantan (Syamsuddin)	1.207.968,00
JUMLAH	55.556.736,00

b) Dinas Perikanan

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perikanan

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	2.163.432.184,00	2.164.704.910,00	-1.272.726,00
Investasi Non Permanen diragukan tertagih	(2.163.432.184,00)	(2.164.704.910,00)	1.272.726,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perikanan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2023 yaitu: No.108-2000231 sebesar Rp0,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan Proyek Pinjaman Lunak Untuk Percepatan Ekonomi Kerakyatan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Jaring Apung.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan mengalami penurunan sebesar Rp1.272.726,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman di Tahun 2023 oleh Tambak Karya/khaidir selaku peminjam.

c) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Investasi non permanen per 31 Desember 2023 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	4.235.161.400,00	4.285.161.400,00	-50.000.000,00
Investasi Non Permanen diragukan tertagih	(3.986.411.400,00)	-3.986.661.400,00	250.000,00
Nilai bersih investasi non permanen	248.750.000,00	298.500.000,00	(49.750.000,00)

Perlu kami informasikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkalis (PPTH) Tahun 2002.

Perlu diinformasikan bahwa nilai investasi non permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan senilai Rp1.995.699.900,- terdapat surat jaminan berupa Surat Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sampai dengan saat ini masih tersimpan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan Kabupaten Bengkalis.

Investasi Non Permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mengalami penurunan sebesar Rp40.000.000,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman di Tahun 2023.

d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	5.016.924.796,00	5.369.111.686,00	(352.186.890,00)
Investasi Non Permanen diragukan tertagih	(5.016.924.796,00)	(5.369.111.686,00)	352.186.890,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perlu kami informasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai 2 (dua) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2023 yaitu: No.108-0317190 sebesar Rp205.705.035,00 dan pada Rekening nomor 108-0300571 sebesar Rp51.993.230,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berasal dari kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kecil Kabupaten Bengkalis dan Proyek Peningkatan Pengembangan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2001, Proyek Pinjaman Lunak untuk Percepatan Ekonomi Tahun 2005 dan Penguatan Modal Usaha Kecil Kec. Pinggir dan Mandau, Penguatan Modal Usaha Kecil Merbau, T. Tinggi dan T. Tinggi Barat, Penguatan Modal Usaha Kecil Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupa dan Rupa Utara.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengalami penurunan sebesar Rp352.186.890,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian, penghapusan bersyarat dan Pengurangan dari Crash Program Keringanan utang (utang Lunas Dari KPKN, dengan perhitungan penurunan sebagai berikut;

1 Koreksi Tambah Piutang	Rp	18.909.892,00
2 Pembayaran/Penegmbalian dana bergulir	Rp	48.406.346,00
3 Penghapusan secara bersyarat (SK Bupati No 881/KPTS/XII/2023)	Rp	227.482.025,00
4 Crash Program Keringanan Utang	Rp	57.388.627,00
JUMLAH	Rp	352.186.890,00

e) Pabrik VCO Yayasan Melayu

Berdasarkan hasil inventarisasi, Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Pabrik VCO Yayasan Melayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Investasi Non Permanen Pabrik VCO Yayasan Melayu

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Investasi Non Permanen diragukan tertagih	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	0,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	1.111.005.055.431,00	517.084.604.479,00	593.920.451.952,00

Akun Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan terdiri dari penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 143 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jenis Penyertaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Penyertaan Modal pada PDAM Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Line	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	131.606.200.000,00	131.606.200.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis	971.398.856.431,00	377.478.404.479,00	593.920.451.952,00
Penyertaan Modal pada PT. SJMT Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.111.005.056.431,00	517.084.604.479,00	593.920.451.952,00

Penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) dilakukan kepada 5 Badan Usaha dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.111.005.056.431,00.

Penyertaan awal Modal Pemerintah Daerah (PMP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 5 Badan Usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis

Pembentukan PDAM Bengkalis berdasarkan atas Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 1994 tanggal 20 Januari 1994. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki 100% kepemilikan atas PDAM Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PDAM Bengkalis hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp28.006.482.531,00. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2023 (Audited) diketahui bahwa PDAM Kabupaten Bengkalis memperoleh laba sebesar Rp64.925.070,00. Sehingga laba tersebut mengurangi saldo laba ditahan tahun sebelumnya yang bernilai minus sebesar Rp60.897.827.589. menjadi sebesar Rp60.832.902.519 Konsisten dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PDAM Kabupaten Bengkalis disajikan senilai Rp0,00 di karenakan Rugi PDAM masih belum melebihi penyertaan modal sebesar minus Rp62.832.902.519,00.

Hal tersebut didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Revisi Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi paragraf 47 yang menyatakan bahwa pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di Neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, maka penyertaan modal PT PDAM di sajikan **Rp0,00 atau Nihil**.

Tabel 5. 144 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis

Tahun	Jumlah
2000	350.000.000,00
2001	1.109.400.000,00
2002	1.000.000.000,00
2003	3.000.000.000,00
2004	3.187.500.000,00
2005	6.000.000.000,00
2006	6.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2007	8.200.000.000,00
2012	(8.224.347.689,00)
2014	3.044.859.174,00
2016	4.339.071.046,00
Jumlah	28.006.482.531,00

Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Berdasarkan data/informasi yang tersedia, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas saham Maskapai Penerbangan Riau Airlines adalah 5,5% dari keseluruhan modal PT Riau Airlines sesuai dengan Surat Pernyataan Penyertaan Modal tanggal 17 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT Riau Airlines tercatat sebesar **Rp8.000.000.000,00** yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per lembar saham. Pada Tanggal 12 Juli 2012 PT Riau Airline dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. RAL, sehingga status pailit PT RAL dinyatakan berakhir.

Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri

PT Bank Riau merupakan perusahaan daerah di Provinsi Riau yang bergerak di bidang perbankan di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau sebesar **Rp131.606.200.000,00**, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas PT Bank Riau sebesar 11,81% untuk posisi Per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 145 Rincian Penyertaan Modal Pada Riau Kepri

Tahun	Jumlah
2006	15.004.000.000,00
2007	25.000.000.000,00
2008	2.000.200.000,00
2009	50.000.000.000,00
2011	9.602.000.000,00
2012	20.000.000.000,00
2019	10.000.000.000,00
Jumlah	131.606.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001. Seluruh kepemilikan saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis ini dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menambahkan penyertaan modal ke PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,-. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp426.630.3993.067,00.

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 sudah terdapat Putusan Pengadilan yang sudah inkraht/inkrah yaitu Putusan Pengadilan Nomor: 263 K/Pid.Sus.TPKI/2016 tentang Daftar Aset Bergerak yang disita dan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus.TPK/2018 perihal Daftar Aset Tak Bergerak yang disita.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor B-3284/L.4.13/Fu.1/11/2019 tentang Jawaban Permohonan Pengembalian Aset PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 25 November 2019, bahwa barang bukti berupa Aset PT. Bumi Laksamana Jaya telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 162/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp154.690.000,00 dan hasilnya telah disetor ke Kas Negara, serta barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.750.973.000,00 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Bank Riau Kepri dengan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 September 2018 dan 14 Maret 2019. Terkait Pengurangan investasi belum dilakukan dalam laporan keuangan karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis per 31 Desember 2023 (Audited) diketahui bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis mengalami laba sebesar **Rp593.920.451.952,00** dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis disajikan senilai **Rp971.398.856.431,00**.

Tabel 5. 146 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Tahun	Jumlah
2001	10.000.000.000,00
2002	2.000.000.000,00
2003	41.621.000.000,00
2004	11.150.000.000,00
2005	5.000.000.000,00
2007	7.500.000.000,00
2008	40.906.480.267,00
2009	8.452.912.800,00
2012	300.000.000.000,00
Jumlah	426.630.393.067,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Jumlah penyertaan modal berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Sri Junjungan Media Televisi (PT SJMT) yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi hingga akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp8.236.000.000,00. PT SJMT sampai dengan laporan keuangan dibuat tidak beroperasi lagi. PT SJMT semula dikelola oleh PT BLJ namun dilatarbelakangi oleh telah berakhirnya KSO antara Pemkab. Bengkalis dan PT BLJ dalam pengelolaan PT. SJMT dan PT. BLJ tidak berhak melakukan Penyiaran televisi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. melalui surat kepada Bupati Bengkalis No.133/BLJ-Dirut/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 hal rencana serah terima, PT BLJ berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan PT SJMT Seluruh Aset PT SJMT telah diserahkan dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 147 Rincian Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Tahun	Jumlah
2005	1.236.000.000
2006	3.500.000.000
2007	3.500.000.000
Jumlah	8.236.000.000,00

Rincian Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada:
Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

C. Aset Tetap

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
7.739.308.790.905,37	7.522.101.779.551,60	217.207.011.353,77

Jumlah Aset Tetap 31 Desember 2023 sebesar Rp7.739.308.790.905,37 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.522.101.779.551,60 Nilai aset tetap TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp217.207.011.353,77. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 148 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah	1.097.923.133.576,64	1.098.122.150.466,64	-199.016.890,00
Peralatan dan Mesin	2.175.277.685.394,48	2.022.886.133.980,48	152.391.551.414,00
Gedung dan Bangunan	3.559.060.212.357,29	3.424.396.606.618,38	134.663.605.738,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.587.566.366.492,60	9.952.564.463.988,55	635.001.902.504,00
Aset Tetap Lainnya	155.702.358.281,02	143.108.156.692,02	12.594.201.589,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	442.363.319.930,71	346.374.070.478,02	95.989.249.452,69
Akumulasi Penyusutan	(10.278.584.285.127,30)	(9.465.349.802.672,49)	(813.234.482.454,83)
Jumlah	7.739.308.790.905,37	7.522.101.779.551,60	217.207.011.353,77

Rincian dan uraian per masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1. Tanah

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1.097.923.133.576,64	1.098.122.150.466,64	-199.016.890,00

Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.097.923.133.576,64 dan Rp1.098.122.150.466,64 maka terdapat penurunan dari periode sebelumnya sebesar Rp199.016.890,00.

Mutasi Aset Tetap tanah sebesar Rp1.097.923.133.576,64 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 (Audited)		1.098.122.150.466,64
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja modal Tanah	0,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	0,00	
Transfer Masuk	4.116.129.931,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	3.375.237.010,00	
Reklasifikasi	488.750.000,00	
Hibah	4.296.100,00	
Total Mutasi Tambah		7.984.413.041,00
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	4.116.129.931,00	
Reklasifikasi	4.067.300.000,00	
Penghapusan	0,00	
Koreksi Audited/BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		8.183.429.931,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2023		1.097.923.133.576,64

Rincian Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.097.923.133.576,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Aset Tetap Tanah

Jenis	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah Persil			
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	90.014.124.504,40	89.978.541.094,40	35.583.410,00
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	85.857.084.634,72	85.368.334.634,72	488.750.000,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	20.490.951.100,00	20.490.951.100,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	454.205.980.399,48	456.851.173.699,48	-2.645.193.300,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	24.668.278.789,07	24.668.278.789,07	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.423.717.490,00	5.423.717.490,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
Tanah Non Persil			0,00
Tanah Basah	15.772.891.000,00	13.851.048.000,00	1.921.843.000,00
Tanah Kering	5.603.215.731,00	5.603.215.731,00	0,00
Tanah Perkebunan	242.674.500,00	242.674.500,00	0,00
Tanah Hutan	8.060.679.600,00	8.060.679.600,00	0,00
Tanah Tandus	1.476.384.000,00	1.476.384.000,00	0,00
Tanah Pertanian	1.019.488.000,00	1.019.488.000,00	0,00
Lapangan			0,00
Tanah Lapangan Olah Raga	23.552.993.570,00	23.552.993.570,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	17.593.785.066,66	17.593.785.066,66	0,00
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	4.242.101.480,00	4.242.101.480,00	0,00
Tanah Untuk Jalan	230.309.782.466,84	230.309.782.466,84	0,00
Tanah Untuk Bangunan Air	36.788.722.364,97	36.788.722.364,97	0,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	76.625.000,00	76.625.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3.070.279.000,00	3.070.279.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	6.563.908.000,00	6.563.908.000,00	0,00
Tanah Untuk Makam	26.940.318.719,50	26.940.318.719,50	0,00
Tanah Untuk Taman	23.806.041.160,00	23.806.041.160,00	0,00
Tanah Kampung	12.143.107.000,00	12.143.107.000,00	0,00
Jumlah	1.097.923.133.576,64	1.098.122.150.466,64	(199.016.890,00)

Kenaikan Penurunan Aset Tanah dapat di lihat pada:

Lampiran Aset Tanah**2. Peralatan dan Mesin**

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
2.175.277.685.394,48	2.022.886.133.980,48	152.391.551.414,00

Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.175.277.685.394,48 dan Rp2.022.886.133.980,48

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.175.277.685.394,48 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (Audited) 2.022.886.133.980,48**Mutasi Tambah****Pembelian (sesuai harga perolehan)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Pegawai	1.331.700,00	
Belanja Barang dan Jasa	1.695.055.997,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	120.181.142.036,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	3.430.375.334,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.980.000,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	282.268.590,00	
Belanja Aset Lainnya	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	29.533.095.057,00	
Total Pembelian		155.165.248.714,00
Hibah	237.130.000,00	
Transfer masuk	40.917.906.865,68	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Reklasifikasi	249.444.500,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK		
Total Mutasi Tambah		41.404.481.365,68
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	40.917.906.865,68	
Penghapusan	0,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	3.259.671.800,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	600.000,00	
Total Mutasi Kurang		44.178.178.665,68
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022		2.175.277.685.394,48

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.175.277.685.394,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	84.571.496.655,01	76.428.427.055,01	8.143.069.600,00
Alat Besar Apung	614.047.937,24	614.047.937,24	0,00
Alat Bantu	64.601.272.148,38	63.321.820.614,38	1.279.451.534,00
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	365.954.900.479,93	333.716.124.271,93	32.238.776.208,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.264.207.509,35	2.218.481.629,35	45.725.880,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	32.518.303.538,22	29.480.230.338,22	3.038.073.200,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.427.504.106,00	10.427.504.106,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	3.188.718.020,85	3.086.664.340,85	102.053.680,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Bengkel Tak Bermesin	3.648.451.427,82	3.597.851.172,82	50.600.255,00
Alat Ukur	19.036.654.025,77	18.816.340.123,77	220.313.902,00
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	25.908.267.137,96	25.609.564.824,96	298.702.313,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	130.098.118.211,35	123.638.170.855,92	6.459.947.355,43
Alat Rumah Tangga	340.202.764.276,14	318.062.935.871,57	22.139.828.404,57
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.694.391.343,74	32.481.573.308,74	2.212.818.035,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	41.948.111.541,91	38.077.094.851,91	3.871.016.690,00
Alat Komunikasi	10.082.393.953,87	9.918.824.453,87	163.569.500,00
Peralatan Pemancar	23.668.577.461,41	20.598.887.135,41	3.069.690.326,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	44.249.000,00	34.749.000,00	9.500.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	422.993.091.767,61	393.594.503.692,61	29.398.588.075,00
Alat Kesehatan Umum	7.481.096.344,28	6.990.488.194,28	490.608.150,00
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	190.284.180.975,74	183.980.409.760,74	6.303.771.215,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.086.026.409,00	4.069.814.193,00	16.212.216,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	95.168.610.788,79	89.737.323.868,79	5.431.286.920,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	833.809.797,72	608.809.797,72	225.000.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.684.803.507,84	3.684.803.507,84	0,00
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	5.972.500,00	5.972.500,00	0,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.716.973.147,93	3.674.521.147,93	42.452.000,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.715.012.283,92	3.715.012.283,92	0,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	781.071.846,00	781.071.846,00	0,00
Alat Persenjataan			
Senjata Api	263.766.527,00	263.766.527,00	0,00
Persenjataan Non Senjata Api	2.190.015.020,21	2.173.724.925,21	16.290.095,00
Senjata Sinar	9.772.458,00	9.772.458,00	0,00
Alat Khusus Kepolisian	1.424.615.895,00	1.148.161.615,00	276.454.280,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Komputer			0,00
Komputer Unit	154.200.325.598,78	135.742.491.897,21	18.457.833.701,57
Peralatan Komputer	57.522.166.032,29	51.384.397.107,86	6.137.768.924,43
Alat Eksplorasi			0,00
Alat Eksplorasi Geofisika	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			
Sumur	68.349.000,00	59.849.000,00	8.500.000,00
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	75.592.900,00	75.592.900,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00
Alat Pelindung	4.885.041,00	4.885.041,00	0,00
Alat Sar	8.391.837.341,07	7.978.181.041,07	413.656.300,00
Alat Kerja Penerbangan	372.645.928,00	353.476.144,00	19.169.784,00
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.602.181.900,00	1.602.181.900,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	65.762.740,00	40.412.140,00	25.350.600,00
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20.748.985.916,35	19.153.704.196,35	1.595.281.720,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	522.894.000,00	522.894.000,00	0,00
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	1.512.060.953,00	1.321.870.403,00	190.190.550,00
Jumlah	2.175.277.685.394,48	2.022.886.133.980,48	152.391.551.414,00

Kenaikan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	3.559.060.212.357,29	3.424.396.606.618,38	134.663.605.738,91

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.559.060.212.357,29 dan Rp3.424.396.606.618,38

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.559.060.212.357,29 dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 (Audited)		3.424.396.606.618,38
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Pegawai	208.153.300,00	
Belanja Barang dan Jasa	19.230.915.331,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	370.261.800,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	67.163.424.744,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.810.071.867,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	469.262.513,00	
Belanja Aset Lainnya	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	24.449.989.801,00	
Total Pembelian		113.702.079.356,00
Transfer masuk	72.021.009.079,95	
Aset Dari KDP	1.254.027.882,91	
Hibah	462.921.350,00	
Reklasifikasi	306.967.000,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	20.085.594.750,00	
Total Mutasi Tambah		94.130.520.062,86
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	72.021.009.079,95	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Reklasifikasi	1.147.984.600,00	
Penghapusan	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		73.168.993.679,95
Saldo aset tetap per 31 Desember 2023		3.559.060.212.357,29

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.559.060.212.357,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Bangunan Gedung			

Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.163.857.935.293,17	3.049.942.743.040,26	113.915.192.252,91

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	268.396.197.158,71	254.918.574.482,71	13.477.622.676,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	38.175.657.218,45	36.598.128.235,45	1.577.528.983,00
Bangunan Menara			-
Bangunan Menara Perambuan	4.459.623.967,85	4.459.623.967,85	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	84.170.798.719,11	78.477.536.892,11	5.693.261.827,00
Jumlah	3.559.060.212.357,29	3.424.396.606.618,38	134.663.605.738,91

Kenaikan Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat di lihat pada:

Lampiran Gedung dan Bangunan**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	10.587.566.366.492,60	9.952.564.463.988,55	635.001.902.504,00

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp10.587.566.366.492.60 dan Rp9.952.564.463.988.55.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.587.566.366.492,60 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 (Audited) 9.952.564.463.988,55**Mutasi Tambah****Pembelian (sesuai harga perolehan)**

Belanja Pegawai	1.638.070.800,00	
Belanja Barang dan Jasa	6.483.431.044,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	6.495.538.525,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	476.152.709.797,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	56.894.568.931,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	-	
Total Pembelian		547.664.319.097,00
Transfer Masuk	12.849.541.883,87	
hibah	2.129.303.853,00	
Aset dari KDP	85.404.922.754,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Reklasifikasi		0,00
Aset Covid-19		0,00
Koreksi Pencatatan		0,00
Total Mutasi Tambah		100.383.768.490,87
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	12.849.541.883,87	
Diserahkan Ke Pemda Lain		0,00
Reklasifikasi	196.643.200,00	
Koreksi BPK		0,00
Koreksi Pencatatan		0,00
Total Mutasi Kurang		13.046.185.083,87
Saldo aset tetap per 31 Desember 2023		10.587.566.366.492,50

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.587.566.366.492,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Urutan	Saldo 2023	Saldo 2022	Konalkan/(Penurunan)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	7.699.133.321.058,89	7.208.146.672.289,03	490.986.648.769,86
Jembatan	557.491.509.879,78	531.991.520.465,78	25.499.989.414,00
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	346.394.497.270,34	344.805.250.782,34	1.589.246.488,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	16.157.732.819,96	16.157.732.819,96	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	4.095.515.434,05	4.117.301.634,05	-21.786.200,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	1.079.524.111.302,64	964.189.141.966,50	115.334.969.336,14
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7.692.208.335,74	7.140.370.419,74	551.837.916,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	516.342.269.480,86	532.039.266.521,86	-15.696.997.041,00
Bangunan Air Kotor	17.129.250.672,83	13.946.320.339,83	3.182.930.333,00
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.239.099.497,53	44.239.099.497,53	0,00
Instalasi Air Kotor	647.980.178,51	647.980.178,51	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	6.386.530.209,00	1.802.212.758,00	4.584.317.451,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.259.815.001,05	6.259.815.001,05	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Instalasi Gardu Listrik	2.056.098.086,28	2.056.098.086,28	0,00
Instalasi Pertahanan	1.129.114.308,00	1.129.114.308,00	0,00
Instalasi Gas	388.540.793,10	388.540.793,10	0,00
Instalasi Pengaman	417.030.256,70	417.030.256,70	0,00
Jaringan			
Jaringan Air Minum	157.065.596.315,84	154.895.766.464,84	2.169.829.851,00
Jaringan Listrik	124.330.754.568,26	117.509.838.382,26	6.820.916.186,00
Jaringan Telepon	685.391.023,19	685.391.023,19	0,00
Jumlah	10.587.566.366.492,50	9.952.564.463.988,55	635.001.902.504,00

Kenaikan Penurunan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di lihat pada:
Lampiran Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	155.702.358.281,02	143.108.156.692,02	12.594.201.589,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp155.702.358.281,02 dan Rp143.108.156.692,02.

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp155.702.358.281,02 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 (Audited) 143.108.156.692,02

Mutasi Tambah

Belanja Barang dan Jasa	99.681.902,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	827.193.367,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.961.429.920,00	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	1.705.896.400,00	
Total Pembelian		12.594.201.589,00

Transfer Masuk	0,00	
hibah	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Total Mutasi Tambah		0,00

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi BPK	0,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi Pencatatan	0.00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2023	155.702.358.281,02

Rincian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp155.702.358.281,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan			
Bahan Perpustakaan Tercetak	137.668.498.209,68	126.483.079.589,68	11.185.418.620,00
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	125.427.840,00	125.427.840,00	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4.340.101.681,00	4.340.101.681,00	0,00
Musik	152.943.000,00	152.943.000,00	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	13.212.500,00	13.212.500,00	0,00
Three Dimensional Artefacts And Realita	111.428.469,00	111.428.469,00	0,00
Tarscalt	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	2.883.500.162,95	2.602.782.162,95	280.718.000,00
Alat Bercorak Kebudayaan	2.853.245.652,00	2.023.852.285,00	829.393.367,00
Tanda Penghargaan	30.966.700,00	30.966.700,00	0,00
Hewan			
Hewan Piaraan	100.834.200,00	0,00	100.834.200,00
Temak	98.155.500,00	0,00	98.155.500,00
Tanaman			
Tanaman	2.864.032.717,39	2.864.032.717,39	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.460.011.649,00	4.360.329.747,00	99.681.902,00
Jumlah	155.702.358.281,02	143.108.156.692,02	12.594.201.589,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
442.363.319.930,71	346.374.070.478,02	95.989.249.452,69

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp442.363.319.930,71 dan Rp346.374.070.478,02.

Mutasi KDP sebesar Rp442.363.319.930,71 dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo awal 31 Desember 2022 (Audited)		346.374.070.478,02
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Pegawai	455.915.200,00	
Belanja Barang dan Jasa	4.197.724.518,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	399.639.960,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	44.577.374.081,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.835.353.006,00	
Utang Pihak Ketiga	81.311.901.318,00	
Total Pembelian		186.777.908.083,00
Transfer Masuk	99.500.000,00	
Reklasifikasi	69.952.200,00	
hibah	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		169.452.200,00
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	99.500.000,00	
Reklasifikasi	90.689.281.008,31	
Aset di Serahkan Pemda Lain	0,00	
Penghapusan	169.329.822,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		90.958.110.830,31
Saldo aset tetap per 31 Desember 2023		442.363.319.930,71

Rincian aset tetap KDP per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	6.432.712.615,81	7.085.931.644,72	-653.219.028,91
Dinas Kesehatan	43.277.367.120,00	949.707.467,00	42.327.659.653,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	0,00	235.051.000,00	-235.051.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	376.572.720.609,98	322.529.833.231,98	54.042.887.378,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3.025.333.220,00	3.431.571.220,00	-406.238.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	24.915.000,11	2.095.198.645,51	-2.070.283.645,40
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	38.427.425,00	-38.427.425,00
Dinas Lingkungan Hidup	68.240.908,00	652.264.908,00	-584.024.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.712.000,00	99.712.000,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.968.000,00	39.968.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.787.094.605,00	1.481.353.734,00	3.305.740.871,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	99.500.000,00	-99.500.000,00
Sekretariat Daerah	307.171.650,00	306.967.000,00	204.650,00
Sekretariat DPRD	99.396.000,00	99.396.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.224.000,00	172.224.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.884.843.104,81	6.785.343.104,81	99.500.000,00
Badan Pendapatan Daerah	200.769.797,00	200.769.797,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	20.868.000,00	20.868.000,00	0,00
Kecamatan Pinggir	49.983.300,00	49.983.300,00	0,00
Jumlah	442.363.319.930,71	346.374.070.478,02	95.989.249.452,69

7. Akumulasi Penyusutan

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	(10.278.584.285.127,30)	(9.465.349.802.672,49)	(813.234.482.454,83)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp10.278.584.285.127,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.778.805.809.358,96	-1.649.794.389.480,82	-129.011.419.878,14
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.229.576.891.035,13	-1.116.943.295.360,54	-112.633.595.674,59
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-7.265.847.930.026,04	-6.694.433.573.580,84	-571.414.356.445,20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-4.353.654.707,19	-4.178.544.250,29	-175.110.456,90
Jumlah	(10.278.584.285.127,30)	(9.465.349.802.672,49)	(813.234.482.454,83)

Tabel 5. 156 Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	(726.335.081.852,19)	-672.649.169.685,74	(53.685.912.166,45)
Dinas Kesehatan	(175.019.862.462,23)	-155.206.624.909,92	(19.813.237.552,31)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	(268.792.345.441,73)	-243.053.813.471,73	(25.738.531.970,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	(207.206.009.164,16)	-192.010.430.063,96	(15.195.579.100,20)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.138.064.029.485,93)	-4.730.282.074.705,57	(407.781.954.780,36)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(1.546.374.145.145,12)	-1.422.683.119.038,96	(123.691.026.106,16)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.133.593.833,92)	-10.832.659.390,92	(1.300.934.443,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(27.280.833.292,57)	-25.362.975.879,22	(1.917.857.413,35)
Satuan Polisi Pamong Praja	(9.869.427.876,40)	-9.432.171.840,40	(437.256.036,00)
Dinas Sosial	(34.011.660.161,17)	-30.928.508.728,17	(3.083.151.433,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(24.814.186.153,65)	-23.735.569.860,65	(1.078.616.293,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(7.018.523.816,23)	-6.495.967.646,23	(522.556.170,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(8.078.842.530,89)	-7.950.724.672,89	(128.117.858,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(92.928.470.544,11)	-87.287.327.129,11	(5.641.143.415,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(23.777.434.192,68)	-20.021.779.641,68	(3.755.654.551,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(13.762.583.554,83)	-12.950.165.538,83	(812.418.016,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.882.220.988,14)	-6.429.033.272,71	(453.187.715,43)
Dinas Perhubungan	(540.058.464.402,59)	-508.756.031.295,48	(31.302.433.107,11)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(14.643.053.532,04)	-12.788.196.472,04	(1.854.857.060,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(10.603.341.041,12)	-9.865.994.095,12	(737.346.946,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(11.772.492.251,38)	-9.658.907.472,09	(2.113.584.779,29)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(80.565.038.641,10)	-72.719.806.228,10	(7.845.232.413,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(20.861.694.736,13)	-19.570.156.786,13	(1.291.537.950,00)
Dinas Perikanan	(27.647.272.552,47)	-26.477.865.896,47	(1.169.406.656,00)
Dinas Perkebunan	(4.692.480.222,00)	-1.880.569.918,00	(2.811.910.304,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(80.104.883.428,38)	-72.811.039.713,38	(7.293.843.715,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(95.724.530.070,30)	-74.780.309.446,30	(20.944.220.624,00)
Sekretariat Daerah	(345.673.096.002,20)	-330.848.544.403,20	(14.824.551.599,00)
Sekretariat DPRD	(70.014.680.207,57)	-65.904.307.653,57	(4.110.372.554,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(15.651.898.471,89)	-13.612.224.511,24	(2.039.673.960,65)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(293.779.904.939,89)	-273.773.652.659,61	(20.006.252.280,28)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pendapatan Daerah	(22.418.356.892,82)	-20.411.971.061,82	(2.006.385.831,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(21.413.264.492,85)	-20.518.120.165,85	(895.144.327,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(16.837.885.601,01)	-15.961.296.794,01	(876.588.807,00)
Inspektorat	(9.373.979.768,25)	-8.812.965.874,25	(561.013.894,00)
Kecamatan Bengkalis	(36.940.169.476,25)	-34.046.655.584,25	(2.893.513.892,00)
Kecamatan Bantan	(21.307.459.497,74)	-19.827.758.228,74	(1.479.701.269,00)
Kecamatan Bukit Batu	(23.438.994.575,00)	-21.363.294.924,00	(2.075.699.651,00)
Kecamatan Siak Kecil	(17.572.410.293,31)	-16.548.337.908,31	(1.024.072.385,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	(4.087.007.475,00)	-3.120.494.728,00	(966.512.747,00)
Kecamatan Rupat	(40.551.322.587,84)	-35.846.544.282,84	(4.704.778.305,00)
Kecamatan Rupat Utara	(19.286.307.218,29)	-17.847.659.660,29	(1.438.647.558,00)
Kecamatan Mandau	(67.907.236.369,65)	-63.864.777.132,77	(4.042.459.236,88)
Kecamatan Pinggir	(27.397.311.578,91)	-25.003.662.535,91	(2.393.649.043,00)
Kecamatan Bathin Solapan	(6.016.157.758,03)	-2.803.532.473,67	(3.212.625.284,36)
Kecamatan Talang Muandau	(4.283.766.298,00)	-3.116.466.063,00	(1.167.300.235,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.610.574.249,36)	-5.496.543.227,36	(114.031.022,00)
Jumlah	(10.278.584.285.127,30)	(9.465.349.802.672,49)	(813.234.482.454,83)

D. Dana Cadangan

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Akun Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mempunyai saldo sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Aset Lainnya

	31 Des 2022	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	552.474.553.981,01	565.828.910.235,70	(13.354.356.254,69)

Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp552.474.553.981,01 dan Rp565.828.910.235,70 merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti: Tuntutan ganti rugi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 157 Rincian Aset Lainnya

Jenis Aset Tetap	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Tuntutan Ganti Rugi	1.572.290.815,00	6.306.966.250,66	-4.734.675.435,66
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	488.750.000,00	-488.750.000,00
Aset Tidak Berwujud	1.468.180.610,08	2.226.553.925,51	-758.373.315,43
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	295.651.477.000,00	279.720.241.835,00	15.931.235.165,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Lain-lain	253.782.605.555,93	277.086.398.224,53	-23.303.792.668,60
Jumlah	552.474.553.981,01	565.828.910.235,70	-13.354.356.254,69

1. Tuntutan Ganti Rugi

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	1.572.290.815,00	6.306.966.250,66	-4.734.675.435,66

Akun Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mempunyai saldo sebesar Rp1.572.290.815,00 dan Rp6.306.966.250,66. saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.734.675.435,66. Perubahan nilai TGR berdasarkan hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang didalamnya sudah ditetapkan bahwa nilai TGR Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp1.572.290.815,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Inisial	Saldo 01 Januari 2023	Mutasi 2023	Saldo 31 Desember 2023
I K	3.096.695.428,00	-3.096.695.428,00	0,00
M K	157.000.000,00	-157.000.000,00	0,00
A S	799.783.820,00	325.052.135,00	1.124.835.955,00
F M	364.045.684,00	-364.045.684,00	0,00
E D		0,00	
M N	663.828.068,00	-663.828.068,00	0,00
K H	651.250.097,00	-651.250.097,00	0,00
A L	447.454.860	0,00	447.454.860,00
BAPENDA	126.908.294	-126.908.293,66	0,00
JUMLAH	6.306.966.250,66	-4.734.675.435,66	1.572.290.815,00

Rincian Mutasi TGR per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	364.045.684,00	-364.045.684,00
Dinas Lingkungan Hidup	447.454.860,00	447.454.860,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	651.250.097,00	-651.250.097,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	157.000.000,00	-157.000.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	663.828.068,00	-663.828.068,00
Sekretariat DPRD	0,00	3.096.695.428,00	-3.096.695.428,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	126.908.293,66	-126.908.293,66



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	1.124.835.955,00	799.783.820,00	325.052.135,00
Jumlah	1.572.290.815,00	6.306.966.250,66	-4.734.675.435,66

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	488.750.000,00	-488.750.000,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp488.750.000,00 berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Riau Angkasa Indah, surat perjanjian Nomor 01/PJJ-PSR/2000 tentang perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan di Duri Kabupaten Bengkalis-Riau. Dalam kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan lahan senilai RP488.750.000,00 untuk dibangun lokasi dagang dan kantor UPTD dengan rincian :

	450.000.000,00
1 unit kantor UPTD	38.750.000,00
	<u>488.750.000,00</u>

dimana sistem kerjasama adalah BOT (*Build Operate Transfer*) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah 3 (tiga) tahun masa pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan, terhitung bulan April 2000, sehingga pada tahun 2023 aset kemitraan tersebut sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3. Aset Tidak Berwujud

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	1.468.180.610,08	2.226.553.925,51	(758.373.315,43)

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp23.804.346.992,57 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp22.336.166.382,49. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.468.180.610,08 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.226.553.925,51.

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.435.139.360,08 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 (Audited) 2.226.553.925,51

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	99.952.000,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	38.628.000,00
Koreksi Amortisasi	2,00
Hutang Pihak Ketiga	63.412.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Reklas	100.000.000,00	
Total Pembelian		329.742.002,00
Transfer Masuk		
Total Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar		
Aset diserahkan ke Pemda lain		
Amortisasi 2023	1.121.156.567,43	
Koreksi Amortisasi	-33.041.250,00	
Koreksi Pencatatan		
Total Mutasi Kurang		1.088.115.317,43
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023		1.468.180.610,08

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan Nilai Perolehan sebesar Rp23.804.346.992,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

Nama ATB	Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Perusahaan
Dinas Pendidikan			
Perangkat Lunak Sistem Operasi	21.000.000,00	2011	CV. Adira
Software / Aplikasi Komputer	401.955.000,00	2013	CV. Putra Wijaya
Belanja Modal Software / Aplikasi Komputer	96.066.500,00	2014	CV. Panjera Jaya
Software / Aplikasi Komputer	63.520.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Aplikasi Komputer SDN. 16 Pangkalan Batang	1.724.317,00	2016	CV. Panjera Jaya
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database	989.642.048,00	2016	CV. Bintang Nurjaya Lestari
Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan Sederajat Se-Kabupaten Bengkalis	936.232.000,00	2016	CV. Citra Gemilang
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SMP dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Gemilang Abadi
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif	374.741.813,00	2016	CV. Ade Liany
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif Untuk SMP dan Aplikasi Peningkatan Keterampilan TIK Berbasis Video Interaktif	1.582.578.486,00	2016	CV. Mifta Mafuh Mandiri
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database untuk Jenjang SMP	1.069.644.455,00	2016	CV. Ek Mandiri
Sumber Belajar Terpadu Berbasis IT	316.582.375,00	2016	UD. Putra Mas

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sarana dan Prasarana Pendukung Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan Sederajat Se - Kabupaten Bengkalis	934.379.520,00	2016	CV. Prima Perkasa
Sarana dan Prasarana <i>Micro Teaching</i> Jenjang SD dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Surya Asyifa
Alat Peningkatan Mengajar Berbasis ICT	809.658.397,00	2016	CV. Riau Jaya
Komputer SDN. 35 Pematang Duku	1.729.240,00	2016	CV. Anugrah Persada
Perangkat Lunak Data Pendidikan dan <i>Software</i> Papan Informasi Pendidikan	122.898.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif Jenjang SD	607.951.341,00	2017	CV. Vibi Nabila
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif Jenjang SD	639.222.473,00	2017	CV. Berkah Karya Mandiri
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif	640.714.600,00	2017	CV. Megah Mandiri Sejahtera
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	618.807.004,00	2017	CV. Cahaya Anugerah
Alat Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif Jenjang SMP	151.329.780,00	2018	CV. Putra Wijaya
Perangkat Lunak	173.910.000,00	2019	PT. Aditya Rama Daya Cipta
Aplikasi Master Bank Soal Tryout UN	76.335.900,00	2019	PT. Apsara Tiyasa Sambada
Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Admc CoreLic	181.800.000,00	2019	PT. Astragraphia Xprins Indonesia
Aplikasi Absensi Kpegawaian (e-Absen)	73.384.000,00	2021	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Manajemen Kearsipan Surat (e- Arsip)	70.796.000,00	2021	CV. Ikrar Utama
Aplikasi SISAPRANA	74.203.500,00	2022	HANAFI / CV. IKRAR UTAMA
Jumlah		12.121.411.713,00	
Dinas Kesehatan			
<i>Software Website</i> (dinkes.bengkaliskab.go.id)	86.661.400,00	2013	CV. Inti Media
Aplikasi Laporan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95.219.196,00	2019	PT. Nuasa Cerah Informasi
Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	175.900.000,00	2020	PT. Nuasa Cerah Informasi
<i>Software Website</i> (corona.bengkaliskab.go.id)	39.567.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Aplikasi Manajemen Obat dan Logistik Kesehatan Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	100.000.000,00	2023	IMAN JAYA HAREFA / PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Jumlah		497.347.596,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau			
Aplikasi Komputer (<i>Software</i> Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG RSUD)	50.436.900,00	2014	CV. Mandiri Karya
Pengembangan SIM dan IT/ Pengembangan <i>Website</i> RSUD (www.rsudmandau.com)	28.820.000,00	2016	PT. Raja Sakti Telematika
Perengkapan Pendukung SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	9.459.000,00	2017	Toko Alfa Komputer
Jumlah			88.715.900,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Aplikasi Keuangan	34.850.000,00	2011	CV. Guna Dharma
<i>Software Website</i> (http://pupr.bengkaliskab.go.id/)	124.135.000,00	2015	PT. Hegar Daya
Aplikasi Surat Menyurat (Sistem Informasi Aplikasi Persuratan) (http://puprbengkalis.com/sipp/)	128.972.500,00	2019	CV.Mmw
Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis WEB (http://simawar.puprbengkalis.com/)	131.613.500,00	2019	CV.Riau Cyber Teknologi
Aplikasi Kerusakan Jalan Kabupaten	99.744.000,00	2020	CV. Web Dragon
Sistem Informasi PUPR Kabupaten Bengkalis (pupr.bengkaliskab.com)	99.917.000,00	2021	CV.Mahputra
Jumlah			619.232.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			
Aplikasi Database Tanah Berbasis <i>Website</i> (eSigab Perkimtan Bengkalis) di Google Playstore	144.550.000,00	2019	CV. Indosoft Media
<i>Software</i> untuk Pembayaran Total Maximum	43.412.000,00	2023	CV. Terbuk Swakarsa Teruna
Jumlah			187.962.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Aplikasi Data Sistem Manajemen Pemulihan dan Penanggulangan Bencana	48.058.200,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
<i>Software Website</i> (bpbddamkar.bengkaliskab.go.id)	49.800.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
<i>Software Website</i> Pusdatin (www.bpbd.bengkaliskab.go.id)	49.720.000,00	2019	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			147.578.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran			
<i>Software Website</i> (www.damkar.bengkaliskab.go.id)	39.024.000,00	2019	CV. Djitoe Pesisir
<i>Software Website</i> (https://damkar.bengkaliskab.go.id)	24.805.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			63.829.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Aplikasi E-Lapor	49.950.000,00	2022	PANJI RACHMAT SETIAWAN/CV. RAHMAT JAYA BERSAMA
Jumlah			49.950.000,00
Dinas Ketahanan Pangan			
Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar	25.428.000,00	2013	CV. Media Jasa
Aplikasi <i>Software</i> Database Kelompok Tani pada Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluh	29.080.000,00	2013	Toko JC Computer
<i>Software Website</i> (www.dkp.bengkalis.kab.go.id)	43.450.400,00	2016	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			97.958.400,00
Dinas Lingkungan Hidup			
<i>Software Website</i> Bank Sampah (http://Jakstradakabbengkalis.id)	74.778.000,00	2019	CV. Karya Anugrah Konsultan
Jumlah			74.778.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
<i>Software Website</i> (http://sidupa.bengkalis.kab.go.id/login)	199.670.000,00	2019	CV. Quantum Solution
Windows Server Original dan License Key	49.617.000,00	2022	BUZANIR/ CV. REPINDO PERSADA
Jumlah			249.287.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			
<i>Software</i>	49.950.000,00	2022	PT. Mandau Jaya Perkasa
Aplikasi <i>Biling</i> Data Bumdes/Bumdes Syariah/ Bumdes Bersama	69.700.000,00	2022	CV. TIGA BINTANG
Jumlah			119.650.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
<i>Software Website</i> (www.disdalduk-kb.bengkalis.kab.go.id)	39.500.000,00	2018	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			39.500.000,00
Dinas Perhubungan			
<i>Software Website</i> (www.dishubkominfo.bengkalis.kab.go.id)	44.979.000,00	2013	PT. Bumi Mama Indonusa
Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	57.532.000,00	2018	CV. Hanin Tama
SIM PKB (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi E-KIR Gadget	99.000.000,00	2020	CV. Yustini
Aplikasi SMS Gateway	38.500.000,00	2020	CV. Yustini
Modul Display	49.747.500,00	2021	CV. Baskhara
Modul Aplikasi Pengujian Kelling	93.390.000,00	2021	CV. Baskhara

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Modul Software Aplikasi Uji Keliling	62.150.000,00	2021	CV. Baskhara
Aplikasi e Ticketing	254.023.499,00	2022	PT. AKSES DINAMIKA TEKNOLOGI (RIO OCTAVIANO)
Software Website	27.750.000,00	2023	CV. YUSTINI
Jumlah			859.383.819,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik			
Software Website Pemkab Bengkalis (www.bengkaliskab.go.id)	29.056.500,00	2013	CV. Citra Buana
Aplikasi Buku Tamu Elektronik	60.039.400,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (pesonabengkalis.id)	39.600.000,00	2020	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi SMS Gateway	14.461.800,00	2021	CV. Cloud Code Indonesia
Jumlah			143.157.700,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sistem Aplikasi Perizinan	96.078.702,00	2012	PT. Murfa Surya Mahardika
Software Website www.bpmp2t.co.id	38.821.000,00	2013	CV. Metco (Melayu Era Technology)
Sistem Informasi Manajemen (SKRD)	91.491.500,00	2013	CV. Junico Jaya
Sistem Informasi (PTSP)	282.381.000,00	2013	CV. Putra Malay Cooperation
SIM PTSP	9.194.400,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIMPEG	85.302.300,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Anjungan Informasi Mandiri	97.324.800,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIM PTSP	87.015.400,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
SIM SKRD	60.854.600,00	2015	CV. Wahana Mitra Intermedia
Sistem Layanan Antrian	48.317.500,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Arsipan Digital	49.052.400,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Sistem Informasi Berbasis IT	55.363.900,00	2017	CV. Tri Jaya Mutimedia
ePINTER DPMPSP BENGKALIS	37.400.000,00	2018	CV. Tri Jaya Mutimedia
Warning System (e-PINTER)	31.300.000,00	2019	CV. Tri Jaya Mutimedia
Mobile Layanan Perizinan dan Non Perizinan	34.000.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Arsip digital	33.800.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Tanda Tangan Digital	41.800.000,00	2019	CV. Tri Jaya Mutimedia
Jumlah			1.179.497.502,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Komputer Server /Main Frame (Mikro Film) Perangkat Lunak NCI Book Man	122.300.000,00	2008	CV. Berkama Karya
Software Database Sistem Kearsipan	68.460.900,00	2011	CV. Defitra Konsultan
Aplikasi Untuk Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah (Digital Arsip)	33.733.483,00	2018	CV. Ladini
Jumlah			224.494.383,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan			
Software Website (www.dinaskelautan.bengkalisKab.go.id)(software codeigniter3)	39.800.000,00	2018	CV. Ikrar Utama
Jumlah			39.800.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			
Aplikasi Data Keuangan & Administrasi Umum (Perencanaan)	49.950.000,00	2010	CV. De Fitra Konsultan
Aplikasi Pada Laptop (Citra Alus + Handling)	45.126.647,77	2011	CV. Tanjung Tipah
Software Website www.disbunhut.bengkalisKab.go.id	40.642.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Software Website (www.distanbengkalisKab.go.id)	29.850.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			165.568.647,77
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Software Voip WEB based Voip Software	34.521.000,00	2013	CV. Indra Rukmana Karya Teknik
Server Xeon E3110 (3.0 Ghz, Fsb 1333 Mhz, Chace 6Mb)	9.862.850,00	2011	CV. Adira
Pembuatan Aplikasi Database IKM	49.940.000,00	2021	CV. Tuan Muda
Aplikasi Sistem Pendataan Pasar Murah	20.000.000,00	2023	CV. Cloud Code Indonesia
Jumlah			114.323.850,00
Sekretariat Daerah			
Software /Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan	57.530.000,00	2011	CV. Adira
Website Dinamis dan Interaktif (bengkalisKab.go.id)	19.900.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SMS Gateway Berbasis Web	34.950.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software /Aplikasi SIMBADA	18.500.000,00	2011	CV. Gold Print
Software /Aplikasi Gaji	189.000.000,00	2012	CV. Ikrar Utama
Software /Aplikasi SIMPEG	97.800.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software OS Window Server	10.196.400,00	2013	CV. Ikrar Utama
Software /Aplikasi Operating System	21.243.000,00	2015	CV. Ikrar Utama
Software / Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	73.194.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software SIAP	61.899.000,00	2015	CV. Mahmudal Fata Akbar
Software /Aplikasi Data Rumah Ibadah	14.780.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Sistem dan Aplikasi Laporan Online untuk Bagian Penyusunan Program	49.398.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Sistem Informasi Manajemen Ruang Setda dan Software Sistem Informasi Document Sharing Berbasis Cloud	147.666.000,00	2016	CV. Pratama Cipta
Software OS Window Server	10.500.000,00	2016	CV. Ikrar Utama

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	74.855.000,00	2020	CV. Rishan Anugrah
Aplikasi Rumah Ibadah	49.995.000,00	2022	
Jumlah		931.406.400,00	
Sekretariat DPRD			
Software Website (http://dprd-bengkaliskab.go.id/admindprd)	300.580.000,00	2011	CV. Lialindo Utama
Software Website (www.DPRD.Bengkaliskab.go.id)	58.711.700,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.e-wartawan.bengkaliskab.go.id/HumasSetwan/)	44.598.400,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.SPPD.Bengkaliskab.go.id)	47.960.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.DPRD.bengkaliskab.go.id/perpustakaan/)	54.000.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		505.850.100,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Software Website (www.bappeda.bengkaliskab.go.id)	17.618.183,00	2012	CV. Guna Dharma
Software E-Planning	194.150.000,00	2018	PT. Raja Sakti Telematika
Software E-Monev	187.000.000,00	2019	PT. Adityarama Daya Cipta
Aplikasi (Software) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	195.360.000,00	2022	RIANDY SATRIA PUTRA / PT ANKA BRATA INFORMATIKA
Jumlah		594.128.183,00	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Software Website (www.dpk.bengkaliskab.go.id)	34.320.000,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	35.625.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	36.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpp.bengkaliskab.go.id)	41.100.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		196.045.000,00	
Badan Pendapatan Daerah			
PT. Elok Mitra Utama	81.257.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 ENG DiskKit MVL DVD	693.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssntls 2012 SNGL	14.410.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssntls 2012 64Bit	715.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lisensi <i>Software</i> Pemetaan Aplikasi SIM PBB : Aplikasi Pemetaan Mapinfo Profesional V 11.5	51.315.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
<i>Software</i> Aplikasi Simpeg, Aplikasi Pajak Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Simpeda)	650.570.000,00	2011	CV. Serantau Mandiri
<i>Software</i> /Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB Online	261.118.205,80	2012	CV. Liandino Utama.
<i>Software</i> /Aplikasi Perjalanan Dinas dan Website Dispenda	69.025.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
<i>Software</i> /Aplikasi POS (<i>Payment Online System</i>) untuk PBB-P2	198.800.000,00	2013	PT. Citra Media Interaktif.
<i>Software</i> /Aplikasi Komputer (<i>Smart Map</i>) untuk Pengelolaan PBB-P2	170.500.000,00	2014	PT. Global Aero Dinamika
Connector LAN - AMP Ori	750.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Kabel LAN - Belden Ori	2.810.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Anti Virus Komputer Desktop (3 user) - Kaspersky 2016	5.460.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2 - Anti Virus Karpersky - 1 Server 5 Client	4.000.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2	126.500.000,00	2015	PT. Cartenz Technology International
<i>Software</i> /Aplikasi Komputer Sistem Informasi PBB-P2	65.827.200,00	2016	PT. Elok Mitra Utama
Aplikasi Perhitungan Piutang PBB-P2	65.492.800,00	2016	PT. Bonion Mitra Utama
<i>Software</i> Aplikasi Komputer SMS Gateway	66.630.000,00	2016	PT. Cipta Pusaka Utama
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah <i>Self Assesment</i> berupa <i>iTax - Hotel Tax Application</i> dan <i>iTax-Restaurant Tax Application</i> .	197.890.000,00	2017	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Pemeliharaan Aplikasi Komputer Pengelolaan PBB-P2	20.000.000,00	2017	PT. Mentari Kode Informatika
Aplikasi Imotax Pendataan Wajib Pajak	194.535.000,00	2018	PT. Mentari Kode Informatika
Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Pajak Daerah <i>Official Assesment</i> dan <i>Self Assesment</i>	378.840.000,00	2018	PT. Cartenz Technology Indonesia
Windows Server	39.800.000,00	2019	CV. Dwi Mandiri
Aplikasi Informasi Pajak Daerah (<i>Software</i> Sistem Informasi Dashboard)	149.710.000,00	2019	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Aplikasi E-SPTPD Untuk Penerapan pajak secara <i>On-Line</i>	194.590.000,00	2019	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi Sistem Informasi Pembukuan Pajak Daerah	97.289.000,00	2019	PT. Geo Space Intimatika.
Aplikasi Pendataan Pajak Daerah Berbasis <i>Mobile - Tax Survey</i>	129.900.000,00	2021	PT. Cartenz Technology Indonesia
Aplikasi Pajak Daerah (SIPBUKAS)	199.900.000,00	2022	PT. Cartenz Technology Indonesia
Aplikasi Disposisi Elektronik (Bapenda E-Office)	64.879.500,00	2022	PT. Cartenz Technology Indonesia

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah		3.503.206.705,80	
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Software Sistem Aplikasi Kearsipan, Disposisi dan Pelayanan Kepegawaian	82.280.000,00	2012	CV. Masya
Jumlah		82.280.000,00	
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Software /Aplikasi <i>Elibrary</i> / fitur	21.158.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Software /Aplikasi Database berbasis WEB	20.993.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Visualisasi <i>Website</i> Ekomina Wisata Tasik Biospher (www.ecominawisatabiosphere.com)	57.924.467,00	2012	CV. Mitra Utama Konsultan
Software <i>Website</i> (www.balitbang.bengkalis.go.id)	31.185.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Aplikasi Sistem Keuangan	12.000.000,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Penatausahaan Keuangan	13.500.000,00	2016	CV. Mahmudal Fata Akbar
Aplikasi Sistem Keuangan	31.037.600,00	2017	CV. Mahmudal Fata Akbar
Optimalisasi <i>Website</i>	19.990.300,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		207.788.993,00	
Inspektorat			
Software /perangkat komputer (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan - SIMHP)	53.067.500,00	2015	Toko New Visicom
Pembuatan <i>Website</i> Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	49.976.000,00	2023	PT. Anugrah Walet Emas Beta
Pembuatan <i>Website</i> Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis	49.976.000,00	2023	CV. Putra Malay Coopora
Jumlah		153.019.500,00	
Kecamatan Bengkalis			
Software /Aplikasi dan Perangkat Aplikasi SI- KEL Kota Bengkalis. Alamat Lokal Server : 192.168.99.1/sikel	70.000.000,00	2017	CV. Panjera Jaya
Jumlah		70.000.000,00	
Kecamatan Bantan			
Software <i>Website</i> (https://camatbantan.bengkalis.go.id)	15.000.000,00	2017	Toko Smart Com
Jumlah		15.000.000,00	
Kecamatan Siak Kecil			
Software <i>Website</i> Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis (siap.appsiakkecil.id)	15.000.000,00	2020	Toko Hendri Computer
Jumlah		15.000.000,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bandar Laksamana			
Software Website (https://camatbandarlaksamana.web.id)	24.750.000,00	2020	PT. Azli Internet dan Teknologi Informasi
Jumlah	24.750.000,00		
Kecamatan Rupat Utara			
Software Website Kecamatan (http://camatrupatutara.bengkalisab.go.id)	30.000.000,00	2017	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	30.000.000,00		
Kecamatan Mandau			
Software Website (https://camatmandau.bengkalisab.go.id)	27.182.500,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (PATEN)	98.207.500,00	2018	CV. Annur Kegemilangan
Jaringan "SIMANTAP" (Pembuatan Aplikasi SIMANTAP)	149.728.400,00	2019	CV. Tyra Abadi Engineering
Jumlah	275.118.400,00		
Kecamatan Talang Muandau			
Software Website (https://camattalangmuandau.bengkalisab.go.id)	29.700.000,00	2020	CV. Ikrar Utama
Jumlah	29.700.000,00		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Software Website (www.kesbangpol.bengkalisab.go.id)	49.000.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Jumlah	49.000.000,00		
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga			
Software Aplikasi Kebudayaan Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	38.628.000,00	2023	PT. Flashcom Indo Tama
Jumlah	38.628.000,00		
Jumlah	23.804.346.992,57		

Tabel 5. 161 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Aset Tidak Berwujud	23.804.346.992,57	23.474.604.992,57	329.742.000,00
Software	23.655.956.992,57	23.326.214.992,57	329.742.000,00
Lisensi	148.390.000,00	148.390.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-22.336.166.382,49	-21.248.051.067,06	-1.088.115.315,43
Software	-22.217.454.382,49	-21.129.339.067,06	-1.088.115.315,43
Lisensi	-118.712.000,00	-118.712.000,00	0,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	1.468.180.610,08	2.226.553.925,51	-758.373.315,43

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 162 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 per SKPD

SKPD	Nilai Perolehan	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	12.121.411.713,00	-11.998.218.744,00	123.192.969,00
Dinas Kesehatan	497.347.596,00	-364.044.829,33	133.302.766,67
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	-88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	-548.497.104,17	70.734.895,83
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	187.962.000,00	-145.454.417,00	42.507.583,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	-147.578.200,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	-51.943.270,83	11.885.729,17
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.950.000,00	-14.568.750,00	35.381.250,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	-97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	-74.778.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.287.000,00	-214.141.624,67	35.145.375,33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	119.650.000,00	-47.990.625,00	71.659.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	-39.500.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	859.383.819,00	-533.448.720,00	325.935.099,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	-132.404.375,00	10.753.325,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	-1.179.497.502,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	38.628.000,00	-5.633.250,00	32.994.750,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	-224.494.383,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	-39.800.000,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	165.568.647,77	-165.568.647,77	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	114.323.850,00	-70.810.933,34	43.512.916,66
Sekretariat Daerah	931.406.400,00	-886.129.960,00	45.276.440,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	-505.850.100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	594.128.183,00	-451.678.183,00	142.450.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	-196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.503.206.705,80	-3.247.894.570,38	255.312.135,42
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	-82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	-207.788.993,00	0,00
Inspektorat	153.019.500,00	-71.808.500,00	81.211.000,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	-13.437.500,00	1.562.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	-23.718.750,00	1.031.250,00
Kecamatan Rupal Utara	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	-275.118.400,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	-25.368.750,00	4.331.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
Jumlah	23.804.346.992,57	(22.336.166.382,49)	1.468.180.610,08

Tabel 5. 163 Rincian Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaiikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	12.121.411.713,00	12.121.411.713,00	-
Dinas Kesehatan	497.347.596,00	397.347.596,00	100.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	619.232.000,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	187.962.000,00	144.550.000,00	43.412.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	147.578.200,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	63.829.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	74.778.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.287.000,00	249.287.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	119.650.000,00	119.650.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	859.383.819,00	831.633.819,00	27.750.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	143.157.700,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	1.179.497.502,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	38.628.000,00	0,00	38.628.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	224.494.383,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	165.568.647,77	165.568.647,77	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	114.323.850,00	94.323.850,00	20.000.000,00
Sekretariat Daerah	931.406.400,00	931.406.400,00	0,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	505.850.100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	594.128.183,00	594.128.183,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.503.206.705,80	3.503.206.705,80	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	207.788.993,00	0,00
Inspektorat	153.019.500,00	53.067.500,00	99.952.000,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
Kecamatan Rupert Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	275.118.400,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Jumlah	23.804.346.992,57	23.474.604.992,57	329.742.000,00

Tabel 5. 164 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	-11.998.218.744,00	-11.905.361.875,00	-92.856.869,00
Dinas Kesehatan	-364.044.829,33	-275.856.965,58	-88.187.863,75
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-88.715.900,00	-88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-548.497.104,17	-454.985.791,67	-93.511.312,50
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-145.454.417,00	-111.423.958,00	-34.030.459,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-147.578.200,00	-137.219.866,67	-10.358.333,33
Dinas Pemadam Kebakaran	-51.943.270,83	-39.238.020,83	-12.705.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-14.568.750,00	-2.081.250,00	-12.487.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	-97.958.400,00	-97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	-74.778.000,00	-68.546.500,00	-6.231.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-214.141.624,67	-155.979.666,67	-58.161.958,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-47.990.625,00	-18.078.125,00	-29.912.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-39.500.000,00	-39.500.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	-533.448.720,00	-355.390.600,00	-178.058.120,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-132.404.375,00	-118.888.925,00	-13.515.450,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-1.179.497.502,00	-1.160.532.918,67	-18.964.583,33
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-5.633.250,00	0,00	-5.633.250,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-224.494.383,00	-224.494.383,00	0,00
Dinas Perikanan	-39.800.000,00	-39.800.000,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	-165.568.647,77	-165.568.647,77	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-70.810.933,34	-57.909.266,67	-12.901.666,67
Sekretariat Daerah	-886.129.960,00	-854.917.460,00	-31.212.500,00
Sekretariat DPRD	-505.850.100,00	-487.857.600,00	-17.992.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-451.678.183,00	-359.984.004,00	-91.694.179,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-196.045.000,00	-196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	-3.247.894.570,38	-3.035.491.966,21	-212.402.604,17
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-82.280.000,00	-82.280.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-207.788.993,00	-207.788.993,00	0,00
Inspektorat	-71.808.500,00	-53.067.500,00	-18.741.000,00
Kecamatan Bengkalis	-70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	-13.437.500,00	-9.687.500,00	-3.750.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	-23.718.750,00	-17.531.250,00	-6.187.500,00
Kecamatan Rupa Utara	-30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	-275.118.400,00	-243.924.983,33	-31.193.416,67
Kecamatan Talang Muandau	-25.368.750,00	-17.943.750,00	-7.425.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
Jumlah	(22.336.166.382,49)	(21.248.051.067,07)	(1.088.115.315,42)

4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
295.651.477.000,00	279.720.241.835,00	15.931.235.165,00

Saldo Dana Treasury Deposit Facility sebesar Rp 295.651.477.000,00 sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia, yang mana saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap daerah ditetapkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Terkait pencatatan dan kebijakan akuntansi atas pengakuan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dituangkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF, yang didukung dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pemutakhiran Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO).
- 2 Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema tranfer ke RKUN. namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-lain PAD yang Sah atau akun sajenisnya (LO).

5. Aset Lain-lain

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	253.782.605.555,93	277.086.398.224,53	-23.303.792.668,60

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.782.605.555,93 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap yang tidak layak disajikan dalam Aset Tetap. Aset Lain-lain disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp340.046.801.390,57 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp86.264.195.834,46.

Saldo Aset Lain-lain tersebut masih mencakup Aset Renovasi berupa renovasi atau rehabilitasi atas aset yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa renovasi atas sarana ibadah, madrasah, dan pondok pesantren sebesar Rp3.157.188.370,00.

Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lain-lain	340.099.602.690,57	381.526.943.600,17	-41.427.340.909,60
Aset Rusak Berat	66.242.293.292,52	62.982.621.492,52	3.259.671.800,00
Aset Tidak Ditemukan	19.751.012.253,74	17.680.728.608,34	2.070.283.645,40
Aset Lain-lainnya	254.106.297.144,31	300.863.593.499,31	-46.757.296.355,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-86.316.997.134,64	-104.440.545.375,64	18.123.548.241,00
Aset Rusak Berat	-33.184.345.545,36	-51.307.893.786,36	18.123.548.241,00
Aset Tidak Ditemukan	-7.764.374.758,28	-7.764.374.758,28	0,00
Aset Lain-lainnya	-45.368.276.831,00	-45.368.276.831,00	0,00
Jumlah	253.782.605.555,93	277.086.398.224,53	-23.303.792.668,60

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 166 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	36.985.325.005,35	-3.989.808.333,00	32.995.516.672,35
Dinas Kesehatan	3.966.208.610,00	-1.166.914.730,00	2.799.293.880,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	9.077.385.754,33	-9.077.385.754,33	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	19.631.573.181,74	-18.840.720.871,74	790.852.310,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.715.619.411,88	-3.550.450.000,00	147.165.169.411,88
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	560.894.990,00	-163.333,33	560.731.656,67
Dinas Pemadam Kebakaran	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	370.246.379,15	-310.834.973,83	59.411.405,32
Dinas Sosial	2.877.608.825,12	-684.093.151,13	2.193.515.673,99
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.093.865,77	-69.328.056,00	8.765.809,77
Dinas Ketahanan Pangan	626.978.873,46	-296.406.445,57	330.572.427,89
Dinas Lingkungan Hidup	2.575.416.342,04	-1.129.904.059,00	1.445.512.283,04
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.651.961.119,00	-1.602.976.810,00	48.984.309,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.025.176.391,70	-4.852.022.512,00	13.173.153.879,70
Dinas Perhubungan	9.095.150.355,80	-403.536.374,00	8.691.613.981,80
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	177.725.582,13	-172.644.991,00	5.080.591,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.086.151,00	-86.767.167,33	169.318.983,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.630.963.463,00	-1.826.190.350,00	4.804.773.113,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.849.100,00	-244.851.112,00	126.997.988,00
Dinas Perikanan	8.857.748.002,03	-1.978.674.198,59	6.879.073.803,44
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	5.122.187.160,34	-1.946.426.226,67	3.175.760.933,67
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.558.280.172,00	-4.506.828.578,53	1.051.451.593,47
Sekretariat Daerah	1.878.285.866,00	-983.308.478,67	894.977.387,33
Sekretariat DPRD	1.511.723.744,60	-1.400.669.516,95	111.054.227,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.166.492,74	-1.373.382.805,00	3.783.687,74
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.163.786.803,07	-12.775.707.119,74	15.388.079.683,33
Badan Pendapatan Daerah	247.635.000,00	-247.635.000,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.893.123,78	-979.376.023,00	70.517.100,78

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	867.285.127,00	-787.493.055,33	79.792.071,67
Inspektorat	1.454.477.460,00	-1.439.809.876,00	14.667.584,00
Kecamatan Bengkalis	1.862.700.393,97	-1.201.873.461,23	660.826.932,74
Kecamatan Bantan	1.908.210.188,00	-1.352.278.502,00	555.931.686,00
Kecamatan Bukit Batu	4.690.122.357,00	-2.004.562.174,00	2.685.560.183,00
Kecamatan Siak Kecil	891.907.861,66	-420.187.416,99	471.720.444,67
Kecamatan Rupat	42.025.000,00	-39.008.697,92	3.016.302,08
Kecamatan Rupat Utara	291.180.581,81	-163.181.158,54	127.999.423,27
Kecamatan Mandau	2.433.392.514,79	-1.775.932.697,79	657.459.817,00
Kecamatan Pinggir	1.045.903.875,64	-781.045.970,00	264.857.905,64
Kecamatan Bathin Solapan	6.472.082.900,00	-1.231.653.861,00	5.240.429.039,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	622.783.364,67	-570.161.992,43	52.621.372,24
Jumlah	340.046.801.390,57	-86.264.195.834,64	253.782.605.555,93

5.3.2. Kewajiban

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	472.869.679.682,51	191.836.756.276,16	281.032.923.406,35

Jumlah Kewajiban sebesar Rp472.869.679.682,51 dan Rp191.836.756.276,16 merupakan nilai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	472.869.679.682,51	191.836.756.276,16	281.032.923.406,35
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	472.869.679.682,51	191.836.756.276,16	281.032.923.406,35

A. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	472.869.679.682,51	191.836.756.276,16	281.032.923.406,35

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp472.869.679.682,51 dan Rp191.836.756.276,16 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 168 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	124.947.086,03	0,00	124.947.086,03
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Diterima Dimuka	115.878.192.040,09	85.886.635.942,77	29.991.556.097,32
Utang Pihak Ketiga	353.161.390.691,39	101.823.744.460,39	251.337.646.231,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.705.149.865,00	4.126.375.873,00	-421.226.008,00
Jumlah	472.869.679.682,51	191.836.756.276,16	281.032.923.406,35

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	124.947.086,03	0,00	124.947.086,03

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp124.947.086.03 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

2. Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Saldo Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan

3. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	115.878.192.040,09	85.886.635.942,77	29.991.556.097,32

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.878.192.040,09. Bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.886.635.942,77 mengalami Kenaikan sebesar Rp29.991.556.097,32 dengan rincian :

Tabel 5. 169 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD

SKPD	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo 2023	Saldo 2022
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	Sewa Lahan Bank Riau	0,00	11.666.666,76
	Sewa Lahan ATM Bank BRI	8.500.000,00	8.750.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	Sewa Lahan ATM Bank	135.833.333,34	26.666.666,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sewa Lahan Gardu Listrik	8.666.666,67	9.666.666,67
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lebih Bayar DBH Pusat (Dana Perimbangan)	115.201.864.286,00	85.393.845.977,00
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	523.327.754,08	436.039.965,67
Jumlah		115.878.192.040,09	85.886.635.942,77

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Utang Pihak Ketiga

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	353.161.390.691,39	101.823.744.460,39	251.337.646.231,00

Saldo Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp353.161.390.691,39. Sedangkan saldo Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.823.744.460,39.

Rincian Utang Pihak Ketiga sebesar Rp353.161.390.691,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Rincian Utang Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Utang Belanja Pegawai	20.400.000,00	239.518.650,89	-219.118.650,89
Utang Belanja Barang dan Jasa	53.117.191.869,00	24.910.262.724,00	28.206.929.145,00
Utang Bantuan Keuangan	70.829.004.815,00	66.584.096.471,00	4.244.908.344,00
Utang Belanja Hibah	18.145.578.471,00	811.447.734,00	17.334.130.737,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.286.043.374,00	392.984.850,00	26.893.058.524,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.761.037.938,89	5.802.010.091,50	16.959.027.847,39
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.437.225.823,50	3.083.423.939,00	147.353.801.884,50
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.501.496.400,00	0,00	10.501.496.400,00
Utang Belanja Modal Aset Tak Berwujud	63.412.000,00	0,00	63.412.000,00
Saldo	353.161.390.691,39	101.823.744.460,39	251.337.646.231,00

Tabel 5. 171 Mutasi Utang Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga	APBD	BLUD	Jumlah
Saldo Awal Utang	81.164.626.726,39	20.659.117.734,00	101.823.744.460,39
Koreksi Utang	2.796.211.041,00	463.364.359,00	3.259.575.400,00
Utang tahun sebelumnya di Bayar tahun 2023	-77.221.482.851,00	-20.910.989.093,00	-98.132.471.944,00
Penambahan Tahun 2023	318.429.441.168,00	27.781.101.607,00	346.210.542.775,00
Saldo	325.168.796.084,39	27.992.594.607,00	353.161.390.691,39

Tabel 5. 172 Rincian Utang Pihak Ketiga per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	45.936.632.145,89	141.258.650,89	45.795.373.495,00
Dinas Kesehatan	18.210.223.108,00	0,00	18.210.223.108,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	18.378.247.253,00	13.668.579.281,00	4.709.667.972,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	9.472.055.134,00	6.990.538.453,00	2.481.516.681,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.822.945.019,50	5.515.560.381,50	130.307.384.638,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	23.322.219.350,00	3.478.071.673,00	19.844.147.677,00
Dinas Pemadam Kebakaran	203.987.012,00	0,00	203.987.012,00
Dinas Sosial	56.926.350,00	0,00	56.926.350,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	194.712.300,00	0,00	194.712.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.558.466.900,00	0,00	2.558.466.900,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.192.451.900,00	0,00	1.192.451.900,00
Dinas Perhubungan	9.740.182.375,00	0,00	9.740.182.375,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	762.846.380,00	0,00	762.846.380,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	847.543.715,00	0,00	847.543.715,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	858.970.540,00	7.975.350,00	850.995.190,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.764.000,00	0,00	35.764.000,00
Dinas Perikanan	13.963.800,00	0,00	13.963.800,00
Dinas Perkebunan	5.127.080.174,00	0,00	5.127.080.174,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1.058.193.150,00	0,00	1.058.193.150,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.111.081.500,00	49.950.000,00	1.061.131.500,00
Sekretariat Daerah	1.344.140.575,00	0,00	1.344.140.575,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	268.717.504,00	0,00	268.717.504,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71.940.845.775,00	71.961.402.671,00	-20.556.896,00
Badan Pendapatan Daerah	39.738.000,00	10.408.000,00	29.330.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	417.316.000,00	0,00	417.316.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	388.848.000,00	0,00	388.848.000,00
Inspektorat	1.480.710.700,00	0,00	1.480.710.700,00
Kecamatan Bengkalis	1.270.276.850,00	0,00	1.270.276.850,00
Kecamatan Bukit Batu	475.751.141,00	0,00	475.751.141,00
Kecamatan Siak Kecil	310.926.000,00	0,00	310.926.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	190.357.500,00	0,00	190.357.500,00
Kecamatan Pinggir	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.270.540,00	0,00	82.270.540,00
Jumlah	353.161.390.691,39	101.823.744.460,39	251.337.646.231,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pada nilai Utang Pihak Ketiga sebesar Rp353.161.390.691,39 terdapat utang ADD kurang salur tahun 2023 kepada desa sebesar Rp70.829.004.815,00.

Rincian Hutang Pihak Ketiga dapat dilihat pada:

Lampiran Hutang Pihak Ketiga

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
3.705.149.865,00	4.126.375.873,00	(421.226.008,00)

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.705.149.865,00. Saldo utang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.126.375.873,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.705.149.865,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD

SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	19.173.251,00	6.692.153,00	12.481.098,00
Dinas Kesehatan	33.249.943,00	47.301.179,00	-14.051.236,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	161.010.400,00	161.201.400,00	-191.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	187.766.280,00	175.459.200,00	12.307.080,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.277.675,00	28.577.869,00	699.806,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	17.711.208,00	15.920.861,00	1.790.347,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.333.345,00	294.000,00	11.039.345,00
Dinas Pemadam Kebakaran	14.731.985,00	15.458.034,00	-726.049,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.669.632,00	6.816.219,00	-1.146.587,00
Dinas Sosial	17.153.326,00	18.761.880,00	-1.608.554,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	15.197.778,00	-15.197.778,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.318.501,00	9.710.864,00	3.607.637,00
Dinas Ketahanan Pangan	9.935.466,00	9.974.253,00	-38.787,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.464.955,00	21.650.230,00	-3.185.275,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.629.077,00	14.793.604,00	6.835.473,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.262.123,00	11.093.869,00	168.254,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.819.665,00	11.134.693,00	684.972,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perhubungan	2.340.804.820,00	2.824.833.048,00	-484.028.228,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.366.533,00	12.550.121,00	1.816.412,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.550.647,00	19.590.997,00	-6.040.350,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68.968.186,00	18.459.799,00	50.508.387,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	46.061.557,00	50.035.642,00	-3.974.085,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.573.309,00	12.316.036,00	1.257.273,00
Dinas Perikanan	20.683.744,00	21.619.009,00	-935.265,00
Dinas Perkebunan	13.985.918,00	13.346.583,00	639.335,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	3.853.859,00	3.843.087,00	10.772,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	45.948.920,00	40.804.878,00	5.144.042,00
Sekretariat Daerah	287.118.625,00	273.254.338,00	13.864.287,00
Sekretariat DPRD	2.581.500,00	3.265.500,00	-684.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.598.881,00	20.411.390,00	-2.812.509,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.447.329,00	34.675.862,00	771.467,00
Badan Pendapatan Daerah	40.335.728,00	37.352.989,00	2.982.739,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	18.687.809,00	20.815.345,00	-2.127.536,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	14.095.902,00	10.590.145,00	3.505.757,00
Inspektorat	13.969.568,00	23.281.071,00	-9.311.503,00
Kecamatan Bengkalis	18.615.506,00	18.560.955,00	54.551,00
Kecamatan Bantan	7.002.887,00	6.968.233,00	34.654,00
Kecamatan Bukit Batu	11.847.402,00	12.510.403,00	-663.001,00
Kecamatan Siak Kecil	7.071.759,00	4.838.614,00	2.233.145,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	849.500,00	5.688.120,00	-4.838.620,00
Kecamatan Rupal Utara	2.107.518,00	3.961.705,00	-1.854.187,00
Kecamatan Mandau	45.101.232,00	45.189.323,00	-88.091,00
Kecamatan Pinggir	10.832.711,00	5.467.590,00	5.365.121,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.581.683,00	12.107.004,00	-5.525.321,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.705.149.865,00	4.126.375.873,00	-421.226.008,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.3.3. Ekuitas

	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	9.183.125.372.653,61	8.862.898.371.238,90	320.227.001.414,71

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.183.125.372.653,61 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.862.898.371.238,90.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkalis.

5.4.1. Pendapatan - LO

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	4.470.807.780.038,62	3.497.177.060.292,47	973.630.719.746,15

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.470.807.780.038,62 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.497.177.060.292,47 telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.174 Realisasi Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.222.806.149.524,64	337.901.425.973,30	884.904.723.551,34
Pendapatan Transfer	3.222.333.803.720,00	3.108.364.057.380,00	113.969.746.340,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	25.667.826.793,98	50.911.576.939,17	(25.243.750.145,19)
Jumlah	4.470.807.780.038,62	3.497.177.060.292,47	973.630.719.746,15

5.4.1.A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	1.222.806.149.524,64	337.901.425.973,30	884.904.723.551,34

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember untuk periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.222.806.149.524,64 Dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.175 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah	113.204.700.259,59	99.514.522.267,14	13.690.177.992,45
Pendapatan Retribusi Daerah	14.489.696.758,00	12.355.100.054,00	2.134.596.704,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	910.782.249.298,00	27.311.794.580,00	883.470.454.718,00
Lain-lain PAD yang Sah	184.329.503.209,05	198.720.009.072,16	(14.390.505.863,11)
Jumlah	1.222.806.149.524,64	337.901.425.973,30	884.904.723.551,34

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.A.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	113.204.700.259,59	99.514.522.267,14	13.690.177.992,45

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Hotel	4.925.627.683,00	3.435.634.577,14	1.489.993.105,86
Pajak Restoran	17.022.072.737,00	15.062.067.269,00	1.960.005.468,00
Pajak Hiburan	1.651.045.976,00	1.631.703.647,00	19.342.329,00
Pajak Reklame	1.344.377.536,59	1.119.086.882,00	225.290.654,59
Pajak Penerangan Jalan PLN	6.576.143.054,42	26.560.888.150,00	(19.984.745.095,58)
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	28.424.838.219,58	6.186.068.440,00	22.238.769.779,58
Pajak Parkir	326.816.873,00	386.354.005,00	(59.537.132,00)
Pajak Air Tanah	1.419.193.717,00	1.111.330.286,00	307.863.431,00
Pajak Sarang Burung Walet	541.073.728,00	567.110.748,00	(26.037.020,00)
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	6.920.935.550,00	6.924.910.650,00	(3.975.100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	34.001.290.462,00	30.364.315.980,00	3.636.974.482,00
Pajak BPHTB	10.051.284.723,00	6.165.051.633,00	3.886.233.090,00
Jumlah	113.204.700.259,59	99.514.522.267,14	13.690.177.992,45

Tabel 5.177 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pajak Hotel	4.129.578.252,00	4.925.627.683,00	(796.049.431,00) Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp. (41.082.428,00) dan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp837.131.859,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Restoran	16.746.168.222,00	17.022.072.737,00	(275.904.515,00) Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp(37.183.910,00) dan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp313.088.425,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Hiburan	1.651.045.976,00	1.651.045.976,00	0,00
Pajak Reklame	1.478.483.165,00	1.344.377.536,59	134.105.628,41 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya sebesar Rp436.039.965,67,00 pada Bapenda Pendapatan Diterima Dimuka Tahun berjalan (2023) sebesar Rp(523.327.754,08) pada Bapenda Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp(90.001.400,00) pada Bapenda dan Piutang 2023 sebesar Rp43.183.560,00 pada Bapenda
Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN	35.014.021.551,42	35.000.981.274,00	13.040.277,42
Pajak Parkir	326.816.873,00	326.816.873,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.370.853.566,00	1.419.193.717,00	(48.340.151,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

			Pembayaran sebelumnya Rp10.820.871,00 pada Bapenda	Piutang Tahun sebesar
				Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp59.161.022,00 pada Bapenda
Pajak Sarang Burung Walet	541.073.728,00	541.073.728,00		
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Batu) dan Batuan)	6.920.935.550,00	6.920.935.550,00		
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2)	27.864.616.194,00	34.001.290.462,00		(6.136.674.268,00)
			Penerimaan Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp(1.384.441.131,00) pada Bapenda	
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7.521.115.399,00 pada Bapenda	
Pajak BPHTB- Pemindahan Hak	10.051.284.723,00	10.051.284.723,00		0,00
Jumlah	106.094.877.800,42	113.204.700.259,59		(7.109.822.459,17)

5.4.1.A.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	14.489.696.758,00	12.355.100.054,00	2.134.596.704,00

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi pada LO Tahun 2023 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.178 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.311.240.000,00	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.154.350.000,00	1.156.500.000,00	(2.150.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	423.044.000,00	519.835.000,00	(96.791.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.498.731.000,00	1.419.738.500,00	78.992.500,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	34.471.000,00	44.276.000,00	(9.805.000,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	602.262.000,00	598.740.000,00	3.522.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	192.272.000,00	180.883.000,00	11.389.000,00
Jumlah	5.216.370.000,00	5.237.497.500,00	(21.127.500,00)

Retribusi Jasa Usaha**Tabel 5.179 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	555.135.000,00	423.950.000,00	131.185.000,00
Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	260.720.000,00	177.370.000,00	83.350.000,00
Retribusi Terminal	5.929.000,00	8.021.000,00	(2.092.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	276.395.000,00	239.185.000,00	37.210.000,00
Retribusi Tempat Rumah Potong Hewan	13.420.000,00	11.080.000,00	2.340.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	198.865.000,00	171.274.000,00	27.591.000,00
Retribusi Jasa Kepelabuhan	6.545.909.916,00	4.226.348.573,00	2.319.561.343,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	180.680.000,00	97.924.000,00	82.756.000,00
Jumlah	8.037.053.916,00	5.355.152.573,00	2.681.901.343,00

Retribusi Perizinan Tertentu**Tabel 5.180 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.236.272.842,00	1.460.627.381,00	(224.354.539,00)
Retribusi izin Usaha Perikanan	0,00	301.822.600,00	(301.822.600,00)
Jumlah	1.236.272.842,00	1.762.449.981,00	(526.177.139,00)

Realisasi akun Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a) Sekretariat Daerah

Tabel 5.181 Realisasi Pendapatan Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	152.450.000,00	138.210.000,00	14.240.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	264.750.000,00	230.175.000,00	34.575.000,00
Jumlah	417.200.000,00	368.385.000,00	48.815.000,00

b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.182 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	602.262.000,00	598.740.000,00	3.522.000,00
Jumlah	602.262.000,00	598.740.000,00	3.522.000,00

c) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.183 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi izin Usaha Perikanan	0,00	301.822.600,00	(301.822.600,00)
Jumlah	0,00	301.822.600,00	(301.822.600,00)

d) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.184 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	198.865.000,00	171.274.000,00	27.591.000,00
Jumlah	198.865.000,00	171.274.000,00	27.591.000,00

e) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.185 Realisasi Pendapatan Retribusi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	39.250.000,00	19.500.000,00	19.750.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	11.645.000,00	9.010.000,00	2.635.000,00
Jumlah	50.895.000,00	28.510.000,00	22.385.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian**Tabel 5.186 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	423.044.000,00	519.835.000,00	(96.791.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	192.272.000,00	180.883.000,00	11.389.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	260.720.000,00	177.370.000,00	83.350.000,00
Jumlah	876.036.000,00	878.088.000,00	(2.052.000,00)

g) Dinas Lingkungan Hidup**Tabel 5.187 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.240.000,00	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Jumlah	1.311.240.000,00	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)

h) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan**Tabel 5.188 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	13.420.000,00	11.080.000,00	2.340.000,00
Jumlah	13.420.000,00	11.080.000,00	2.340.000,00

i) Dinas Perhubungan**Tabel 5.189 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.154.350.000,00	1.156.500.000,00	(2.150.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.498.731.000,00	1.419.738.500,00	78.992.500,00
Retribusi Terminal	5.929.000,00	8.021.000,00	(2.092.000,00)
Retribusi Jasa Kepelabuhanan	6.545.909.916,00	4.226.348.573,00	2.319.561.343,00
Jumlah	9.204.919.916,00	6.810.608.073,00	2.394.311.843,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**Tabel 5.190 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	362.085.000,00	265.640.000,00	96.445.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.236.272.842,00	1.460.627.381,00	(224.354.539,00)
Jumlah	1.598.357.842,00	1.726.267.381,00	(127.909.539,00)

k) Dinas Pemadam Kebakaran**Tabel 5.191 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	34.471.000,00	44.276.000,00	(9.805.000,00)
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.350.000,00	600.000,00	750.000,00
Jumlah	35.821.000,00	44.876.000,00	(9.055.000,00)

Tabel 5.192 Realisasi Pendapatan Retribusi Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	417.200.000,00	368.385.000,00	48.815.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	180.680.000,00	399.746.600,00	(219.066.600,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	198.865.000,00	171.274.000,00	27.591.000,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	50.895.000,00	28.510.000,00	22.385.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	876.036.000,00	878.088.000,00	(2.052.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.311.240.000,00	1.317.525.000,00	(6.285.000,00)
Dinas Pertanian	13.420.000,00	11.080.000,00	2.340.000,00
Dinas Perhubungan	9.204.919.916,00	6.810.608.073,00	2.394.311.843,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.598.357.842,00	1.726.267.381,00	(127.909.539,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	35.821.000,00	44.876.000,00	(9.055.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	602.262.000,00	598.740.000,00	3.522.000,00
Jumlah	14.489.696.758,00	12.353.100.054,00	2.134.596.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.193 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.240.000,00	1.311.240.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	1.157.650.000,00	1.154.350.000,00	3.300.000,00
			Pembayaran piutang sebelumnya pada Tahun Dinas Perhubungan
Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran	333.044.000,00	423.044.000,00	(90.000.000,00)
			Pembayaran Piutang dan Pengakuan Piutang Tahun berjalan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.498.731.000,00	1.498.731.000,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	34.471.000,00	34.471.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	192.272.000,00	192.272.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	602.262.000,00	602.262.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	555.135.000,00	555.135.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	260.720.000,00	260.720.000,00	0,00
Retribusi Terminal	5.929.000,00	5.929.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasngarahan/Villa	276.395.000,00	276.395.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.469.863.727,00	6.545.909.916,00	(76.046.189,00)
			Selisih antara Pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran Piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp24.538.827 dikurangi dengan Pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp100.585.016 pada Dinas Perhubungan.
Retribusi izin Usaha Perikanan	180.680.000,00	180.680.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.236.272.842,00	1.236.272.842,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	198.865.000,00	198.865.000,00	0,00
	14.326.950.569,00	14.489.696.758,00	(162.746.189,00)

5.4.1.A.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
910.782.249.298,00	27.311.794.580,00	883.470.454.718,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Pembagian Laba atas Penyertaan Modal kepada PT. Bumi Laksmana Jaya sebesar Rp883.920.451.952,00 dan PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp26.861.797.346,00. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

5.4.1.A.4 Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
184.329.503.209,05	198.720.009.072,16	(14.390.505.863,11)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah untuk 31 Desember Tahun anggaran 2023 sebesar Rp184.329.503.209,05 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.194 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Per SKPD

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	28.095.254.261,00	16.992.771.928,00	11.102.482.333,00
Badan Daerah	411.375.719,00	328.161.551,00	83.214.168,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RSUD Bengkalis	57.682.687.070,76	51.933.179.960,00	5.749.507.110,76
RSUD Kec. Mandau	80.437.893.606,19	80.890.285.748,00	(452.392.141,81)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.701.292.552,10	48.574.609.885,16	(30.873.317.333,06)
Jumlah	184.329.503.209,05	198.720.009.072,16	(14.390.505.863,11)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut jenisnya adalah :

Tabel 5.195 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenalkan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	2.357.994.260,00	16.842.971.640,00	(14.484.977.380,00)
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	241.430.959,00	483.922.532,00	(242.491.573,00)
Pendapatan Bunga	5.947.621.667,99	71.473.394,01	5.876.148.273,98
Pendapatan Denda	411.375.719,00	328.161.551,00	83.214.168,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	505.671.927,02	24.944.402.619,00	(24.438.730.691,98)
Pendapatan dari Pengembalian	8.648.573.738,09	6.231.839.700,15	2.416.734.037,94
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan BLUD	166.215.834.937,95	149.816.237.636,00	16.399.597.301,95
Jumlah	184.329.503.209,05	198.720.009.072,16	(14.390.505.863,11)

Tabel 5.196 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Penerimaan Jasa Giro Daerah	2.357.994.260,00	2.357.994.260,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	241.430.959,00	241.430.959,00	0,00
Pendapatan Denda	411.375.719,00	411.375.719,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	505.671.927,02	505.671.927,02	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	9.948.127.345,09	8.648.573.738,09	1.299.553.607,00
			Merupakan Pembayaran Piutang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp1.299.553.607,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah Sewa	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	Pendapatan Sewa Dibayar Dimuka seTahun Rp1000.000,00 pada Dispora
Pendapatan Bunga	6.019.095.062,00	5.947.621.667,99	71.473.394,01	Merupakan pendapatan Remunerasi TDF Pada DBH sebesar Rp71.473.394,01 pada BPKAD
Pendapatan BLUD	157.832.808.816,86	166.215.834.937,95	(8.383.026.121,09)	Pembayaran Piutang Rp(3.245.620.627,00) Piutang 2023 4.407.677.925 dan Pendapatan Diterima Dimuka Rp11.916.666.76 pada RSUD Bengkalis
				Pembayaran Piutang 2023 Rp(3.708.499.400,00) Piutang Rp10.848.569.523,00 dan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp109.166.666,67 pada RSUD Mandau
				Pembayaran Piutang 2023 Rp(178.073.700,00) pada Dinas Kesehatan
Jumlah	177.316.504.088,97	184.329.503.209,05	(7.012.999.120,08)	

Realisasi akun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

Tabel 5.197 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan BLUD	166.215.834.937,95	16.992.771.928,00	149.223.063.009,95
Jumlah	166.215.834.937,95	16.992.771.928,00	149.223.063.009,95

b) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.198 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Denda	411.375.719,00	1.000.000,00	410.375.719,00
Jumlah	411.375.719,00	1.000.000,00	410.375.719,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.199 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

d) RSUD Bengkalis

Tabel 5.200 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkalis

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan BLUD	57.682.687.070,76	51.933.179.960,00	5.749.507.110,76
Jumlah	57.682.687.070,76	51.933.179.960,00	5.749.507.110,76

e) RSUD Kec. Mandau

Tabel 5.201 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kec. Mandau

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan BLUD	80.437.893.606,19	80.890.285.748,00	(452.392.141,81)
Jumlah	80.437.893.606,19	80.890.285.748,00	(452.392.141,81)

f) BPKAD

Tabel 5.202 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah PPKD

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	2.357.994.260,00	16.842.971.640,00	(14.484.977.380,00)
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	241.430.959,00	483.922.532,00	(242.491.573,00)
Pendapatan dari Pengembalian	8.648.573.738,09	6.231.839.700,15	2.416.734.037,94
Pendapatan Bunga	5.947.621.667,99	71.473.394,01	5.876.148.273,98
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	505.671.927,02	24.944.402.619,00	(24.438.730.691,98)
Jumlah	17.701.292.552,10	48.574.609.885,16	(30.873.317.333,06)

5.4.1.B. Pendapatan Transfer

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
3.222.333.803.720,00	3.108.364.057.380,00	113.969.746.340,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.222.333.803.720,00.

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.203 Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.040.601.100.617,00	2.938.250.668.552,00	102.350.432.065,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	181.732.703.103,00	170.113.388.828,00	11.619.314.275,00
Jumlah	3.222.333.803.720,00	3.108.364.057.380,00	113.969.746.340,00

Tabel 5.204 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Transfer

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	3.040.601.100.617,00	(3.040.601.100.617)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	129.623.338.071,00	0,00	129.623.338.071
Transfer Pemerintah Provinsi	196.266.249.291,00	181.732.703.103,00	14.533.546.188,00
Jumlah	325.889.587.362,00	3.222.333.803.720,00	(2.896.444.216.358,00)

Pembayaran Piutang BERMASA 2022 Rp(1.287.853.607,00)
Pencairan Remunerasi TDF Rp(71.473.394,01) Jasa Giro BOK Puskesmas Rp1.835.964,00
Pembayaran Piutang TDF 2022 Rp(279.720.241.835) , Piutang TDF 2023 Rp295.651.477.000, dan DAK Non Fisik sebesar Rp24.007.130.051,00.

Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di LO sebesar Rp129.623.338.071,00

Pembayaran Piutang DBH Provinsi Rp38.178.237.264,00 dan Penambahan Piutang DBH Provinsi Rp9.990.983.313,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.1.B.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
3.040.601.100.617,00	2.938.250.668.552,00	102.350.432.065,00

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2023:

Tabel 5.205 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil Pajak	1.589.297.067.420,00	1.767.108.765.746,00	(177.811.698.326,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak	803.949.381.000,00	554.525.310.255,00	249.424.070.745,00
Dana Alokasi Umum	354.410.355.837,00	335.727.628.000	18.682.727.837,00
Dana Alokasi Khusus	292.944.296.360,00	280.888.964.551,00	12.055.331.809,00
Jumlah	3.040.601.100.617,00	2.938.250.668.552,00	102.350.432.065,00

Tahun 2023 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar Rp3.040.601.100.617,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.B.1.a Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1.589.297.067.420,00	1.767.108.765.746,00	(177.811.698.326,00)

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.589.297.067.420,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Non Migas, Sektor Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata serta bagi Hasil PBB Sektor lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.206 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil PBB	1.546.127.612.000,00	1.710.341.353.906,00	(164.213.741.906,00)
Bagi Hasil PPh 21, 25 & 29	1.052.017.000,00	55.861.941.188,00	(54.809.924.188,00)
Bagi Hasil PBB Sektor lainnya	42.117.417.000,00	905.470.652,00	41.211.946.348,00
Jumlah	1.589.297.046.000,00	1.767.108.765.746,00	(177.811.719.746,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 31 Desember TA 2023 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lampiran rincian DBH PBB Bagian Daerah, dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp12.169.521,00 Perhutanan sebesar Rp7.017.820,00 Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.315.281,044,00. Rincian DBH PPB Biaya Pemungutan, dengan rincian Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebesar Rp74.941,00 dan sektor lainnya sebesar Rp68.681,00.

Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp36.238.797,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp1.023.238,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp35.215.559,00.

5.4.1.B.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
803.949.381.000,00	554.525.310.255,00	249.424.070.745,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp803.949.381.000,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.207 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	36.425.398.000,00	18.310.215.906,00	18.115.182.094,00
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.270.999.000,00	4.112.274.317,00	158.724.683,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	3.240.072.000,00	2.170.064.211,00	1.070.007.789,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	757.110.007.000,00	525.505.697.235,00	231.604.309.765,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	195.680,00	(195.680,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.902.905.000,00	4.426.862.906,00	(1.523.957.906,00)
Jumlah	803.949.381.000,00	554.525.310.255,00	249.424.070.745,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak per 31 Desember TA 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp716.671.692,00 dengan Rincian Minyak Bumi sebesar Rp713.768.787,00 dan Gas Bumi sebesar Rp2.902.905,00.

Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp3.240.072,00.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp3.188.055,00 dengan Rincian Iuran Tetap sebesar Rp170.812,00 dan Royalti sebesar Rp3.017.243,00.

Bagi Hasil SDA Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp14.264.994,00 dengan Rincian IIUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp14.264.994,00.

Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp4.153,00,-

5.4.1.B.1.c Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaiikan/(Penurunan)
354.410.355.837,00	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2023 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Lampiran V.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp354.410.355.837.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.208 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Alokasi Umum (DAU)	354.410.355.837,00	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00
Jumlah	354.410.355.837,00	335.727.628.000,00	18.682.727.837,00

5.4.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus (DAK)

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	292.944.296.360,00	280.888.964.551,00	12.055.331.809,00

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah sebagai berikut :

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.083.395.782,00.

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.209 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	183.950.000,00	22.848.236.670,00	(22.664.286.670,00)
DAK Reguler Bidang Pendidikan	5.850.695.441,00	29.801.633.298,00	(23.950.937.857,00)
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	799.880.000,00	(799.880.000,00)
Dak Penugasan Bidang Air Minum	0,00	7.350.954.854,00	(7.350.954.854,00)
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	4.304.445.000,00	(4.304.445.000,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	12.524.336.282,00	(12.524.336.282,00)
DAK Reguler Bid Kesehatan dan KB (Dinas Kesehatan, KB & RSUD Mandau) (212)	61.048.750.341,00	0,00	61.048.750.341,00
Jumlah	67.083.395.782,00	77.629.486.104,00	(10.546.090.322,00)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.545.702.000,00	104.271.442.960,00	8.274.259.040,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.549.750.000,00	2.411.750.000,00	138.000.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggara-raan PAUD	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	4.277.408.598,00	(4.277.408.598,00)
Bantuan Operasional KB	25.026.720.640,00	7.540.762.510,00	17.485.958.130,00
Jaminan Persalinan	0,00	992.540.000,00	(992.540.000,00)
Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	406.876.000,00	(406.876.000,00)
Pendapatan Dana BOS - Reguler	83.262.504.396,00	81.602.875.514,00	1.659.628.882,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.579.370.000,00	663.830.000,00	915.540.000,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	308.033.842,00	378.951.300,00	(70.917.458,00)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	250.928.400,00	362.760.965,00	(111.832.565,00)
PK2UKM	326.191.300,00	350.280.600,00	(24.089.300,00)
Jumlah	225.860.900.578,00	203.259.478.447,00	22.601.422.131,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.1.B.2 Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

5.4.1.B.2.a Dana Penyesuaian

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.1.B.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
181.732.703.103,00	170.113.388.828,00	11.619.314.275,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.078.995.340,00. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.B.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 5.211 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor	44.362.057.591,00	37.542.796.258,00	6.819.261.333,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.684.147.761,00	32.990.877.198,00	693.270.563,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.311.139.766,00	58.056.100.926,00	7.255.038.840,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.195.575.799,00	1.086.881.640,00	108.694.159,00
Pajak Rokok	27.013.782.186,00	27.478.890.306,00	(465.108.120,00)
Jumlah	171.566.703.103,00	157.155.546.328,00	14.411.156.775,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dari TA 2023 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 467 / III / 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2022) untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.733.749.793,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.773.825.708,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.609.177.514,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp95.118.380,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.551/IV/ 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.822.316.151,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.960.334.247,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.390.417.925,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp290.205.678,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 588 /V/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.439.916.074,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 589 /V/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp8.261.048.557,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 6765 /VII/ 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp7.093.368.488,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.6766/VII/ 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.884.268.241,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.557.829.275,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.707.957.097,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp293.054.470,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7376/X/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.867.911,251,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.886.372.547,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.368.272.547,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp302.888.988,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 7458 /X/ 2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2023 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp6.315.504.619,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7726/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Tiwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.447.478.282,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.636.614.031,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.279.368.347,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp203.918.037,00.

5.4.1.B.3.b Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kab./ Kota Lainnya

Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.166.000,00 yang berasal dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.212 Realisasi Bantaun Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	10.166.000.000,00	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)
Jumlah	10.166.000.000,00	12.957.842.500,00	(2.791.842.500,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.1/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp.6.264.000.000,- , Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.000.000,-, Rumah Sederhana Layak Huni sebesar Rp4.536.000.000,-

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.196.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp10.166.000.000,00 atau 99,71%.

5.4.1.C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	25.667.826.793,98	50.911.576.939,17	(25.243.750.145,19)

Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.268.876.350,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.213 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Hibah	25.542.962.126,90	48.772.395.362,43	(23.229.433.235,53)
Pendapatan Lainnya	124.864.667,08	2.139.181.576,74	(2.014.316.909,66)
Jumlah	25.667.826.793,98	50.911.576.939,17	(25.243.750.145,19)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.214 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pendapatan Hibah	0,00	25.542.962.126,90	(25.542.962.126,90)
			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan dan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta.
Pendapatan Lainnya	0,00	124.864.667,08	(124.864.667,08)
			Penyisihan Investasi Non Permanen dan Piutang Pajak
Jumlah	0,00	25.667.826.793,98	(25.667.826.793,98)

5.4.1.C.1 Pendapatan Hibah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
25.542.962.126,90	48.772.395.362,43	(23.229.433.235,53)

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Pusat, Kementerian, Masyarakat dan Organisasi Lainnya serta keterangan Aset yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.215 Realisasi Pendapatan Hibah Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Keterangan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	712.021.380,00	Hibah dari BKKBN berupa Alat Obat Kontrasepsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.416.100,00	Hibah Tanah Dari Kepala Desa Koto Pait Beringin Untuk Pembangunan Pos BPBD Talang Muandau
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.129.303.853,00	Hibah Transfer aset berupa Jalan Desa dari Dirjen Perumahan
Dinas Kesehatan	2.218.560.443,90	Hibah Persediaan berupa Alat Kesehatan dan Aset berupa Laptop dari Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	433.546.350,00	Hibah Pemprov Gedung Bangunan Lainnya di Tanjung Lapin Rupa Utara

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.015.859.000,00	Hibah Gedung BOT dari Pihak Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.375.000,00	Hibah dari BAWASLU berupa Gedung
Kecamatan Mandau	2.880.000,00	Hibah dari Kelompok Masyarakat berupa Aset Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu
Jumlah	25.542.962.126,90	

5.4.1.C.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
124.864.667,08	2.139.181.576,74	(2.014.316.909,66)

Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan yang bukan merupakan Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer, maupun Pendapatan Hibah. Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp124.864.667,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.216 Realisasi Pendapatan Lainnya Per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Keterangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37.969.223,00	Penyisihan Investasi Non Permanen
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.272.726,00	Penyisihan Investasi Non Permanen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48.406.346,00	Penyisihan Investasi Non Permanen
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	250.000,00	Penyisihan Investasi Non Permanen
Badan Pendapatan Daerah	36.966.372,08	Piutang Pajak
Jumlah	124.864.667,08	

5.4.2. Beban - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
4.153.179.413.956,50	3.837.364.443.753,93	315.814.970.202,57

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban Kabupaten Bengkalis per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.153.179.413.956,50. Beban LO dibagi menjadi Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.2.A. Beban Operasi

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
3.673.401.859.421,50	3.456.229.252.114,93	217.172.607.306,57

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban Operasi Kabupaten Bengkalis per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.673.401.859.421,50. Rincian dan realisasi Beban Operasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.217 Rincian Realisasi Beban Operasi

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	1.153.284.108.672,00	1.050.523.285.576,00	102.760.823.096,00
Beban Persediaan	322.241.697.930,85	279.510.071.373,28	42.731.626.557,57
Beban Jasa	730.805.048.075,72	708.725.207.438,56	22.079.840.637,16
Beban Pemeliharaan	159.345.352.317,00	142.043.212.605,74	17.302.139.711,26
Beban Perjalanan Dinas	239.114.973.885,00	238.533.506.012,00	581.467.873,00
Beban Subsidi	26.243.658.998,00	23.970.315.000,00	2.273.343.998,00
Beban Hibah	144.819.805.636,12	104.167.621.636,99	40.652.183.999,13
Beban Bantuan Sosial	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00
Beban Penyusutan	820.442.117.953,09	805.798.577.142,77	14.643.540.810,32
Beban Amortisasi	1.121.156.567,42	1.243.952.992,44	(122.796.425,02)
Beban Penyisihan	7.249.967.877,30	7.394.947.953,15	(144.980.075,85)
Piutang			
Beban Lain-lain	34.752.704.236,00	63.090.756.534,00	(28.338.052.298,00)
Jumlah	3.673.401.859.421,50	3.456.229.252.114,93	217.172.607.306,57

5.4.2.A.a Beban Pegawai

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
1.153.284.108.672,00	1.050.523.285.576,00	102.760.823.096,00

Beban Pegawai menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.218 Rincian dan Realisasi Beban Pegawai

Beban Pegawai	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Gaji dan Tunjangan	500.977.283.105,00	471.455.265.608,00
Tambahan Penghasilan PNS	481.433.103.307,00	375.342.947.234,20
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	135.796.245.897,00	143.146.541.209,00
Belanja Pegawai BLUD	1.091.510.000,00	4.013.845.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH	13.534.678.589,00	13.069.975.175,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.124.616.794,00	1.758.620.000,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.326.670.980,00	18.232.130.320,00
Jumlah	1.153.284.108.672,00	1.027.019.324.546,20



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, Beban Pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PAKPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, Beban Pegawai diakui keuka daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK. Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.153.284.108.672,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.219 Rincian Realisasi Beban Pegawai Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	580.967.546.723,00	525.868.986.025,00	55.098.560.698,00
Dinas Kesehatan	111.437.082.376,00	93.043.359.269,00	18.393.723.107,00
RSUD Bengkalis	40.369.157.902,00	37.773.229.703,00	2.595.928.199,00
RSUD Kecamatan Mandau	39.570.681.259,00	32.207.140.706,00	7.363.540.553,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.630.969.725,00	11.869.432.341,00	761.537.384,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	8.071.640.109,00	7.577.936.473,00	493.703.636,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.033.412.841,00	4.859.217.432,00	174.195.409,00
Dinas Pemadam Kebakaran	6.591.777.557,00	5.861.202.439,00	730.575.118,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	12.060.974.109,00	11.039.797.567,00	1.021.176.542,00
Dinas Sosial	7.693.824.427,00	7.891.323.913,00	(197.499.486,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.953.551.099,00	6.103.893.195,00	849.657.904,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.543.159.295,00	6.654.370.288,00	(111.210.993,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.951.694.419,00	4.879.743.816,00	71.950.603,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.672.374.645,00	7.941.634.654,00	730.739.991,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.665.772.391,00	9.647.197.501,00	18.574.890,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.227.428.617,00	5.217.502.484,00	9.926.133,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.867.250.343,00	5.620.191.905,00	247.058.438,00
Dinas Perhubungan	13.930.075.561,00	12.358.967.653,00	1.571.107.908,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.628.418.647,00	5.846.244.515,00	(217.825.868,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.205.017.488,00	6.233.845.632,00	(28.828.144,00)
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9.425.616.920,00	8.843.072.545,00	582.544.375,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.454.247.443,00	8.387.284.527,00	66.962.916,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.027.732.194,00	8.995.998.469,00	31.733.725,00
Dinas Perikanan	7.691.160.666,00	7.421.328.308,00	269.832.358,00
Dinas Perkebunan	7.780.669.273,00	7.266.529.862,00	514.139.411,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	15.955.181.845,00	16.766.574.440,00	(811.392.595,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.155.174.876,00	8.106.075.342,00	49.099.534,00
Sekretariat Daerah	30.273.287.862,00	30.001.748.865,00	271.538.997,00
Sekretariat DPRD	41.248.187.932,00	40.767.406.081,00	480.781.851,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.732.624.983,00	7.791.757.787,00	940.867.196,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.922.485.437,00	9.882.759.395,00	1.039.726.042,00
Badan Pendapatan Daerah	19.552.368.314,00	16.303.537.683,00	3.248.830.631,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.323.999.129,00	7.489.680.965,00	834.318.164,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.941.165.579,00	4.487.204.047,00	453.961.532,00
Inspektorat	9.080.313.590,00	8.018.462.890,00	1.061.850.700,00
Kantor Camat Bengkalis	7.328.833.138,00	6.723.031.245,00	605.801.893,00
Kantor Camat Bantan	3.313.854.339,00	3.123.382.461,00	190.471.878,00
Kantor Camat Bukit Batu	4.219.884.279,00	3.829.369.488,00	390.514.791,00
Kantor Camat Siak Kecil	4.137.066.795,00	3.582.715.689,00	554.351.106,00
Kantor Camat Bandar Laksmiana	2.519.296.279,00	2.429.866.061,00	89.430.218,00
Kantor Camat Rupa	5.118.889.417,00	4.994.032.158,00	124.857.259,00
Kantor Camat Rupa Utara	3.341.003.459,00	3.308.868.300,00	32.135.159,00
Kantor Camat Mandau	10.454.526.639,00	9.956.677.119,00	497.849.520,00
Kantor Camat Pinggir	4.932.741.110,00	4.143.143.470,00	789.597.640,00
Kantor Camat Bathin Solapan	2.909.364.117,00	2.614.103.502,00	295.260.615,00
Kantor Camat Talang Muandau	2.365.252.439,00	2.068.731.481,00	296.520.958,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.007.371.085,00	4.724.725.885,00	282.645.200,00
Jumlah	1.153.284.108.672,00	1.050.523.285.576,00	102.760.823.096,00

5.4.2.A.b Beban Persediaan

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	322.241.697.930,85	279.510.071.373,28	42.731.626.557,57



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Persediaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.220 Rincian Realisasi Beban Persediaan

Beban Persediaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Bahan Pakai Habis	235.654.575.069,94	179.803.879.733,96
Beban Persediaan Bahan/Material	100.699.000,00	41.448.940,71
Beban Persediaan BOS	24.337.490.471,00	55.247.946.759,00
Beban Persediaan BLUD	62.148.933.389,91	44.416.795.939,61
Jumlah	322.241.697.930,85	279.510.071.373,28

Pencatatan Persediaan Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Persediaan, hingga pada akhir periode, Beban Persediaan yang masih menjadi Persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional. Realisasi Beban Persediaan periode per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp322.241.697.930,85 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.221 Rincian Realisasi Beban Persediaan Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	30.182.008.642,00	29.070.757.610,00	1.111.251.032,00
Dinas Kesehatan	28.878.443.163,15	22.106.880.683,30	6.771.562.479,85
RSUD Bengkulu	31.436.136.920,00	26.721.189.520,00	4.714.947.400,00
RSUD Kecamatan Mandau	42.717.296.596,02	36.920.868.789,23	5.796.427.806,79
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.366.897.990,25	1.991.383.362,00	1.375.514.628,25
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	16.699.816.500,00	9.949.534.418,00	6.750.282.082,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.729.601.450,00	1.876.093.100,00	(146.491.650,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	579.077.590,00	942.095.760,00	(363.018.170,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	731.906.800,00	558.951.400,00	172.955.400,00
Dinas Sosial	2.021.117.200,00	1.983.275.550,00	37.841.650,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.352.123.984,00	2.034.739.853,00	(682.615.869,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.794.523.425,00	1.589.002.988,00	205.520.437,00
Dinas Ketahanan Pangan	998.551.970,00	1.083.078.391,00	(84.526.421,00)
Dinas Lingkungan Hidup	7.072.438.760,00	7.655.664.885,00	(583.226.125,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.941.791.974,00	3.581.394.144,00	(639.602.170,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.591.355.007,00	2.750.294.700,00	(158.939.693,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.423.583.324,25	2.822.763.793,50	(399.180.469,25)
Dinas Perhubungan	5.980.444.450,00	3.694.964.838,00	2.285.479.612,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	990.185.950,00	972.875.508,00	17.310.442,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.169.182.100,00	1.287.816.600,00	(118.634.500,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.199.302.005,00	776.455.200,00	1.422.846.805,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.324.754.613,00	5.313.310.510,20	1.011.444.102,80
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	498.028.912,00	742.471.050,00	(244.442.138,00)
Dinas Perikanan	4.332.150.565,00	3.813.091.233,00	519.059.332,00
Dinas Perkebunan	3.890.484.941,00	4.126.826.042,00	(236.341.101,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	7.132.127.501,00	3.102.819.163,00	4.029.308.338,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.645.833.862,00	3.697.792.007,00	(51.958.145,00)
Sekretariat Daerah	25.828.469.371,18	25.003.468.720,05	825.000.651,13
Sekretariat DPRD	22.845.076.125,00	25.147.940.030,00	(2.302.863.905,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.822.108.232,00	2.848.236.830,00	(26.128.598,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.231.142.687,00	10.678.765.151,00	3.552.377.536,00
Badan Pendapatan Daerah	5.498.654.629,00	3.860.857.748,00	1.637.796.881,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.657.592.450,00	1.151.185.450,00	506.407.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	731.853.300,00	912.802.400,00	(180.949.100,00)
Inspektorat	1.155.883.679,00	1.296.057.066,00	(140.173.387,00)
Kantor Camat Bengkalis	2.604.726.354,00	1.989.478.475,00	615.247.879,00
Kantor Camat Bantan	1.525.840.352,00	1.704.360.000,00	(178.519.648,00)
Kantor Camat Bukit Batu	1.681.258.980,00	1.594.972.828,00	86.286.152,00
Kantor Camat Siak Kecil	1.249.028.200,00	1.000.179.030,00	248.849.170,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	1.605.147.900,00	1.120.974.700,00	484.173.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Rupert	3.212.810.300,00	3.199.808.752,00	13.001.548,00
Kantor Camat Rupert Utara	1.435.772.400,00	1.380.095.000,00	55.677.400,00
Kantor Camat Mandau	11.370.741.037,00	9.751.030.891,00	1.619.710.146,00
Kantor Camat Pinggir	2.202.357.700,00	1.680.043.204,00	522.314.496,00
Kantor Camat Batin Solapan	2.845.224.959,00	2.238.413.350,00	606.811.609,00
Kantor Camat Talang Muandau	1.955.171.500,00	978.060.000,00	977.111.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.103.671.581,00	803.950.550,00	1.299.721.031,00
Jumlah	322.241.697.930,85	279.510.071.373,28	42.731.626.557,57

5.4.2.A.c Beban Jasa

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
730.805.048.075,72	708.725.207.438,56	22.079.840.637,16

Beban Jasa menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.222 Rincian Realisasi Beban Jasa

Beban Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Kantor	466.827.701.376,00	482.485.307.770,90	(15.657.606.394,90)
Premi Asuransi	83.297.492.666,00	55.620.036.708,78	27.677.455.957,22
Sewa Peralatan dan Mesin	5.365.905.880,00	7.590.023.498,00	(2.224.117.618,00)
Sewa Gedung dan Bangunan	9.937.401.785,67	10.258.237.650,00	(320.835.864,33)
Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.850.000,00	22.000.000,00	1.850.000,00
Sewa Aset Tetap Lainnya	258.149.500,00	203.650.000,00	54.499.500,00
Sewa Tanah	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
Jasa Konsultasi	12.825.053.167,00	14.734.524.210,00	(1.909.471.043,00)
Beasiswa Pendidikan PNS	1.066.500.000,00	367.500.000,00	699.000.000,00
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	20.362.996.821,00	23.551.019.057,00	(3.188.022.236,00)
Beban Jasa BLUD	93.618.423.852,05	96.774.371.458,88	(3.155.947.606,83)
Beban Jasa Dana BOS	37.169.573.028,00	17.118.537.085,00	20.051.035.943,00
Jumlah	730.805.048.075,72	708.725.207.438,56	22.079.840.637,16

Beban Jasa merupakan Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp730.805.048.075,72 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.223 Rincian Realisasi Beban Jasa Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	138.747.504.284,00	152.357.565.348,00	(13.610.061.064,00)
Dinas Kesehatan	126.708.806.928,00	88.379.079.773,68	38.329.727.154,32



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

RSUD Bengkulu	60.667.481.988,00	65.618.578.441,00	(4.951.096.453,00)
RSUD Kecamatan Mandau	63.814.115.567,05	80.857.082.253,88	(17.042.966.686,83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.308.246.985,00	12.917.240.247,00	1.391.006.738,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	4.901.393.601,00	5.899.288.765,00	(997.895.164,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.238.437.328,00	5.345.070.269,00	1.893.367.059,00
Dinas Pemadam Kebakaran	8.453.965.341,67	8.389.589.018,00	64.376.323,67
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	13.156.166.181,00	12.549.515.390,00	606.650.791,00
Dinas Sosial	5.514.124.862,00	6.378.893.015,00	(864.768.153,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.662.617.307,00	4.019.126.876,00	3.643.490.431,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.973.233.887,00	4.138.687.159,00	(165.453.272,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.090.957.451,00	1.165.257.523,00	(74.300.072,00)
Dinas Lingkungan Hidup	26.133.561.640,00	25.871.592.683,00	261.968.957,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.488.145.692,00	7.626.233.267,00	(138.087.575,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	22.520.909.028,00	22.181.619.919,00	339.289.109,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.861.084.758,00	4.308.530.022,00	552.554.736,00
Dinas Perhubungan	42.702.826.984,00	36.198.764.758,00	6.504.062.226,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	3.896.681.955,00	4.466.803.083,00	(570.121.128,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.613.906.776,00	2.647.101.128,00	(33.194.352,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.771.364.428,00	2.238.629.589,00	532.734.839,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.644.932.148,00	12.713.842.628,00	(2.068.910.480,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.295.409.732,00	3.194.906.062,00	100.503.670,00
Dinas Perikanan	3.129.443.033,00	3.552.790.068,00	(423.347.035,00)
Dinas Perkebunan	1.743.119.465,00	2091755778,00	(348.636.313,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4.526.715.994,00	4.460.996.378,00	65.719.616,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.541.070.897,00	8.969.410.452,00	571.660.445,00
Sekretariat Daerah	34.362.318.987,00	28.268.888.753,00	6.093.430.234,00
Sekretariat DPRD	15.278.514.495,00	14.840.291.671,00	438.222.824,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.575.618.360,00	5.387.497.947,00	(811.879.587,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.927.144.239,00	15.731.571.397,00	195.572.842,00
Badan Pendapatan Daerah	5.945.229.521,00	6.710.300.227,00	(765.070.706,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.686.568.227,00	3.810.921.878,00	875.646.349,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.068.805.733,00	2.172.979.416,00	(104.173.683,00)
Inspektorat	2.016.764.262,00	1.546.752.540,00	470.011.722,00
Kantor Camat Bengkalis	3.844.065.995,00	3.716.321.388,00	127.744.607,00
Kantor Camat Bantan	1.354.358.852,00	1.423.403.605,00	(69.044.753,00)
Kantor Camat Bukit Batu	2.483.354.318,00	2.520.889.275,00	(37.534.957,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.449.449.695,00	1.359.926.316,00	89.523.379,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	1.731.821.680,00	1.566.729.624,00	165.092.056,00
Kantor Camat Rupat	4.593.509.960,00	4.562.616.173,00	30.893.787,00
Kantor Camat Rupat Utara	1.848.598.953,00	1.583.505.748,00	265.093.205,00
Kantor Camat Mandau	14.767.797.384,00	15.277.447.825,00	(509.650.441,00)
Kantor Camat Pinggir	3.929.857.714,00	3.610.363.660,00	319.494.054,00
Kantor Camat Batin Solapan	2.431.829.232,00	2.597.233.644,00	(165.404.412,00)
Kantor Camat Talang Muandau	1.978.885.067,00	1.974.923.975,00	3.961.092,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.424.331.161,00	1.524.692.483,00	1.899.638.678,00
Jumlah	730.805.048.075,72	708.725.207.438,56	22.079.840.637,16

5.4.2.A.d Beban Pemeliharaan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
159.345.352.317,00	142.043.212.605,74	17.302.139.711,26

Beban Pemeliharaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.224 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.062.586.513,00	37.910.708.527,00	3.151.877.986,00
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	20.070.266.320,00	19.105.886.360,74	964.379.959,26
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.462.603.120,00	83.412.550.457,00	7.050.052.663,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Pemeliharaan Tanah	99.840.000,00	85.763.000,00	14.077.000,00
Beban Pemeliharaan BLUD	3.862.845.465,00	1.499.524.261,00	2.363.321.204,00
Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	272.515.273,00	28.780.000,00	243.735.273,00
Jumlah	159.345.352.317,00	142.043.212.605,74	17.302.139.711,26

Tabel 5.225 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	14.250.531.666,00	11.263.468.618,00	2.987.063.048,00
Dinas Kesehatan	4.691.293.699,00	1.406.896.316,00	3.284.397.383,00
RSUD Bengkulu	2.278.341.680,00	1.611.931.770,00	666.409.910,00
RSUD Kecamatan Mandau	1.768.200.486,00	297.551.867,00	1.470.648.619,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.785.154.909,00	79.197.041.860,00	2.588.113.049,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	1.547.810.080,00	1.185.844.207,00	361.965.873,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.805.255,00	976.092.125,00	(254.286.870,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	655.872.231,00	922.070.031,00	(266.197.800,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	209.750.000,00	245.700.000,00	(35.950.000,00)
Dinas Sosial	637.314.494,00	579.341.933,00	57.972.561,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	217.220.187,00	203.245.000,00	13.975.187,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	161.249.578,00	164.790.295,00	(3.540.717,00)
Dinas Ketahanan Pangan	293.216.690,00	339.322.168,00	(46.105.478,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.191.218.155,00	3.551.531.742,00	(1.360.313.587,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	638.382.300,00	467.354.000,00	171.028.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	618.049.855,00	725.477.993,00	(107.428.138,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	505.333.677,00	437.100.245,74	68.233.431,26
Dinas Perhubungan	11.059.986.007,00	9.903.138.019,00	1.156.847.988,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	521.401.663,00	491.449.721,00	29.951.942,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	442.397.684,00	536.502.564,00	(94.104.880,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	578.517.678,00	480.815.863,00	97.701.815,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.953.801.157,00	602.411.360,00	2.351.389.797,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	616.816.151,00	1.214.609.270,00	(597.793.119,00)
Dinas Perikanan	459.620.815,00	601.067.852,00	(141.447.037,00)
Dinas Perkebunan	7.448.280.163,00	2.931.767.863,00	4.516.512.300,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	788.254.738,00	863.312.900,00	(75.058.162,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	418.380.550,00	208.023.675,00	210.356.875,00
Sekretariat Daerah	9.669.549.975,00	8.975.345.665,00	694.204.310,00
Sekretariat DPRD	2.133.198.055,00	2.054.520.115,00	78.677.940,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	797.186.299,00	678.103.617,00	119.082.682,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.635.856.174,00	2.344.540.796,00	291.315.378,00
Badan Pendapatan Daerah	1.664.610.558,00	2.309.616.763,00	(645.006.205,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	276.181.959,00	478.043.884,00	(201.861.925,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	419.497.250,00	423.438.825,00	(3.941.575,00)
Inspektorat	305.784.507,00	217.383.069,00	88.401.438,00
Kantor Camat Bengkalis	166.840.180,00	349.417.800,00	(182.577.620,00)
Kantor Camat Bantan	160.890.175,00	22.440.000,00	138.450.175,00
Kantor Camat Bukit Batu	140.751.300,00	123.536.798,00	17.214.502,00
Kantor Camat Siak Kecil	92.560.000,00	90.890.500,00	1.669.500,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	154.446.000,00	378.449.998,00	(224.003.998,00)
Kantor Camat Rupert	215.270.000,00	518.355.625,00	(303.085.625,00)
Kantor Camat Rupert Utara	115.813.000,00	252.304.750,00	(136.491.750,00)
Kantor Camat Mandau	1.190.274.403,00	754.036.491,00	436.237.912,00
Kantor Camat Pinggir	111.014.000,00	195.080.000,00	(84.066.000,00)
Kantor Camat Batin Solapan	75.945.000,00	71.693.289,00	4.251.711,00
Kantor Camat Talang Muandau	168.240.000,00	116.270.000,00	51.970.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	393.241.934,00	281.885.363,00	111.356.571,00
Jumlah	159.345.352.317,00	142.043.212.605,74	17.302.139.711,26



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.2.A.e Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
239.114.973.885,00	238.533.506.012,00	581.467.873,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.226 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.219.136.658,00	111.684.322.375,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	123.012.637.701,00	126.849.183.637,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.399.466.514,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	1.223.844.526,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas BOS	1.259.888.486,00	0,00
Jumlah	239.114.973.885,00	238.533.506.012,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp239.114.973.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.227 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	11.556.815.086,00	8.959.821.954,00	2.596.993.132,00
Dinas Kesehatan	20.769.561.909,00	20.056.814.638,00	712.747.271,00
RSUD Bengkalis	904.316.486,00	1.139.477.746,00	(235.161.260,00)
RSUD Kecamatan Mandau	1.618.478.619,00	1.224.849.169,00	393.629.450,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.238.660.577,00	8.818.877.786,00	(580.217.209,00)
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	7.080.186.995,00	4.495.582.438,00	2.584.604.557,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.365.333.984,00	3.553.616.733,00	(188.282.749,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	1.199.518.341,00	1.734.116.662,00	(534.598.321,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.605.154.570,00	2.203.406.472,00	401.748.098,00
Dinas Sosial	3.075.390.845,00	3.745.058.247,00	(669.667.402,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.466.447.344,00	2.598.544.057,00	(132.096.713,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.085.106.772,00	3.766.301.002,00	(681.194.230,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.620.811.027,00	1.777.361.223,00	(156.550.196,00)
Dinas Lingkungan Hidup	4.009.331.047,00	4.387.694.682,00	(378.363.635,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.792.279.615,00	3.219.561.598,00	(427.281.983,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.921.529.613,00	6.046.417.576,00	(1.124.887.963,00)
Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana	4.643.411.402,00	3.552.583.911,00	1.090.827.491,00
Dinas Perhubungan	5.284.599.055,00	3.205.884.799,00	2.078.714.256,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	3.722.447.993,00	3.832.472.134,00	(110.024.141,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.219.931.720,00	4.634.410.790,00	(414.479.070,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.780.463.140,00	2.256.180.538,00	524.282.602,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	3.396.003.093,00	5.542.540.168,00	(2.146.537.075,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	652.680.310,00	1.377.522.034,00	(724.841.724,00)
Dinas Perikanan	2.823.452.301,00	3.389.883.391,00	(566.431.090,00)
Dinas Perkebunan	3.130.248.380,00	457.108.264,00	(1.440.834.268,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.930.128.237,00	319.572.127,00	734.406.963,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.705.097.281,00	6.527.132.869,00	(1.822.035.588,00)
Sekretariat Daerah	31.804.334.357,00	29.104.689.076,00	2.699.645.281,00
Sekretariat DPRD	31.501.797.155,00	33.088.677.254,00	(1.586.880.099,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.041.296.593,00	7.584.255.405,00	457.041.188,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.047.681.152,00	14.137.286.166,00	(1.089.605.014,00)
Badan Pendapatan Daerah	10.710.764.463,00	11.757.248.455,00	(1.046.483.992,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.590.658.937,00	3.685.839.362,00	904.819.575,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.996.091.379,00	2.144.269.915,00	(148.178.536,00)
Inspektorat	4.184.348.266,00	4.888.045.141,00	(703.696.875,00)
Kantor Camat Bengkalis	910.265.129,00	845.227.874,00	65.037.255,00
Kantor Camat Bantan	575.273.334,00	498.275.905,00	76.997.429,00
Kantor Camat Bukit Batu	734.355.000,00	724.187.565,00	10.167.435,00
Kantor Camat Siak Kecil	651.944.000,00	753.300.000,00	(101.356.000,00)
Kantor Camat Bandar Laksmana	694.127.093,00	707.267.468,00	(13.140.375,00)
Kantor Camat Rupert	1.290.917.536,00	1.336.359.072,00	(45.441.536,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Rupat Utara	1.209.451.425,00	1.081.417.650,00	128.033.775,00
Kantor Camat Mandau	2.376.228.425,00	1.903.192.069,00	473.036.356,00
Kantor Camat Pinggir	944.698.112,00	942.105.385,00	2.592.727,00
Kantor Camat Batin Solapan	1.269.488.595,00	997.570.700,00	271.917.895,00
Kantor Camat Talang Muandau	926.261.271,00	1.151.760.878,00	(225.499.607,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.057.605.921,00	1.389.614.133,00	1.667.991.788,00
Jumlah	239.114.973.885,00	238.533.506.012,00	581.467.873,00

5.4.2.A.f Beban Subsidi

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
26.243.658.998,00	23.970.315.000,00	2.273.343.998,00

Beban Subsidi merupakan beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan realisasi periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.243.658.998,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Rincian Realisasi Beban Subsidi

Beban Subsidi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	11.721.579.498,00	12.000.000.000,00	(278.420.502,00)
Belanja Subsidi Kepada BUMN	14.494.379.500,00	11.970.315.000,00	2.524.064.500,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00
Jumlah	26.243.658.998,00	23.970.315.000,00	2.273.343.998,00

5.4.2.A.g Beban Hibah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
144.819.805.636,12	104.167.621.636,99	40.652.183.999,13

Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 5.229 Rincian Realisasi Beban Hibah

Beban Hibah	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD	141.357.301.636,12	104.167.621.636,99
Partai Politik	3.462.504.000,00	0,00
Jumlah	144.819.805.636,12	104.167.621.636,99



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp144.819.805.636,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Rincian Realisasi Beban Hibah Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	11.806.498.596,00	9.675.808.138,41	2.130.690.457,59
Dinas Kesehatan	766.601.305,90	496.135.899,00	270.465.406,90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.467.571.837,22	18.671.183.938,58	(12.203.612.101,36)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	33.789.865.872,00	27.340.440.313,00	6.449.425.559,00
Dinas Sosial	329.111.000,00	1.052.582.220,00	(723.471.220,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	180.810.000,00	21.838.000,00	158.972.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.078.855.868,00	24.628.690.455,00	(18.549.834.587,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
Dinas Perikanan	0,00	399.251.185,00	(399.251.185,00)
Sekretariat Daerah	5.724.436.673,00	19.461.606.813,00	(13.737.170.140,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	0,00	19.900.000,00	(19.900.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.540.627.400,00	1.881.246.000,00	30.659.381.400,00
Kecamatan Mandau	338.065.322,00	218.938.675,00	119.126.647,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.831.359.994,00	0,00	7.831.359.994,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.966.001.768,00	0,00	38.966.001.768,00
Jumlah	144.819.805.636,12	104.167.621.636,99	40.652.183.999,13



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.2.A.h Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
33.981.267.273,00	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00

Rincian Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya sebagai berikut:

Tabel 5.231 Realisasi Beban bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat pada SKPD	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00
Jumlah	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.981.267.273,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.232 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Sosial	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00
Jumlah	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00	2.753.469.423,00

5.4.2.A.i Beban Penyusutan

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
820.442.117.953,09	805.798.577.142,77	14.643.540.810,32

Beban Penyusutan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.233 Rincian Realisasi Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.332.554.855,71	125.330.246.074,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.630.283.767,59	110.837.786.949,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.264.363.872,56	569.463.741.883,93
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	214.915.457,23	166.802.235,67
Jumlah	820.442.117.953,09	805.798.577.142,77

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2023 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp820.442.117.953,09 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.234 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	54.045.743.140,78	56.075.043.674,39	(2.029.300.533,61)

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	19.795.234.992,31	17.849.767.167,40	1.945.467.824,91
RSUD Bengkulu	25.735.161.958,00	27.843.275.828,00	(2.108.113.870,00)
RSUD Kecamatan Mandau	18.418.500.206,20	18.018.501.303,62	400.007.902,58
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.590.478.613,36	370.802.124.851,51	35.788.353.761,85
Dinas Pemukiman, Perumahan dan pertanahan	127.070.785.263,16	122.310.043.699,17	4.760.741.563,99
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.340.908.180,00	1.249.267.555,00	91.640.625,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.666.273.702,00	1.064.082.063,00	602.191.639,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	437.256.036,00	472.672.167,00	(35.416.131,00)
Dinas Sosial	3.124.977.167,00	2.966.872.458,10	158.104.708,90
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.411.225.452,00	1.328.840.372,00	82.385.080,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	526.765.616,00	372.316.993,00	154.448.623,00
Dinas Ketahanan Pangan	401.344.658,00	251.354.141,00	149.990.517,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.625.571.990,00	21.778.957.491,07	(16.153.385.501,07)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.755.654.551,00	2.985.154.031,00	770.500.520,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	812.418.016,00	935.973.589,00	(123.555.573,00)
Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	899.597.188,00	832.174.684,00	67.422.504,00
Dinas Perhubungan	28.960.808.629,11	62.572.369.696,00	(33.611.561.066,89)
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1.854.714.977,00	2.316.376.892,00	(461.661.915,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	722.530.216,00	641.270.549,00	81.259.667,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	3.217.773.672,00	540.243.546,00	2.677.530.126,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.842.622.435,00	6.797.602.449,00	1.045.019.986,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.038.338.472,00	1.123.611.639,00	(85.273.167,00)
Dinas Perikanan	1.574.164.206,00	1.294.993.373,00	279.170.833,00
Dinas Perkebunan	2.798.340.081,00	1032256013,00	1.766.084.068,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	7.269.081.815,00	6096548531,00	1.172.533.284,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.231.369.736,00	5.256.204.824,33	15.975.164.911,67



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat Daerah	14.841.363.837,00	13.521.635.224,00	1.319.728.613,00
Sekretariat DPRD	4.100.796.982,00	5.400.485.279,00	(1.299.688.297,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.201.930.888,00	1.774.880.000,00	467.073.168,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.810.596.579,57	19.090.134.896,00	(1.279.538.316,43)
Badan Pendapatan Daerah	2.338.365.831,00	1.764.319.794,00	574.046.037,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	895.144.327,00	717.901.260,00	177.243.067,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	876.588.807,00	803.555.249,00	73.033.558,00
Inspektorat	837.551.194,00	358.332.593,00	479.218.601,00
Kantor Camat Bengkalis	2.893.513.892,00	3.135.340.756,08	(241.826.864,08)
Kantor Camat Bantan	1.479.701.269,00	1.757.807.271,01	(278.106.002,01)
Kantor Camat Bukit Batu	2.079.850.790,00	2.222.115.088,00	(142.264.298,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.024.072.385,00	1.150.425.997,03	(126.353.612,03)
Kantor Camat Bandar Laksamana	966.512.747,00	1.273.908.810,00	(307.396.063,00)
Kantor Camat Rupat	4.689.731.018,00	4.687.287.235,94	2.443.782,06
Kantor Camat Rupat Utara	1.442.472.526,00	1.800.848.101,96	(358.375.575,96)
Kantor Camat Mandau	6.717.876.384,24	6.856.826.719,23	(138.950.334,99)
Kantor Camat Pinggir	2.393.952.019,00	2.573.066.084,73	(179.114.065,73)
Kantor Camat Batin Solapan	3.212.625.284,36	1.294.371.988,00	1.918.253.296,36
Kantor Camat Talang Muandau	1.166.494.402,00	698.120.509,00	468.373.893,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	245.321.022,00	109.331.206,00	135.989.816,00
Jumlah	820.442.117.953,09	805.798.577.142,77	14.643.540.810,32

5.4.2.A.j Beban Amortisasi

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	1.121.156.567,42	1.243.952.992,44	(122.796.425,02)

Sedangkan Beban Amortisasi menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.235 Rincian Realisasi Beban Amortisasi

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Amortisasi Goodwill	1.106.317.567,42	1.229.113.992,44	(122.796.425,02)
Beban Amortisasi Lisensi dan franchise- LO	14.839.000,00	14.839.000,00	0,00
Jumlah	1.121.156.567,42	1.243.952.992,44	(122.796.425,02)

Beban Amortisasi adalah Beban Amortisasi yang berasal dari Belanja Aset Tidak Berwujud Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2023. Beban Amortisasi per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.121.156.567,42 dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.236 Rincian Realisasi Beban Amortisasi Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	125.393.119,00	180.262.126,00	(54.869.007,00)
Dinas Kesehatan	88.187.865,75	77.671.600,00	10.516.265,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.511.312,50	115.061.750,00	(21.550.437,50)
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	34.030.459,00	36.137.500,00	(2.107.041,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.358.333,33	12.430.000,00	(2.071.666,67)
Dinas Pemadam Kebakaran	12.705.250,00	15.957.250,00	(3.252.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.487.500,00	2.081.250,00	10.406.250,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.231.500,00	18.694.500,00	(12.463.000,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	58.161.958,00	51.984.875,00	6.177.083,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	29.912.500,00	18.078.125,00	11.834.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	8.229.166,67	(8.229.166,67)
Dinas Perhubungan	178.058.120,00	137.251.600,00	40.806.520,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	13.515.450,00	13.515.450,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	18.964.583,33	37.562.500,00	(18.597.916,67)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.633.250,00	0,00	5.633.250,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	7.730.560,10	(7.730.560,10)
Dinas Perikanan	0,00	8.291.666,67	(8.291.666,67)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.901.666,67	12.485.000,00	416.666,67
Sekretariat Daerah	31.212.500,00	28.087.810,00	3.124.690,00
Sekretariat DPRD	17.992.500,00	25.490.000,00	(7.497.500,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91.694.179,00	66.999.163,00	24.695.016,00
Badan Pendapatan Daerah	212.402.604,17	292.630.614,58	(80.228.010,41)
Inspektorat	18.741.000,00	0,00	18.741.000,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	6.187.500,00	6.187.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Mandau	31.193.416,67	59.937.985,42	(28.744.568,75)
Kantor Camat Talang Muandau	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00
Jumlah	1.121.156.567,42	1.243.952.992,44	(122.796.425,02)

5.4.2.A.k Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
7.249.967.877,30	7.394.947.953,15	(144.980.075,85)

Beban Penyisihan Piutang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.237 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.299.368.381,68	7.202.496.809,52
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	574.124.517,32	192.451.143,63
Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang Sah	376.474.978,30	0,00
Jumlah	7.249.967.877,30	7.394.947.953,15

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Piutang sebelum Tahun Anggaran 2023 dan pada Tahun Anggaran 2023 yang disisihkan sesuai dengan kualitas umur piutang yang ditentukan pada Peraturan Bupati. Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.249.967.877,30 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.238 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	11.477.971,00	0,00	11.477.971,00
RSUD Bengkalis	87.644.930,00	0,00	87.644.930,00
RSUD Kecamatan Mandau	277.352.077,30	378.802.738,75	(101.450.661,45)
Badan Pendapatan Daerah	6.299.368.381,68	6.823.694.070,77	(524.325.689,09)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	122.191.950,00	100.262.800,00	21.929.150,00
Dinas Perhubungan	451.932.567,32	92.188.343,63	359.744.223,69
Jumlah	7.249.967.877,30	7.394.947.953,15	(144.980.075,85)

5.4.2.A.l Beban Lain-lain

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
34.752.704.236,00	63.090.756.534,00	(28.338.052.298,00)

Beban Lain-lain menurut jenisnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.239 Rincian Realisasi Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.739.681.686,00	62.261.160.923,00
Beban Tidak Terduga	13.022.550,00	829.595.611,00
Jumlah	34.752.704.236,00	63.090.756.534,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.752.704.236,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.240 Rincian Realisasi Beban Lain-lain Per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	3.863.728.800,00	4.924.651.811,00	(1.060.923.011,00)
Dinas Kesehatan	1.625.579.316,00	11.338.603.091,00	(9.713.023.775,00)
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	66.970.000,00	10.565.862.000,00	(10.498.892.000,00)
Badan penanggulangan Bencana Daerah	82.000.000,00	197.075.000,00	(115.075.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	13.400.000,00	4.500.000,00	8.900.000,00
Dinas Sosial	680.420.450,00	710.778.000,00	(30.357.550,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	232.750.000,00	335.200.000,00	(102.450.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	160.718.145,00	251.682.900,00	(90.964.755,00)
Dinas Ketahanan Pangan	14.275.000,00	41.870.000,00	(27.595.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	161.000.000,00	965.030.788,00	(804.030.788,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	125.120.000,00	(125.120.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	191.464.000,00	366.500.000,00	(175.036.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.259.325.000,00	1.624.002.125,00	(364.677.125,00)
Dinas Perhubungan	4.750.000,00	0,00	4750000,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	48.614.000,00	30.000.000,00	18.614.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	103.850.000,00	27.000.000,00	76.850.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	23.100.000,00	27.300.000,00	(4.200.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.077.589.000,00	5.870.656.000,00	(4.793.067.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.700.000,00	47.410.000,00	(40.710.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	0,00	226.000.000,00	(226.000.000,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.103.542.000,00	1.691.207.000,00	(587.565.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.600.000,00	1.067.800.000,00	(1.028.200.000,00)
Sekretariat Daerah	10.105.822.575,00	9.790.839.208,00	314.983.367,00
Sekretariat DPRD	11.200.000,00	10.500.000,00	700.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.022.550,00	829.595.611,00	(816.573.061,00)
Badan Pendapatan Daerah	7.350.000,00	35.900.000,00	(28.550.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	167.820.000,00	321.150.000,00	(153.330.000,00)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	1.113.642.000,00	920.940.000,00	192.702.000,00
Kantor Camat Bantan	456.250.000,00	593.550.000,00	(137.300.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	806.250.000,00	918.325.000,00	(112.075.000,00)
Kantor Camat Siak Kecil	437.284.000,00	515.340.000,00	(78.056.000,00)
Kantor Camat Bandar Laksmana	703.658.000,00	578.050.000,00	125.608.000,00
Kantor Camat Rupal	1.384.900.000,00	1.284.376.000,00	100.524.000,00
Kantor Camat Rupal Utara	908.052.000,00	782.100.000,00	125.952.000,00
Kantor Camat Mandau	5.641.827.000,00	3.955.720.000,00	1.686.107.000,00
Kantor Camat Pinggir	1.021.000.000,00	932.750.000,00	88.250.000,00
Kantor Camat Batin Solapan	682.674.400,00	656.250.000,00	26.424.400,00
Kantor Camat Talang Muandau	478.226.000,00	476.122.000,00	2.104.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.250.000,00	42.000.000,00	(11.750.000,00)
Jumlah	34.752.704.236,00	63.090.756.534,00	(28.338.052.298,00)

5.4.2.B. Beban Transfer

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
479.777.554.535,00	381.135.191.639,00	98.642.362.896,00

Beban Transfer merupakan beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkalis untuk realisasi Tahun anggaran 2023. Realisasi Beban Transfer 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp479.777.554.535,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.2.B.a Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
10.550.407.500,00	8.925.199.999,00	1.625.207.501,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.241 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	10.550.407.500,00	8.925.199.999,00	1.625.207.501,00
Jumlah	10.550.407.500,00	8.925.199.999,00	1.625.207.501,00

5.4.2.B.b Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	2.268.119.000,00	2.098.906.889,00	169.212.111,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ini merupakan beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.242 Rincian Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.268.119.000,00	2.098.906.889,00	169.212.111,00
Jumlah	2.268.119.000,00	2.098.906.889,00	169.212.111,00

5.4.2.B.c Beban Transfer Bantuan Keuangan

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
	466.959.028.035,00	370.111.084.751,00	96.847.943.284,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkalis dengan realisasi per 31 Desember Tahun anggaran 2023 sebesar Rp466.959.028.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.243 Rincian Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa -ADD se-Kabupaten Bengkalis	335.052.574.619,00	241.018.381.000,00	94.034.193.619,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (BERMASA)	131.906.453.416,00	129.092.703.751,00	2.813.749.665
Jumlah	466.959.028.035,00	370.111.084.751,00	96.847.943.284,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.3 Surplus Non Operasional

5.4.3.a Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	955.544.021,00	(955.544.021,00)

Tabel 5.244 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per SKPD

SKPD	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Kabupaten Bengkulu	0,00	12.099.999,00	(12.099.999,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	90.920.344,00	(90.920.344,00)
Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.768.700,00	(12.768.700,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	11.879.100,00	(11.879.100,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	81.164.847,00	(81.164.847,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	12.828.282,00	(12.828.282,00)
Dinas Perikanan	0,00	28.853.332,00	(28.853.332,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	153.245.022,00	(153.245.022,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	89.000.000,00	(89.000.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	41.623.999,00	(41.623.999,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	43.134.502,00	(43.134.502,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	324.092.227,00	(324.092.227,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	20.699.100,00	(20.699.100,00)
Kecamatan Pinggir	0,00	21.234.567,00	(21.234.567,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
Jumlah	0,00	955.544.021,00	(955.544.021,00)

5.4.4. Defisit Non Operasional

5.4.4.a Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
317.628.366.082,12	(339.231.839.440,46)	656.860.205.522,58

Jumlah Surplus sebesar Rp317.628.366.082,12 tersebut merupakan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkalis untuk periode 31 Desember Tahun anggaran 2023 dimana jumlah Pendapatan-LO secara keseluruhan lebih besar dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO selama periode 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.470.807.780.038,62 sementara total Beban selama periode 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp4.153.179.413.956,50 serta Surplus/Defisit Penjualan sebelum Pos luar biasa periode 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 5. Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA 2023 dan TA 2022 terdiri atas:

Tabel 5. 245 Rincian Arus Kas

Arus Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Aktivitas Operasi	685.755.332.200,34	221.648.942.997,42
Aktivitas Investasi	(891.490.372.209,00)	(1.108.759.449.096,00)
Aktivitas Pendanaan	137.648.295,00	419.833.002,00
Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	(205.597.391.713,66)	(886.690.673.096,58)

Realisasi Arus Kas Bersih selama TA 2023 terjadi defisit sebesar Rp205.597.391.713,66 sedangkan realisasi TA 2022 terjadi defisit sebesar Rp886.690.673.096,58. Realisasi kas bersih dapat dirinci sebagai berikut:

5. 5. 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	685.755.332.200,34	221.648.942.997,42

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis selama satu periode akuntansi.

Tabel 5. 246 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	4.021.936.083.669,39	3.328.458.943.832,30
Arus Kas Keluar	3.336.180.751.469,05	3.106.810.000.834,88
Jumlah	685.755.332.200,34	221.648.942.997,42

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama TA 2023 sebesar Rp685.755.332.200,34 sedangkan realisasi TA 2022 sebesar Rp221.648.942.997,42. Adapun rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

A. Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp4.021.936.083.669,39 merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Operasi yang berasal dari :

a. Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp106.094.877.800,42 merupakan Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah selama TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 247 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel	4.129.579.262,00	3.822.970.810,00
Pajak Restoran	16.746.168.222,00	15.094.975.589,00
Pajak Hiburan	1.651.045.976,00	1.631.703.647,00
Pajak Reklame	1.478.483.165,00	1.302.150.406,00
Pajak Penerangan Jalan	35.014.021.551,42	32.856.985.614,00
Pajak Parkir	326.816.873,00	386.354.005,00
Pajak Air Tanah	1.370.853.566,00	1.304.374.066,00
Pajak Sarang Burung Walet	541.073.728,00	567.110.748,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.920.935.550,00	6.924.910.650,00
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	27.864.616.194,00	24.356.482.448,00
Pajak BPHTB	10.051.284.723,00	6.165.051.633,00
Jumlah	106.094.877.800,42	94.213.069.616,00

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp14.326.950.569,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah selama TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 248 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.311.240.000,00	1.317.525.000,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	1.157.650.000,00	687.400.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.498.731.000,00	1.419.738.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	34.471.000,00	44.276.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	192.272.000,00	180.883.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	333.044.000,00	358.835.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	602.262.000,00	598.740.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	555.135.000,00	423.950.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	260.720.000,00	177.370.000,00
Retribusi Terminal	5.929.000,00	8.021.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	276.395.000,00	239.185.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	13.420.000,00	11.080.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.469.863.727,00	4.212.463.347,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	198.865.000,00	171.274.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	97.924.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Izin Usaha Perikanan	180.680.000,00	301.822.600,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.236.272.842,00	1.460.627.381,00
Jumlah	14.326.950.569,00	11.711.114.828,00

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan dividen dari PT. Bank Riau Kepri selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp316.861.797.346,00 dan Rp27.311.794.580,00 yang berasal dari :

Tabel 5. 249 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2023	Tahun 2022
PT. Bank Riau	316.861.797.346,00	27.311.794.580,00
Jumlah	316.861.797.346,00	27.311.794.580,00

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Bengkalis selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp177.304.804.088,97 dan Rp216.398.406.349,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 250 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	955.544.021,00
Jasa Giro Kas Daerah	2.357.994.260,00	16.842.971.640,00
Jasa Giro Pemegang Kas	241.430.959,00	483.922.532,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
Pendapatan Bunga	6.019.095.062,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	411.375.719,00	328.161.551,00
Hasil Eksekusi Jaminan	505.671.927,02	24.944.402.619,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	126.957.530,00	69.156.368,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.101.665.148,09	6.162.683.332,15
Pendapatan BLUD	157.832.808.816,86	166.301.167.393,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.707.804.667,00	310.396.893,00
Jumlah	177.304.804.088,97	216.398.406.349,15

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) TA 2023 dan 2022 sejumlah Rp2.410.096.284.255,00 dan Rp2.077.206.468.039,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 251 Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Bagi Hasil Pajak	1.588.869.887.040,00	1.577.609.899.644,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	821.226.397.215,00	499.596.568.395,00
Jumlah	2.410.096.284.255,00	2.077.206.468.039,00

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode selama TA 2023 dan 2022 sejumlah Rp1.588.869.887.040,00 dan Rp1.577.609.899.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 252 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagi Hasil dari PBB	1.546.381.926.495,00	1.527.091.597.644,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	41.364.992.188,00	49.712.508.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	1.122.914.652,00	805.794.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	53.705,00	0,00
Jumlah	1.588.869.887.040,00	1.577.609.899.644,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode selama TA 2023 dan 2022 Rp821.226.397.215,00 dan sebesar Rp499.596.568.395,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 253 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	773.516.949.946,00	478.222.145.000,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	5.914.447.338,00	2.892.430.000,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	38.343.174.720,00	16.523.519.000,00
Cukai Hasil Tembakau	0,00	163.395,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	3.451.825.211,00	1.958.311.000,00
Jumlah	821.226.397.215,00	499.596.568.395,00

f. Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp354.410.355.837,00 dan Rp335.727.628.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 254 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Alokasi Umum	354.410.355.837,00	335.727.628.000,00
Jumlah	354.410.355.837,00	335.727.628.000,00

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp67.083.395.782,00 dan Rp77.629.486.104,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 255 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	Tahun 2023	Tahun 2022
DAK Bidang Pendidikan	5.650.695.441,00	29.801.633.258,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	61.232.700.341,00	22.848.236.670,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	0,00	799.880.000,00
DAK Bidang Jalan Reguler	0,00	12.524.336.282,00
DAK Bidang Air Minum Reguler	0,00	7.350.954.854,00
DAK Bidang Sanitasi Reguler	0,00	4.304.445.000,00
Jumlah	67.083.395.782,00	77.629.486.104,00

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp249.868.030.629,00 dan Rp210.710.908.447,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 256 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Tahun 2023	Tahun 2022
DAK Non Fisik-BOS Reguler	96.326.678.447,00	81.602.875.514,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.540.000.000,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.545.702.000,00	104.271.442.960,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.549.750.000,00	2.411.750.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.222.656.000,00	6.678.030.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.192.000.000,00	773.400.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.215.041.036,00	8.940.178.510,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.705.806.104,00	4.277.408.598,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	350.280.600,00
DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	308.033.842,00	378.951.300,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	250.928.400,00	362.760.965,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.579.370.000,00	663.830.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	326.191.300,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.105.873.500,00	0,00
Jumlah	249.868.030.629,00	210.710.908.447,00

i. Penerimaan Dana Desa

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Dana Desa Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode selama TA 2023 sejumlah Rp129.623.338.071,00 sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp127.024.597.939,00 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 257 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Desa	129.623.338.071,00	127.024.597.939,00
Jumlah	129.623.338.071,00	127.024.597.939,00

j. Penerimaan Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau selama TA 2023 dan 2022 adalah dan Rp10.166.000.000,00 dan Rp12.957.842.500,00 dengan rincian:

Tabel 5. 258 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan

Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	10.166.000.000,00	12.957.842.500,00
Jumlah	10.166.000.000,00	12.957.842.500,00

k. Penerimaan Hibah

Pendapatan Hibah selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp808.958,15.

Tabel 5. 259 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah	0,00	808.958,15
Jumlah	0,00	808.958,15

l. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan dari Pendapatan Lainnya terdiri atas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya selama TA 2023 dan 2022 sejumlah Rp186.100.249.291,00 dan Rp138.522.362.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 260 Rincian Arus dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan Pendapatan Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	186.100.249.291,00	138.522.362.493,00
Jumlah	186.100.249.291,00	138.522.362.493,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan transfer Pemerintah Provinsi Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA 2023 dan 2022 sejumlah Rp186.100.249.291,00 dan Rp138.522.362.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 261 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Kendaraan Bermotor	43.530.179.370,00	29.967.419.478,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.146.122.546,00	30.785.220.348,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	76.785.063.562,00	45.364.296.738,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.185.185.553,00	1.082.953.355,00
Pajak Rokok	31.453.698.260,00	31.322.472.574,00
Jumlah	186.100.249.291,00	138.522.362.493,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

B. Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas sejumlah Rp3.336.180.751.469,05 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5. 262 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Pegawai	1.163.398.270.080,00	1.052.966.396.064,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.381.790.584.075,05	1.381.017.141.616,88
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	26.215.958.998,00	23.970.315.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	123.667.935.263,00	109.378.573.578,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	33.981.267.273,00	31.227.797.850,00
Pembayaran Tak Terduga	13.022.550,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	12.818.526.500,00	11.024.106.888,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	594.295.186.730,00	497.225.669.838,00
Jumlah	3.336.180.751.469,05	3.106.810.000.834,88

5. 5. 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	(891.490.372.209,00)	(1.108.759.449.096,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2023 dan 2022 sebesar defisit Rp891.490.372.209 dan defisit Rp1.108.759.449.096,00 terdiri dari :

Tabel 5. 263 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	0,00	955.544.021,00
Arus Kas Keluar	891.490.372.209,00	1.109.714.993.117,00
Jumlah	(891.490.372.209,00)	(1.108.759.449.096,00)

A. Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp0,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Investasi dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 264 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
PPKD	0,00	955.544.021,00
Jumlah	0,00	955.544.021,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

B. Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp891.490.372.209,00 dan Rp1.109.714.993.117,00. Arus Keluar Kas merupakan nilai kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperoleh aset tetap. Nilai Arus Keluar Kas adalah sebesar Rp891.490.372.209,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 265 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Perolehan Peralatan dan Mesin	129.460.420.955,00	214.056.580.897,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	133.063.665.969,00	163.846.016.961,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	618.021.154.762,00	720.331.145.069,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.896.502.523,00	10.867.289.576,00
Perolehan Aset lainnya	48.628.000,00	613.960.614,00
Jumlah	891.490.372.209,00	1.109.714.993.117,00

5. 5. 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	137.648.295,00	419.833.002,00

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 266 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	137.648.295,00	419.833.002,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Jumlah	137.648.295,00	419.833.002,00

5. 5. 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pendanaan pemerintah, namun mempengaruhi nilai kas. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Selama TA 2023 aktivitas transitoris yang terjadi berupa penerimaan dan pengeluaran dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 267 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Masuk	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
Arus Kas Keluar	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
Jumlah	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

Tabel 5. 268 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
Jumlah	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023	Tahun 2022
	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp202.076.758.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 269 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2023	Tahun 2022
PPh	58.665.998.899,00	63.901.900.108,00
PPN	64.031.337.663,00	86.609.782.653,00
IWP	79.379.422.228,00	64.233.193.696,00
Taperum	0,00	0,00
Jumlah	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2023	Tahun 2022
	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

Tabel 5. 270 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00
SP2D - SPJ	0,00	0,00
Jumlah	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023	Tahun 2022
	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp202.076.758.790,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 271 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2023	Tahun 2022
PPh	58.665.998.829,00	63.801.960.128,00
PPN	64.031.337.663,00	86.609.782.653,00
IWP	79.379.422.228,00	64.233.193.696,00
Taperum	0,00	0,00
Jumlah	202.076.758.790,00	214.744.876.457,00

5. 5. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
	(205.597.391.713,66)	(886.690.673.096,58)

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas selama TA 2023 adalah Rp205.597.391.713,66 merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 sebesar Rp685.755.332.200,34 dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2023 sebesar minus Rp891.490.372.209,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 sebesar Rp137.648.295,00 serta Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2023 sebesar Rp0,00.

5. 5. 6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33

Saldo akhir Kas sebesar Rp87.671.284.252,67 merupakan jumlah keseluruhan kas selama TA 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp293.268.675.966,33. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 272 Rincian Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di BUD	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.400.263,00	3.540.999.407,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	13.329.000,00	1.179.559,00
Kas di Bendahara BLUD	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66
Kas di Bendahara BOS	9.912.068,00	21.048.100,00
Kas Lainnya	940.006.002,00	258.507.223,15
Jumlah	87.671.284.252,67	293.268.675.966,33

a) Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD selama TA 2023 sebesar Rp83.725.505.975,20 dan Tahun 2022 sebesar Rp277.994.694.649,52 .



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas di BUD terdiri dari :

Tabel 5. 273 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD	Tahun 2023	Tahun 2022
Bank Riau Kepri	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52
Jumlah	83.725.505.975,20	277.994.694.649,52

b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp54.400.263,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran di SKPD yang terdiri dari Sisa UP (Uang Persediaan), selama TA 2023 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 274 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2023	Tahun 2022	Keterangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	263,00	0,00	Sisa UP
Badan Pendapatan Daerah	24.000.000,00	0,00	Sisa UP
Kecamatan Siak Kecil	30.400.000,00	100.000,00	Sisa UP
Dinas Pendidikan	0,00	3.540.888.407,00	Sisa UP
PU	0,00	11.000,00	Sisa UP
Jumlah	54.400.263,00	3.540.899.407,00	

c) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp13.329.000,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan di SKPD selama TA 2023 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Penerimaan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 275 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.329.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.179.559,00
Jumlah	13.329.000,00	1.179.559,00

d) Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp2.928.130.944,47 merupakan Kas di Bendahara BLUD di RSUD selama TA 2023. Kas di Bendahara BLUD dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 276 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
	Kas di Bendahara BLUD	Kas di Bendahara BLUD
RSUD Mandau	719.685.807,37	7.019.066.471,56
RSUD Bengkalis	1.153.899.984,10	3.895.605.133,10



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	1.054.545.153,00	537.575.423,00
Jumlah	2.928.130.944,47	11.452.247.027,66

e) Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp9.912.068,00 dan Rp21.048.100,00 merupakan Kas di Bendahara BOS pada SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada tanggal 31 Desember 2023. Kas di Bendahara BOS dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 277 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Tahun 2023	Tahun 2022
Jasa Giro	560.300,00	560.300,00
Sekolah Dasar	301.768,00	16.713.300,00
Sekolah Menengah Pertama	9.050.000,00	3.774.500,00
Jumlah	9.912.068,00	21.048.100,00

Jumlah Kas di Bendahara BOS ini merupakan bagian dari SiLPA dan bagian dari pengakuan pendapatan secara akrual.

f) Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas Lainnya selama TA 2023 dan 2022 sebesar Rp939.970.452,00 dan Rp258.507.223,15 merupakan Kas di rekening Puskesmas sebesar Rp682.272.187,00 dan di Rekening Penampung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp257.698.265 dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5. 278 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	682.272.187,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	257.698.265,00	257.698.265,00
Dinas Kesehatan	0,00	808.958,15
Jumlah	939.970.452,00	258.507.223,15

5. 5. 7. Perbandingan antara Saldo Akhir Kas dengan SiLPA

Saldo akhir kas sebesar Rp87.694.512.738,25 terdiri dari :

1) Kas di BUD	83.725.505.975,20
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	54.400.263,00
3) Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	13.329.000,00
5) Kas di Bendahara JKN	0,00
6) Kas di Bendahara BLUD	2.928.130.944,47
7) Kas di Bendahara BOS	9.912.068,00
8) Kas Lainnya	940.006.002,00
Jumlah	87.671.284.252,67

Saldo akhir Kas sebesar Rp87.671.284.252,67 sama jika dibandingkan dengan saldo SiLPA dikarenakan Kas di Bendahara BOS dan saldo di kas lainnya menjadi bagian SiLPA selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6. PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

2023	2022
8.862.898.371.238,89	9.199.249.753.033,92

Saldo awal Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp8.862.898.371.238,89. jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp9.199.249.753.033,92 mengalami penurunan sebesar Rp336.351.381.795,03 atau 3,66% yang merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2022

5.6.2. Surplus(Defisit) - LO

2023	2022
317.628.366.082,12	(339.231.839.440,46)

Surplus- LO tahun 2023 sebesar Rp317.628.366.082,12 Sedangkan defisit tahun 2022 sebesar Rp339.231.839.440,46 maka mengalami kenaikan sebesar Rp656.860.205.522,57 atau 193,63% merupakan surplus atas kegiatan operasional (Basis Akrual), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mengurangi Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.6.4 Lain-lain

2023	2022
2.598.635.332,60	2.880.457.645,44

Lain-lain Tahun 2023 Sebesar Rp7.342.159.517,26 merupakan koreksi saldo awal Tahun 2023 Dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.a Koreksi Nilai Piutang Tahun 2023 sebesar Rp130.586.798.021,00 Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.279 Rincian Koreksi Nilai Piutang

SKPD	Koreksi Nilai Piutang	Keterangan
RSUD Bengkalis	(18.526.792,00)	Koreksi lebih catat Piutang BPJS (Klaim yang telah diverifikasi dan dibayarkan BPJS lebih kecil dari piutang Yang dicatat)
	(32.900,00)	Koreksi lebih catat Piutang BPJS dikarenakan adanya Kliring BNI ke Rekening Bank Riau Bendahara Penerimaan
RSUD Kecamatan Mandau	(7.428.909,00)	Koreksi lebih catat Piutang jampersal Rohil dikarenakan tidak dianggarkan lagi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

		Koreksi kurang catat Piutang Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan kesalahan rekapan pencatatan piutang parkir Kecamatan Mandau tahun 2022 sebesar 67.000.000 yang seharusnya sebesar 76.000.000 perbulan sehingga terjadi kurang catat sebesar Rp. 9.000.000 perbulan selama 6 bulan
Dinas Perhubungan	54.000.000,00	
		Koreksi Nilai Piutang DBH Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2022 SK Gubn No. KPTS.588/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.439.916.074,00	
		Koreksi Nilai Piutang DBH Pusat dikarenakan terbitnya PMK 108 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023
	126.073.084.851,00	
		Koreksi kurang catat Piutang Pajak Reklame disebabkan adanya pembayaran piutang pada tahun 2023 namun nilai piutang tersebut tidak tercatat di daftar piutang tahun sebelumnya.
	48.053.000,00	
		Koreksi kurang catat Piutang Pajak Air tanah di sebabkan adanya pembayaran piutang pada tahun 2023 namun nilai piutang tersebut tidak tercatat di daftar piutang tahun sebelumnya.
Badan Pendapatan Daerah	516.697,00	
		Koreksi lebih catat Piutang Pajak Reklame disebabkan pembayaran Piutang pada tahun 2022 kebawah yang belum tercatat pada laporan keuangan tahun 2022
	(177.500,00)	
		Koreksi Pajak Restoran disebabkan adanya pembayaran piutang pada tahun 2022 tetapi belum mengurangi nilai Piutang di laporan keuangan 2022
	(2.606.500,00)	
	Total	130.586.798.021,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6.4. b Koreksi Nilai Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp44.193.471,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.280 Rincian Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

SKPD	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2023	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2022
RSUD Bengkalis	2.146.500,00	24.202.700,00
RSUD Kecamatan Mandau	7.433.359,00	(84.957.206,64)
Dinas Perhubungan	(11.744.999,90)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(7.641.388,10)	50.289.249,50
Total	(9.806.529,00)	(10.465.257,14)

Tabel 5.281 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang RSUD Bengkalis

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2023	Keterangan
Penyisihan Piutang BPJS	2.440.330,00	Koreksi yang diakibatkan karena pengkoreksian Piutang BPJS
Total	2.440.330,00	

Tabel 5.282 Koreksi Nilai RSUD Kecamatan Mandau

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2023	Keterangan
Penyisihan Piutang BPJS	7.433.359,00	Koreksi yang diakibatkan karena pengkoreksian Piutang BPJS
Total	7.433.359,00	

Tabel 5.283 Koreksi Nilai Penyisihan Dinas Perhubungan

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2023	Keterangan
Penyisihan Piutang Parkir di Tepi Jalan Umum	(11.745.000,00)	Koreksi yang diakibatkan karena pengkoreksian Piutang Parkir di Tepi Jalan Umum
Penyisihan Piutang Pelayanan Kepelabuhan	0,10	Pelayanan Kepelabuhan disebabkan salah hitung penyisihan piutang
Total	(11.744.999,90)	

Tabel 5.284 Nilai Penyisihan Badan Pendapatan Daerah

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2023	Keterangan
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2019	(71.706,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2020	(5.029.875,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2020	(30.192,00)	
Penyisihan Piutang Restoran Tanah tahun 2020	1.303.250,00	Koreksi dikarenakan adanya koreksi Nilai Piutang Pajak
Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2021	(1.434.975,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2022	(2.346.600,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2022	(31.290,10)	
Total	(7.641.388,10)	

5.6.4.c. Koreksi Nilai Persediaan selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp43.898.520,00 merupakan koreksi Persediaan pada Dinas Perhubungan yang disebabkan persediaan tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

5.6.4.d Koreksi Investasi Non Permanen selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.909.892,00 merupakan Koreksi atas Investasi Non Permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disebabkan adanya debitur yg sudah dinyatakan iunas oleh KPKNL namun masih tercatat sebagai Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6.4.e Koreksi Investasi Non Permanen diragukan tertagih selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.909.892,00 merupakan Koreksi atas Investasi Non Permanen diragukan tertagih pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

5.6.4.f Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan perbaikan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam Laporan Keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, Koreksi Nilai Aset pada SKPD Tahun 2023 sebesar Rp3.456.053.260,00 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.285 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

Jenis Piutang	Koreksi Nilai Aset Tetap 2023	Koreksi Nilai Aset Tetap 2022
Tanah	3.375.237.010,00	22.008.006,00
Peralatan dan Mesin	11.080.500,00	(403.047.660,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	(6.728.875.757,13)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.735.750,00	(193.000.000,00)
Aset Tetap Lainnya	-	(14.846.368,00)
Total	3.456.053.260,00	(7.317.761.779,13)

Tabel 5.286 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Per SKPD

SKPD	Koreksi Nilai Aset Tetap 2023	Koreksi Nilai Aset Tetap 2022
Dinas Pendidikan	66.280.000,00	(109.604.786,00)
Dinas Kesehatan	0,00	(132.026.925,10)
RSUD Bengkulu	11.080.500,00	(239.000,00)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	(49.560.000,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(17.650.000,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(5.132.799.640,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.421.266.350,00	(124.090.800,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	(75.564.100,07)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	(12.824.889,45)
Dinas Perikanan	0,00	(16.376.621,47)
Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	(622.221.781,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	(96.525.000,04)
Sekretariat Daerah	0,00	(155.057.500,00)
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.957.426.410,00	631.065.931,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	(1.086.300.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(150.000,00)
Inspektorat	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	0,00	(82.076.667,00)
Kantor Camat Bantan	0,00	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	0,00	(18.700.000,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	0,00
Kantor Camat Rupat	0,00	0,00
Kantor Camat Rupat Utara	0,00	(38.076.000,00)
Kantor Camat Mandau	0,00	0,00
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(178.984.000,00)
Total	3.456.053.260,00	(7.317.761.779,13)

Tabel 5.287 Dinas Pendidikan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	66.280.000,00	Koreksi Nilai Aset Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dikarenakan adanya penilaian kembali atas Aset Tanah tersebut yang awalnya bernilai Nol sehingga menambah nilai tanah
Total	66.280.000,00	

Tabel 5.288 RSUD Bengkalis

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	11.080.500,00	Koreksi Peralatan Mesin karena salah perhitungan Nilai Hutang Peralatan Mesin tahun 2022
Total	11.080.500,00	

Tabel 5.289 Dinas Perhubungan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	1.351.530.600,00	Koreksi Nilai Aset dikarenakan Aset Tanah yang tercatat pada KIB A seluas 3 hektar setelah diukur kelapangan ternyata luas tanah tersebut 5 hektar sehingga nilai tanah tersebut bertambah
Konstruksi dalam pengerjaan	69.735.750,00	Koreksi Nilai Aset dikarenakan pada tahun 2022 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan belum diakui sebagai KDP dan pada tahun 2023 fisiknya sudah selesai sehingga Belanja Konsultasi Perencanaan tersebut menambah nilai Aset
Total	1.421.266.350,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.290 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
	1.838.788.000,00	Koreksi Aset Tanah dikarenakan terdapat Aset Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 yang berlokasi di Jalan Wonosari Timur Kecamatan Bengkalis (perluasan waduk)
Tanah	35.583.410,00	Koreksi Aset Tanah dikarenakan terdapat Aset Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 yang berlokasi di Jalan Pembangunan I Desa Kelapapati (Balai Sidang Pengadilan Agama Bengkalis/ Rumah Dinas Ketua PA)
	83.055.000,00	Koreksi Aset Tanah dikarenakan terdapat Aset Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 yang berlokasi di Dusun Parit Lapis Desa Kembang Luar Kec Bantan
Total	1.957.426.410,00	

5.6.4.g Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp4.036.010.998,26 merupakan penyesuaian terkait dengan adanya Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2023, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.291 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan

Jenis Piutang	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2022
Peralatan dan Mesin	1.669.358.502,57	2.542.351.763,19
Gedung dan Bangunan	1.673.483.268,00	(13.314.464.036,73)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	653.364.227,36	(418.543.560.133,21)
Aset Tetap Lainnya	39.805.000,33	56.175.634.012,79
Total	4.036.010.998,26	(373.140.038.393,96)

Tabel 5.292 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Per SKPD

SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2023	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022
Dinas Pendidikan	359.830.974,33	1.033.932.681,00
Dinas Kesehatan	(18.002.560,00)	33.708.434,00
RSUD Bengkalis	(3.370.012,00)	671,00
PSUD Kecamatan Mandau	(1.495.694,00)	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.191.476.167,00)	2.188.247.186,56
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3.379.759.157,00	59.567.889.062,87
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.973.737,00	(1.125.476.635,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(251.583.711,35)	2.955.339,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	41.825.734,00	9.960.528,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	332.609.159,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.209.446,00	(200.647.602,00)
Dinas Ketahanan Pangan	273.226.800,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(15.571.425,00)	(3.563.161.233,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	(390.750.892,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.466.610.119,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	446.409.472,57	0,00
Dinas Perhubungan	(2.341.624.478,00)	(39.677.469.171,01)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(142.083,00)	(1.469.705.943,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(14.816.730,00)	(4.135.416,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.104.188.892,71	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(2.609.978,00)	(152.076.274,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(253.199.478,00)	(22.816.357,00)
Dinas Perikanan	404.757.550,00	235.515.842,00
Dinas Perkebunan	(13.570.223,00)	(11.824.882,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(24.761.900,00)	359.647.931,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	287.149.112,00	1.423.069.041,91
Sekretariat Daerah	16.812.238,00	(1.852.482.587,00)
Sekretariat DPRD	(9.575.572,00)	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.262.727,35	954.900.438,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(2.195.655.700,71)	(1.652.029.473,70)
Badan Pendapatan Daerah	331.980.000,00	28.688.671,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	358.693.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	2.096.622.583,70
Inspektorat	525.981.800,00	0,00
Kantor Camat Bengkulu	0,00	(477.999.702,00)
Kantor Camat Bantan	0,00	(4.596.036,00)
Kantor Camat Bukit Batu	4.151.139,00	(10.249.944,00)
Kantor Camat Siak Kecil	0,00	(27.381.854,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	(307.194,00)
Kantor Camat Rupal	(15.047.287,00)	(117.961.239,00)
Kantor Camat Rupal Utara	3.824.968,00	37.518.574,00
Kantor Camat Mandau	2.478.773.947,36	(526.407.341,00)
Kantor Camat Pinggir	302.976,00	426.870.286,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	(605.833,00)	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.290.000,00	158.863.506,00
Total	4.036.010.998,2600	21.096.214.119,3341

5.6.4.h Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 33.041.252,00 merupakan Koreksi atas lebih pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 2,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp33.041.250,00 yang dikarekan kesalahan dalam perhitungan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6.4.i Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp785.808.010,00 dapat dilihat pada rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.293 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 2023	Keterangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.339.673.121,00	Aset telah di hibahkan
Dinas Perikanan	600.000,00	double catat Koreksi disebabkan adanya transfer keluar Aset Lain-Lain ke Kantor Camat Bathin
Kantor Camat Mandau	677.188.750,00	Solapan Koreksi disebabkan adanya transfer masuk Aset dari Kantor Camat Mandau
Kantor Camat Bathin Solapan	(1.231.653.861,00)	
Total	785.808.010,00	

5.6.4.j Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp128.151.228.309,00 merupakan koreksi atas saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka yang disebabkan adanya perubahan Piutang DBH Pusat berdasarkan PMK 108 Tahun 2023.

5.6.4.l Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp3.359.467.415,00 dapat dilihat pada rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.294 Rincian Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

SKPD	2023	Keterangan
Dinas Pendidikan	(2.896.104.057,00)	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga merupakan koreksi kurang catat Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS. BPJS dari TPG yg belum tercatat sebagai Utang Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan 2022
RSUD Bengkulu	(463.384.359,00)	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga merupakan koreksi kurang catat akibat kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022 (Pembayaran lebih besar dari pada utang yang tercatat pada Laporan Keuangan 2022)
RSUD Kecamatan Mandau	20.000,00	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga merupakan koreksi lebih catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022 (Pembayaran lebih rendah dari pada utang yang tercatat pada Laporan Keuangan 2022)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	1.000,00	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga merupakan koreksi lebih catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022 (Nilai Utang yang tercatat pada Laporan Keuangan tahun 2022 Atas Pekerjaan Peningkatan Jl. Jalan Sangkris Ujung RT. 05 RW. 15 Kel. Air Jamban sebesar Rp149.101.000,00 dibayar sebesar Rp149.100.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,00	Koreksi lebih catat hutang Alokasi Dana Desa (ADD)
Total	(3.359.467.415,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6.4.j Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.734.675.435,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.295 Rincian Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi

SKPD	2023
Satuan Polisi Pamong Praja	(364.045.684,00)
Dinas Perhubungan	(651.250.097,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(157.000.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(663.828.068,00)
Sekretariat DPRD	(3.096.695.428,00)
Badan Pendapatan Daerah	(126.908.293,66)
Badan Penelitian dan Pengembangan	325.052.135,00
Total	(4.734.675.435,66)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp9.183.125.372.653,61

2023	2022
9.183.125.372.653,61	8.862.898.371.238,90



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

6.2 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni tahun 2023 terdiri dari:

- Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan yang mencakup 7 badan;
- Dinas yang mencakup 23 dinas;
- Kantor yang mencakup 1 kantor;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Daftar SKPD pada Pemkab Bengkulu Tahun 2023

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Kabupaten Bengkulu
4	RSUD Kecamatan Mandau
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Perkebunan
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	Sekretariat Daerah
29	Sekretariat DPRD
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
34	Badan Penelitian dan Pengembangan
35	Inspektorat
36	Kantor Camat Bengkalis
37	Kantor Camat Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana
41	Kantor Camat Rupal
42	Kantor Camat Rupal Utara
43	Kantor Camat Mandau
44	Kantor Camat Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6.3 Informasi Lainnya

Informasi lainnya pada Pemkab Bengkulu selama periode tahun 2022 antara lain adalah sebagai berikut.

a. Adanya penambahan jumlah hari kerja pada SKPD :

- 1) Dinas Pendidikan untuk 1 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.123.061.782,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2024 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- 2) Dinas Perhubungan untuk 2 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.786.316.161,56. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2024 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- 3) Dinas Kesehatan untuk 1 paket pekerjaan dengan total nilai Rp2.160.383.635,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2024 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- 4) Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan untuk 1 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.199.600.000,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2024 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 9 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.32.512.189.023,04. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2024 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 (*audited*) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkulu bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menyinergikan regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset. Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Di samping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan piutang di SKPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada SKPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun ditingkat SKPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI